Milik Depdikbud
Tidak Diperdagangkan

KERAJAAN TRADISIONAL DI INDONESIA :

B I M A

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
JAKARTA
1997

Milik Depdikbud
Tidak Diperdagangkan

KERAJAAN TRADISIONAL DI INDONESIA : BIMA

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
JAKARTA
1997

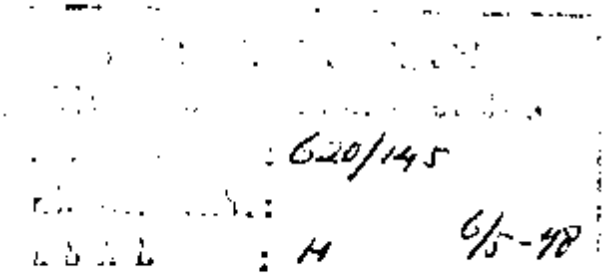
620/145
6/5-98

KERAJAAN TRADISIONAL DI INDONESIA : BIMA

Penulis : Tawalinuddin Haris
Susanto Zuhdi
Triana Wulandari

Penyunting : Tawalinuddin Haris

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang

Diterbitkan oleh : Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Jakarta 1997

Edisi 1997

Dicetak oleh : CV. PUTRA SEJATI RAYA

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

Karya-karya sejarah dengan pelbagai aspek yang dikaji dan ditulis melalui Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (Proyek IDSN) dimaksudkan untuk disebarluaskan ke tengah-tengah masyarakat. Adapun tujuannya ialah untuk memberikan bahan informasi kesejarahan kepada masyarakat. Dengan demikian diharapkan banyak pihak akan dapat menambah pengetahuannya tentang sejarah, baik yang menyangkut akumulasi fakta maupun proses peristiwa. Di samping itu para pembaca juga akan memperoleh nilai-nilai kesejarahan, baik yang mengenai kepahlawanan, kejuangan, maupun perkembangan budaya yang terungkap dari paparan yang terdapat dalam karya-karya sejarah itu.

Kami menyadari bahwa buku-buku karya Proyek IDSN ini tentu tidak luput dari pelbagai kelemahan bahkan mungkin kesalahan-kesalahan. Namun demikian kami ingin meyakinkan kepada pembaca bahwa kelemahan atau kesalahan itu pastilah tidak disengaja.

Berdasarkan keterangan di atas, kami sangat berterima kasih kepada pembaca jika sekiranya bersedia untuk memberikan kritik-kritik terhadap karya-karya Proyek IDSN ini. Kritik-kritik itu pasti akan sangat berguna bagi perbaikan karya-karya proyek ini di kemudian hari.

Kepada penulis yang telah menyelesaikan tugasnya dan kepada semua pihak yang ikut serta, baik langsung maupun tidak langsung dalam mewujudkan karya-karya Proyek IDSN ini sebagaimana adanya di tangan pembaca, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal Kebudayaan

Prof. Dr. Edi Sedyawati
NIP. 130 202 962

PENGANTAR

Buku *Kerajaan Tradisional : Bima*, merupakan salah satu hasil pelaksanaan kegiatan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam tahun 1995/1996.

Penulisan Sejarah Kerajaan Tradisional : Bima ini merupakan salah satu bagian dari penulisan kerajaan-kerajaan tradisional di Indonesia yang dilakukan Proyek ISDN secara bertahap.

Buku ini memuat ikhwal Sejarah Tradisional Bima dalam berbagai aspek. Diantaranya tentang sejarah, geografi, perkembangan kemasyarakatan, sejarah perkembangan kemasyarakatan, sejarah perkembangan kekuasaan dan pemerintahan, ekonomi perdagangan, proses islamisasi, interaksi dengan kerajaan-kerajaan lain, interaksi dengan VOC, serta usaha-usaha untuk mempertahankan dari terhadap kekuasaan Pemerintahan Kolonial Belanda.

Diharapkan dengan terbitnya buku ini dapat menambah khasanah kesejahteraan dan memberi informasi yang memadai bagi masyarakat yang berminat pada kajian tersebut. Di samping itu diharapkan dapat menjadi bahan bagi peningkatan kesadaran sejarah masyarakat pada umumnya terutama generasi muda.

Kepada pihak-pihak yang telah membantu terlaksananya penerbitan buku ini, kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, Oktober 1997

Pemimpin Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional

G.A. Ohorella

NIP. 130370094

KATA PENGANTAR

Persoalan yang dihadapi suatu kegiatan penelitian yang dilaksanakan dalam sebuah tim, pada dasarnya tidak sesukar ketika penulisan dilakukan. Kegiatan penelitian dalam tim dapat dilakukan dengan pembagian kerja yang telah lebih dahulu direncanakan. Dalam kegiatan penulisan dalam tim kendala muncul terutama akan terlihat dalam konsistensi pemaparan maupun gaya bahasa yang digunakan.

Dalam penelitian dan penulisan ini sudah tentu kami banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak. Perpustakaan Nasional, Arsip Nasional merupakan tempat yang paling banyak kami kunjungi untuk perolehan sumber dan bahan penulisan. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam kegiatan penelitian dan penulisan ini.

Jakarta, Maret 1996

Tim Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

Sambutan Direktur Jenderal Kebudayaan v

Pengantar vii

Kata Pengantar ix

Daftar Isi xi

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Permasalahan 2

1.3 Tujuan 2

1.4 Sumber 3

Bab II Keadaan Umum Daerah

2.1 Geografi 5

2.2 Penduduk 16

Bab III Kemunculan Kerajaan Bima Sampai Abad ke-17

3.1 Bima Sebelum Islam 24

3.2 Masuk dan Berkembangnya Islam di Bima 32

3.3 Bima dalam Jaringan Pelayaran dan Perdagangan Nusantara 44

Bab IV Kesultanan Bima dalam Abad ke-18
4.1 Pemerintahan 69
4.2 Penetrasi VOC 78

Bab V Kesultanan Bima dan VOC dalam Abad ke-19
5.1 Pemerintahan 89
5.2 Reaksi terhadap Dominasi Kekuasaan Kolonial 99

Simpulan 115

Daftar Pustaka 117

Lampiran 137

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejarah Indonesia ditinjau dari terbentuknya nasion atau bangsa modern sebenarnya belumlah lama. Gejala itu baru nampak pada awal abad ke-20. Sebelum periode itu konsep nasion baru belum dikenal. Sejarah Indonesia periode itu lebih terkait kepada hal-hal yang bersifat kedaerahan. Tiap-tiap daerah di Indonesia seolah-olah mempunyai sejarahnya sendiri. Adalah menarik dan penting untuk meniliti dan menggambarkan perkembangan masing-masing sejarah daerah itu. Dalam perkembangan itu dapat dilihat persinggungan perjalanan sejarah masing-masing daerah dalam lingkup yang kemudian disebut Indonesia bahkan dalam cakupan yang lebih luas lagi seperti Asia Tenggara. Abad ke-15 dan ke-16 dalam sejarah di Asia Tenggara dikenal sebagai kurun niaga. Periode itu di kawasan Asia Tenggara ditandai dengan semakin meningkatnya saling keterhubungan antara satu bagian dengan bagian yang lain dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan. Ini berarti bahwa kerajaan-kerajaan di Indonesia ketika itu semakin intensif berhubungan baik dengan kerajaan sekitarnya maupun dengan orang-orang Eropa yang mulai berdatangan. Interaksi itu menarik diamati oleh karena selain kerajaan-kerajaan itu mengakar kepada ikatan primordialnya juga dihadapkan dengan nilai-nilai modern (baca: barat).

Dari sekian banyak kerajaan di Indonesia dalam kerangka seperti itu adalah kerajaan Bima di Sumbawa. Keberadaan Bima di dalam mata rantai pelayaran dan perdagangan di Nusantara tidak terlepas dari letak kepulauan Sunda Kecil secara keseluruhan. Kepulauan ini dengan persediaan air minum yang baik kualitasnya dan makanan yang dimilikinya dapat melayani pedagang-pedagang Melayu dan Jawa dan sekaligus tempat beristirahat dalam jalur perlayaran dari barat ke timur. Di sini mereka menukarkan pakaian yang mereka bawa dari Malaka dan Jawa dengan rempah-rempah. Sedangkan Bima memasok kayu celup (dye-wood) untuk pedagang Malaka yang kemudian di ekspor ke Cina.

Boleh jadi karena pentingnya Bima, nama Bima lebih sering digunakan oleh orang Portugis dan Belanda untuk menyebut keseluruhan pulau Sumbawa. Padahal di Sumbawa terdapat kerajaan lain yakni Dompu, Sanggar, Tambora, Pekat dan Sumbawa. Ditinjau dari perkembangannya, kerajaan Bima tentu saja harus diletakkan di dalam kerangka hubungannya dengan kerajaan-kerajaan lain di Sumbawa dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara, khususnya Gowa di Sulawesi Selatan. Di samping itu menarik juga untuk menggambarkan interaksi kerajaan Bima dengan orang Eropa yang dalam perkembangannya kemudian masuknya wilayah Bima ke dalam wilayah kekuasaan pemerintah kolonial Hindia Belanda.

1.2 Permasalahan

Corak dan struktur serta proses-proses perkembangan kerajaan Bima dalam kurun waktu kira-kira abad ke-16 sampai awal abad ke-20 merupakan pokok persoalan dan sekaligus pembahasan yang ingin digarap dalam penulisan ini.

1.3 Tujuan

Penulisan ini berusaha memaparkan perkembangan sejarah kerajaan Bima untuk mengisi bagian yang belum terungkap di dalam sejarah nasional Indonesia.

1.4 Sumber

Konsekwensi yang tak dapat dihindari jika kita menulis sejarah daerah (lokal) maka sumber yang dapat mengungkapkan peristiwa dan struktur masyarakat biasanya merupakan masalah tersendiri. Kalaupun sumber lokal cukup memadai maka bahasa merupakan persoalan lain yang seharusnya dipecahkan. Itulah sebabnya sebagian besar sumber yang digunakan dalam penulisan ini diambil dari orang asing, pelancong atau pegawai seperti VOC atau Hindia Belanda. Selain menggunakan sumber sekunder penulisan ini juga menggunakan sumber primer berupa catatan perjalanan dan arsip.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 Geografi

Bima adalah Kabupaten Daerah Tingkat II di Propinsi Nusa Tenggara Barat dan kerajaan yang terpenting di pulau Sumbawa maupun di kawasan pulau-pulau Sunda Kecil pada kurun waktu abad ke 17--19. Dengan terbentuknya Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat melalui UU No. 64/1958, maka sebagian besar wilayah kerajaan Bima yang pada waktu itu masih berstatus sebagai Swapraja menjadi wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bima dengan ibukotanya di Raba-Bima.[1] Batas wilayahnya di sebelah utara Laut Flores, sebelah selatan Samudra Hindia, sebelah timur Selat Sape, sedangkan batas sebelah barat adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Dompu. Secara fisiografi terletak pada 117° 40' -- 19° 10' Bujur Timur dan 70° 30' - 70° 91' Lintang Selatan. Daerah Tingkat II ini terbagi menjadi 10 kecamatan yaitu kecamatan Monta, Bolo, Woha, Belo, Wawo, Sape, RasanaE, Donggo dan Sanggar, meliputi 12 kelurahan dan 131 desa atau 436 dusun (lingkungan). Luas wilayahnya 459.690 km persegi atau sama dengan dua puluh persen dari luas wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat. Sebagian besar terdiri dari dataran tinggi dan hanya 138.924 km persegi berupa dataran rendah.

Kerajaan Bima merupakan salah satu diantara 6 kerajaan yang pernah ada di pulau Sumbawa yaitu Dompo, Sanggar, Tambora, Papekat, Sumbawa dan Bima. Sejak kapan dan bila mana kerajaan Bima didirikan dan oleh siapa belum ada sumber yang pasti. Dalam kitab Nagara Kertagama yang ditulis Mpu Prapanca tahun 1365 M, disebutkan bahwa Taliwang, Dompo, Sape, Sanghyang Api, Bhima, Seram atau Seran, Hutan Kadali termasuk dalam wilayah kekuasaan kerajaan Majapahit.[2] Meskipun ahli-ahli arkeologi[3] dan sejarah berpendapat bahwa nama-nama tersebut berlokasi di pulau Sumbawa ataukah sebagai tempat singgah (pelabuhan) para pelaut yang kemudian ditaklukkan oleh kerajaan Majapahit. Namun yang jelas bahwa Dompo (sekarang : Dompu), Geram (sekarang : seran) dan Hutam Kedali (sekarang : Utan) lokasinya agak jauh pantai sehingga tidak mungkin disinggahi Para pelaut.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh para peneliti asing diperoleh informasi bahwa pada abad ke-19 wilayah kerajaan Bima meliputi bagian timur pulau Sumbawa, Flores Barat (Manggarai) dan pulau-pulau kecil di Selat Alas dan sekitarnya.[4] Menurut catatan Van Dijk pulau-pulau kecil itu berjumlah sekitar 66 buah yaitu Gunung Api, Gili Bantah, Burung, Gili Bodo, Gili Lawa, Kamodo, Batu-batu, Tertambonan, Sanggala, Sesat, Binawan, Sibaba, Manggianat, Saieyur, Tambaga, Panggaran, Suku, Pancikan, Kukusan, Renca, Sankawan, Menjaga, Menkatal, Kenawa, Sepungu, Bajo, Kusan-kusan, Batuwas, Nangkar-nangkar, Sabalo, Seriadu, Rangko, Bolih, Langus, Seriya, Pada, Dara, Sapu, Kamanyan, Maringkat Patua, Riyung, Tobah, Cinde, Laju, Seringkat, Komodo, Padar, Mandewa, Sakando, Salat Mulu, Seriiya, Kuci, Gajah, Motdu, Mulis, Besar, Lobang, Kamara, Matasetan, Kalapa, Sindu, Biru, Sora dan Laju. Wilayah kerajaan Bima di bagian timur pulau Sumbawa, di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur dengan selat Sape, sebelah selatan dengan lautan Hindia dan di sebelah barat berbatasan dengan kerajaan Dompo. Menurut van Hollander batas antara Bima dan Dompo digambarkan dengan sebuah garis pada 118° 37' di pantai utara ke arah selatan melalui Gunung Wawo-Sahe ke arah 188° 39' 30" di pantai selatan.[5] Sedangkan menurut catatan kerajaan Bima, batas itu dimulai dari Doro Dewa pada 118° 31' di pantai utara terus ke selatan melalui

puncak gunung Doro Mandompo menuju kekampung Pajo (perkampungan orang-orang Bima) lalu ke arah selatan menuju ke Wadu Nteli Mayaga, Wadu Lepi, kemudian dari sini membelok ke barat menuju ke Wadu Udu dekat kampung Dompu bernama Daha, selanjutnya ke arah tenggara menuju ke Wadu Suga dan akhirnya ke arah selatan ke muara sungai Sori Soma di pantai laut selatan (Samudra hindia) pada 118° 34'.[7] Batas sebelah timur pulau Flores ditetapkan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1864 mulai dari sungai Pota di utara (termasuk wilayah Pota) kemudian ditarik garis lurus ke arah tenggara menuju sungai Nagaramo di pantai selatan (termasuk wiliyah Ramo) karena tahun itu Bima melepaskan haknya atas Galeteng Ende dan pulau Sumba.[8]

Adapun luas kerajaan Bima sebagaimana tercantum dalam penjelasan kontrak antara *Gubernur Celebes en Onderhoorigheden* dengan sultan Bima pada tahun 1886 seluruhnya adalah 156 mil persegi dengan rincian di pulau Sumbawa ditambah dengan pulau-pulau kecil disekitarnya (kecuali Flores) adalah 71,5 mil persegi, dan di pulau Flores seluas 84,5 mil persegi.[9] Wilayah kerajaan Bima di pulau Sumbawa dibagi ke dalam tiga distrik : Belo, Bolo dan Sape, masing-masing diperintah oleh seorang Galarang kepala yang membawahi Galarang rendahan dan kepala-kepala kampung. Distrik Belo yang terletak di sebelah timur Teluk Bima, terdiri atas 18 kampung yaitu : Belo, Tonggo, Dowa, Tonggo-risa, Tolo-Biu, Raba-koddo, Cenggu, Rooi, Bre, Ngali, Tente, Samili, Sikuru, Nata, Tangga, Tenga, Daddi-rou dan Simpa-sai.

Distrik Bolo yang terletak di sebelah barat Teluk Bima terdiri atas 18 kampung yaitu: Bajo, Monggo, NCandi, Dena., Tonda, Bolo, Sumbi, Tangga, Sila, Nggembe, Leu, Sondo, Sonco, Kara, Timu, Daru, Pali, dan Donggo-Bolo.Distrik Sape yang terletak di bagian paling pulau Sumbawa terdiri atas 12 kampung yaitu : Sape-Weki, Sumi, Bedi, Jia, Kale'o Nae (Nae besar), Simpasai, Permanggina (Parangina) Rohe, Sari, Sari-Do, Dae dan Kleo-toi (Nae kecil).

Di samping 3 distrik besar tersebut di atas masih ada 42 kampung yang masing-masing dikepalai oleh seorang kepala kampung yang bergelar Galarang atau Lebe yang langsung di bawah sultan. Ke-42

kampung itu adalah : Wao, Pasa, Ntori, Lamba, Buncu Mado, Buncu Mada, Sapaga, Lela, Raba Dodu, Raba Kodo, Raba Dompu, Pena Na'e, Pena Toi, Pena Kalate, Raba Tola, Tolo Tando, Mande, Ntobo, Rontu, Poki, Tato, Santi, Sadia, Bedi, Desa, Karara, Manggonao, Mangge Maci, Gindi, Kedo, Panda, Dara, Bajo, Nanga Lare, Sondo, Sarita, Punti, Sai, Soa, Kalo, Wera dan Raba Londe, ditambah 3 kampung besar lainnya, masing-masing terdiri atas 300 rumah yaitu : kampung Parada, Karumbu dan Donggo Alee. Selain itu masih ada 6 kampung yang didiami oleh orang-orang Donggo atau Dou Donggo yang merupakan daerah terpisah yaitu kampung Tuntu, Kananta, O'o, Kala, Mangge dan Bawa.[10]

Ibukota kerajaan Bima tempat kediaman sultan dan para pembesar kerajaan lainnya terdiri dari 26 kampung, masing-masing diperintah oleh Dou ma Tua atau orang tua-tua. Ke-26 kampung itu terdiri atas 699 buah rumah, penduduknya sekitar 7.000 jiwa, dengan rincian sebagai berikut :[11]

Asi atau keraton	terdiri atas	10	buah rumah
Kareta	terdiri atas	30	buah rumah
Ruga Tompo	terdiri atas	30	buah rumah
Masigit	terdiri atas	60	buah rumah
Suntu	terdiri atas	30	buah rumah
Dede	terdiri atas	25	buah rumah
Nteli	terdiri atas	10	buah rumah
Nae	terdiri atas	120	buah rumah
Pangga Wawi	terdiri atas	10	buah rumah
Salama	terdiri atas	20	buah rumah
Lewi-Sape	terdiri atas	20	buah rumah
Gili Panda	terdiri atas	60	buah rumah
Saleko	terdiri atas	30	buah rumah
Srai	terdiri atas	7	buah rumah
Tonda Jeneli	terdiri atas	7	buah rumah
Kampung Matro	terdiri atas	10	buah rumah
Asam	terdiri atas	8	buah rumah
Timba Dompo	terdiri atas	40	buah rumah
Asi Mpasa	terdiri atas	12	buah rumah
Sambawa	terdiri atas	60	buah rumah

Katuru	terdiri atas	30	buah rumah
Bo-u	terdiri atas	8	buah rumah
Kalampa	terdiri atas	7	buah rumah
Bara	terdiri atas	30	buah rumah
Belubu	terdiri atas	10	buah rumah
Kopa	terdiri atas	15	buah rumah

Wilayah kerajaan Bima di Flores Barat atau Manggarai terdiri dari daerah Reo dan Pota masing-masing diperintah oleh seorang pejabat bergelar Naib yang bertindak sabagai wakil raja atau sultan.[12] Daerah Reo terbagi atas distrik-distrik Reo, Toda, Renda Kole, Kula, Weas dan Bari, sedangkan daerah Pota terbagi atas distrik-distrik Babi, Riung, Biti, Cicir, Ramu dan Congkar. Distrik Reo tidak mempunyai bawahan, terdiri dari kampung-kampung yang merupakan tempat pemukiman orang-orang Bima, Makasar, Bugis, Selayar dan Bone yang dikepalai oleh Galarang. Distrik Todi terdiri atas 13 daerah bawahan yang dikepalai oleh seorang kepala rendahan yang disebut Dalu, yaitu: Cibal, Leda, Bajo Dengakas, Wela, Rote, Lalat, Wonto, Kampo, Pucu Leo, Mata Wae, Reu, dan Loko. Daerah kekuasaan para Dalu ini kemudian dibagi lagi menjadi beberapa kampung. Cibal terdiri atas 27 kampung yaitu : Pohu, Cempar, Latu, Tiku, Rutuh, Wacu, Manu, Teras, Ajang, Nuntu, Jambu, Aku, Pucu, Wancang, Wudi, Ora, Gola, Tamu, Puku, Gandira, Dara, Langgas, Riu, Arak, Landor, Langko dan Leos. Leda terdiri atas 15 kampung, yaitu: Lic, Sarak, Rangkum, Raca, Bangkulu, Cubu, Malu, Dara, Mani, Nendi, Boju, Mandi, Agancar, Ruwa dan Raci. Bajo terdiri atas 12 kampung yaitu: Munti, Manti, Rampe, Guli, Kaca, Kuas, Gulus, Tadu, Dangku, Mundu dan Gili. Wola terdiri atas 5 kampung yaitu : Tura, Pukap, Tangge, Rutu dan Putung, Dengakas terdiri atas 15 kampung yaitu: Gura, Iku, Tabal, Gedo, Mera, Racab, Padang, Libung, Wanku Paci, Lampa, Cumi, Lubak, Borbia dan Puku. Rote terdiri dari 22 kampung yaitu: Guru, Pantu, Lusa, Kadu, Macu, Sita, Arup, Lagat, Tiri, Wasu, Palu, Mandu, Cimbu, Mara, Panti, Sukala, Naru, Liur, Maru, Duri dan Lepu.Lalap terdiri dari 14 kampung yaitu: Wungi, Tinda, Disi, Ridu, Panggang, Tundu, Nati, Meras, Gelang, Ritu, Gorak, Ganaung, Muncu dan Tuntung. Wonto terdiri dari 21 kampung yaitu:Diru, Dusu, Pirang, Riwung, Giri, Tara, Joong, Mangka, Kilu, Damar, Tura, Gili, Ura,

Rago, Namu, Meras, Nunu, Welu, Laba dan Gulu. Kampo terdiri dari 21 kampung yaitu: Maluwa, Kadu, Amaluwa, Biru, Runggi, Muntang, Luha, Lara, Rangga, Watu, Linggliu, Amabasi, Jinding, Kabung, Manca, Kuli, Nimbang, Bisu, Darisa, Watu dan Danggu. Pucu Leo terdiri dari 21 kampung yaitu: Nani, Rangkas, Tadu, Dura, Gimpu, Galung, Polak, Langku, Tadu, Pitu, Wasu, Caku, Lidu, Dirus, Muri, Rabak, Munco, Tiri, Munggis, Tunggi dan Meras. Matawae terdiri atas 23 kampung yaitu: Kalu, Turi, Juli, Nari, Kuluwadu, Ambarai, Sanu, Wangkanisi, Labundu, Sambi, Amangkudu, Sita, Landu, Kutu, Kuda, Masa, Lacu, Wudu, Gempu, Nanga, Watumanu, Rangkatoi dan Rangkakuta. Riu terdiri atas 19 kampung yaitu: Wali, Tinda, Jawa, Langgu, Riu, Kutang, Widu, Ura, Runu, Giri, Bili, Cukap, Dungga, Ramu, Rancang, Kili, Dengi, Gudu dan Lanjar. Sedangkan Loko sebagai daerah kuasa Dalu yang terakhir di Distrik Pota terdiri dari 14 kampung yaitu Racung, Kacang, Cucung, Tuwang, Makatke, Temba, Mingi, Laeliet, Pulang, Lamba, Tambung, Lidang, Luku dan Waru. Distrik-distrik Renda, Kole, Kula, Bari dan Weas, empat distrik pertama dikepalai oleh Galarang, sedangkan Weas oleh Dalu. Setiap distrik terbagi lagi menjadi sejumlah kampung. Distrik Renda meliputi 18 kampung yaitu: Rengkat, Wilak, jampang, Mundu, Ruwat, Tunggal, Golok, Gulung, Kuwu, Dasu, Welak, Bulid, Pupu, Perak, Bila, Lia dan Luku, sedangkan wilayah Distrik Kole terdiri dari kampung-kampung : Kiu, Tiri, Aca, Ratu, Puntu, Nterang, Kilu, Lingku, Kalu, Gilor, Manga, Turang, Nampin, Nawu, Puru, Riu, Wuta dan Wontal; semuanya berjumlah 18 kampung.

Wilayah Distrik Kula terdiri dari kampung-Kampung: Papa, Kipe, Pawu, Riula, Kalu, Cangki, Landu, Arak, Kantur, Guru, Helas, Nigi, Pici, Gaja, Rici dan Gilat; semuanya ada 16. Distrik Bari terdiri dari kampung-kampung : Raba, Nura, Randa, Rigu, Ilar, Rego, Rawa, Gulir, Paca, Arak, Dangka, Mari, Tula, Watudiri, Kalu, Bungku, Suwi dan Tuwa; semuanya 18 kampung. Distrik Weas terdiri dari 11 kampung yaitu : Pasat, Luci, Wairinde, Baja, Tuei, Kala, Lancu, Kawa, Mundu, Lali dan Waikulee.

Distrik-distrik di bawah kekuasaan Pota terdiri dari Babi, Riung, Biti, Cicir, Ramu dan Conakar. Distrik Babi terdiri dari kampung-kampung: Mulada, Ruwa, Lalap, Dira, Kaca, Mulut, Pumo,

Towa Golo, Nio, Sula, Tuta, Tuwa, Mundi, Nyangki, Puka, Taki, Tuwak, Mulut, Guli, Rawa, Jadu, Malak, Weka, Rambang, Tiu, Lua dan Wolu: semuanya ada 27 kampung. Distrik Riung terdiri dari kampung-kampung : Watu, Papa, Kirum, Buwu, Kaka, Wui, Raja, Lisu, Ria, Lulung, Liti, Kolu, Tiwul, Payul, Mungka, Namu, Waru, Siang, Taju, Wandu, Liti, Sila, Ngusu, Isa, Pawu, Munggi dan Panggi; semuanya 27 kampung. Distrik Biti terdiri dari kampung-kampung : Kiwa, Tiras, Lungga, Lenggi, Kia, Mundi, Munti, Rabu, Matu, Patan, Pisun, Pinggang, Kapu, sedang, Sawi, Tiung, Papu, Balangkus, Nipos, Waru, Misa, Biar, Urang, Tarung, Galinu, Dangku, Pusu dan Wira; semuanya berjumlah 28 kampung. Distrik Cicir terdiri dari kampung-kampung : Lusu, Kadu, Diru, Bubu, Wan, Wangka, wakun, Tawa, Gurap, Lisu, Talu, Taucu, Memur, Lida, Landu, Kaju, Dolu, Kiwa, Icung, Kenas, Lindang, Ni'u, Waru, Gili, Wasang, Warus, Deris, Kima, Bilik, Lisu, Keni, Pi'i, Waru, Misa, Dilik dan Tamu; semuanonva 34 kampung. Distrik Ramu terdiri dari kampung-kampung ; Arak,Kei, Hesu, Pompu, Gama, Wangku, Mambawar, Pusu, Lida, Labu, wika, Wira, Langabla, Tiu, Inca, Wira, Kanum, Munti, Langki, Burak, Mundi, Licu, Dangkai, Rambok, Buku, Rungga, Likir, Waru, Wolu, Kadu, Watie, Suwomga, Mulu, Maluduk, Andang, Sasu, Tirung, Kodung dan Watusala; semuanya 39 kampung. Distrik Congkar terdiri dari kampung-kampung : Pisi, Cenap, Mami, Diruk, Paris, Tunggal, Gilak, Lawi, Wangkar, Taram, Rasei, Wanang, Giling, Tota, Wuga, Rambuk, Kangu, Kuit, Jalit, Wotu, Milim, Meran, Tiwu, Liu Nawal, Tudi, Sapi, Pait, Gunung dan Setawangang; semuanya 30 kampung.[13]

Dengan demikian wilayah Bima di Flores terdiri dari dua daerah yang dibagi ke dalam 13 distrik, dimana distrik-distrik yang lebih luas dibagi lagi menjadi 13 onderdistrik sehingga seluruhnya berjumlah 481 kampung. Menurut Braam Morris, sumber data pembagian wilayah kerajaan Bima di Flores ini didasarkan pada naskah Melayu yang disimpan oleh pembesar kerajaan Bima yaitu tulisan lontar bilang atau catatan harian Raja-raja Bima masa lalu.[14]

Seperti telah disinggung di atas masih ada lagi sejumlah pulau besar atau kecil yang termasuk wilayah kekuasaan kerajaan Bima, yang menurut keletakannya oleh Braam Morris dikelompokkan sebagai berikut :[15]

1) Di Teluk Bima : pulau Sedu;

2) Di pintu masuk sebelah utara Selat Sape : pulau Gunung Api atau pulau Sangiang;

3) Di Selat Sape: pulau-pulau Gili Banta, Besar, Lobang, Kamara, Mata Setan, Kelapa (dua pulau), Sanedo, Biru, Sora, Laju (dua pulau), Komodo dan Gili Lawa (disebelah utara Komodo);

4) Diantara Komodo dan Flores: pulau-pulau Batu-batu (dua pulau) Tertambonan, Sanggala, Sambeta (dua pulau), Mananawang, Siaba (dua pulau), Magita, Sibaijar, Tambaga, Panggaran (dua pula), Suku (tiga pulau), Pacikan (dua pulau), Kokosan (dua pulau), Renca atau Rinja, Balang, Gawan, Manjaga (dua pulau) Manggatal, Kanawa, Sapugun, Bajo (empat pulau), Sasan (dua pulau), Batusan, Tanggaran, Sabalo dan Sariadu (dua pulau);

5) Di sebelah utara Flores: pulau-pulau Burung, Gili Bodo, Bangko (tiga pulau), Bole (dua pulau), Longos (tiga pulau), Sri, Pada, Dara, Sape, Kamasan, Maringkat (dua, pulau), Patola Riung (dua pulau), Toba dan Candi;

6) Di sebelah selatan Flores: pulau-pulau laju (dua pulau) Ringkat (dua pulau), Komodo (tiga pulau), Padar, Srie, Gaja, Motan, Mulis, Sakando dan Salat-Mulu atau Pulau Barat.

Di dalam Lampiran I kontrak terakhir Kerajaan Bima dengan Gubernemen Hindia Belanda pada tahun 1938 disebutkan bahwa wilayah Kerajaan Bima (*Lindchap Bima*) di sebelah utara dibatasi Laut Jawa, sebelah barat oleh Landschap Dompu, sebelah selatan oleh Lautan Hindia dan sebelah timur oleh Landschap Manggarai. Sebagai batas antara Landschap Bima dengan Landshap Manggarai adalah bagian barat Selat Sape pada garis vadem 100, yang diukur oleh kapal-kapal pengukur pada tahun-tahun 1904--1908.[16] Sejak terpisah dengan Bima pada tahun 1929, daerah Manggarai dengan pulau-pulau sekitarnya (termasuk pulau Komodo) menjadi daerah *Neo-Landschap* dan sekarang menjadi salah satu kabupaten di Propinsi Nusa Tenggara Timur.[17] Sebaliknya daerah kerajaan Sanggar suatu kerajaan kecil yang terletak di pantai barat semenanjung daerah Gunung Tambora sejak tahun 1928 digabung dengan Kesultanan Bima dan sekarang

menjadi salah satu kecamatan dari Daerah Tingkat II Kabupaten Bima yang beribukota di Kore. Berhubung dengan pengasingan Sultan Dompu dan keluarganya ke Kupang oleh Pemerintah Hindia Belanda maka sejak tahun 1934. Swapraja Dompu langsung dimasukkan ke dalam Swapraja Bima dan swapraja ini baru dihidupkan kembali pada tahun 1947 setelah terbentuknya Negara Indonesia Timur (NIT) meskipun Sultan Dompu pada waktu itu." M.T. Sirajuddin belum pernah dinobatkan dan tidak pernah menandatangani suatu "kontrak-politik" dan beliau bergelar sebagai "*waarnemend Zelfbestuur* saja.[18]

Di Bima tidak dijumpai sungai-sungai besar, sehingga hanya dapat dilayari oleh perahu-perahu kecil pada muaranya. Sungai-sungai itu antara lain adalah Nanga Bontomaranu, Palie, Daru, Lasonco, Sondo, Pandai, Donggo-bolo, Caba, Belo, Pendolo, Romo dan Melayu. Sungai-sungai itu tidak berhulu pada gunung yang tinggi, mengalir dan menumpahkan airnya ke Teluk Bima. Sungai-sungai Nanga Kanda, Tololai dan Nanga-Raba bermata air di gunung, dari arah timur mengalir ke teluk sepanjang pantai utara dan bermuara di laut Jawa. Sedangkan sungai Nanga Soro yang mengalir dari Gunung Sape menumpahkan airnya di Selat Sape. Pada saat musim angin timur sungai-sungai di Bima hampir-hampir tidak berair, sedangkan pada musim angin barat bahaya yang sering mengancam adalah banjir dari gunung.

Di Flores ada beberapa sungai yang penting antara lain sungai Barrie, Reo dan Pota yang bermuara di pantai utara dan bermata air di pengunungan di Flores Barat. Sungai-sungai ini hanya beberapa mil dapat dilayari ke pedalaman meskipun tidak dengan perahu berukuran besar. Di pantai selatan bermuara sungai Nanga Lilin, Nanga Ramo dan Nanga Borong yang seluruhnya bermata air di pengunungan tengah bagian barat. Namun berbeda dengan sungai-sungai yang bermuara di pantai utara, sungai-sungai ini dapat dilayari sampai ke pedalaman dengan perahu-perahu berukuran kecil maupun besar.

Ada beberapa teluk penting di Bima antara lain Teluk Bima yang oleh Hindia Belanda dipandang sebagai teluk yang paling bersih dan

pada sepanjang musim sangat aman untuk berlabuh bagi perahu-perahu dalam pelayarannya. Hal itu disebabkan letaknya yang menjorok masuk ke dalam dan terlindung oleh pegunungan yang tinggi di sebelah timur dan baratnya. Banyak para pedagang yang datang ke Bima, selain kapal-kapal dagang. Bima beberapa kali didatangi kapal perang untuk mengambil batu bara dalam rangka pengamanan wilayah sekitarnya. Demikian pula halnya dengan kapal-kapal nelayan dan penangkap ikan jalan masuk ke Teluk Bima dengan mudah dapat ditemukan oleh Para pelayar (pelaut). Biasanya mereka mengambil arah dari sebelah barat gunung Soromandi, pada sebuah bukit tumpul di tepi pantai. Bagian yang paling sempit dari pintu masuk ke teluk Bima lebarnya sekitar seperdelapan mil dengan kedalaman sekitar 14-26 vademen (1 vademen=1.88 m) dilindungi oleh benteng di kanan-kirinya. Di depan ibukota Bima, kapal-kapal membuang sauh pada kedalaman air laut sekitar 15 sampai 20 vademen, pada jarak yang sangat dekat dengan daratan. Selanjutnya di pantai timur terdapat sejumlah teluk seperti teluk Kandang, Cirie, Kowo atau Rees dan Sape, semuanya terletak di Selat Sape. Teluk Sape dengan mudah dapat dimasuki kapal-kapal sehingga Sape menjadi pelabuhan penting di tempat itu baik bagi para pedagang pribumi maupun orang-orang Eropa.

Teluk-teluk yang terpenting di Flores terletak di pantai timur laut, yaitu Labu Bajak, Labu Terrang dan Labu Barie, semuanya terbuka (mudah dimasuki) perahu atau kapal, meskipun seringkali sulit karena adanya karang di depannya. Di pantai selatan terdapat teluk Alligator, teluk Nangalilin dan Nanga-ramo semuanya mudah dimasuki perahu-perahu berukuran besar .

Bima adalah bagian dari pulau Sumbawa yang penuh dengan gunung atau pegunungan dan hanya di sepanjang pantai Teluk Bima ditemukan tanah aluvial. Pegunungan itu memiliki ciri-ciri vulkanis; hal yang sama ditemukan juga di Flores, dimana seluruh wilayahnya tidak ditemukan dataran rendah bahkan sampai ke pantai. Adapun gunung-gunung yang terpenting di Bima adalah: Aru Bassa (5340 kaki), Soromadi (4421 kaki), Monggo Lewi (3800 kaki), Ara atau Maria (5000 kaki) Cewo (1660 kaki), Wabo (12000 kaki), Tonggu (2800 kaki),Sambori (4000 kaki), Massa (3800 kaki), Lambu (4500

kaki), Jara Dundu (2500 kaki), Doro Pajo (2326 kaki), Donggo Buwa (300 kaki) dan Gunung Api (7125 kaki). Di Flores gunung yang terpenting adalah Sossa, Toda dan Puto-Leo dengan ketinggian lebih dari 5000 kaki. Tiga diantara gunung-gunung yang terdapat di wilayah kerajaan Bima itu masih bekerja secara vulkanis yaitu : Sossa dan Puto-leondi Flores dan Gunung Api di pulau Sangeang (Bima).

Adapun pergantian musim di Bima tidak seperti di Jawa, musim hujan yang lebat dan musim kering yang berkepanjangan. Cuaca di Bima lebih mirip dengan di Sulawesi. Pada siang hari udara begitu panas sedangkan pada malam hari amat dingin. Dalam bulan Nopember sampai April bertiup angin musim barat yang banyak mendatangkan hujan, sedangkan pada bulan-bulan Juni sampai September bertiup angin musim timur atau tenggara yang oleh orang-orang Bima dikenal sebagai angin bolo atau angin selatan.[19] Menurut catatan G.Kuperus curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember, sedangkan terendah pada bulan-bulan Juli dan Agustus.[20]

Mata pencaharian sebagian terbesar orang-orang Bima adalah di bidang pertanian. Padi, jagung, kacang hijau, bawang dan kemiri merupakan tanaman yang dihasilkan orang Bima. Kecuali beras dan jagung produksi lainnya diekspor keluar daerah. Aspek pertanian orang Bima didukung oleh peternakan yang mempunyai makna penting. Kuda Bima adalah salah satu jenis kuda yang baik di Indonesia. Meskipun tubuhnya kecil, kuda Bima dapat memikul beban yang berat dan kuat. Pada akhir abad ke-19 misalnya, ekspor kuda setiap tahunnya mancapai 1000 sampai 1500 ekor. Daya dukung ekonomi Bima selain yang disebutkan di atas berasal dari hasil hutan. Bima dan Flores kaya dengan hasil hutan. Seluruh dataran tinggi dan gunung ditutupi oleh tanaman yang lebat, terutama pohon asam dan jati. Selain itu masih ada kayu-sapan, pohon jarak dan bingkuru, demikian juga kenari merupakan pohon yang banyak dijumpai di sana. Begitu kayanya akan hasil kayu sapan, mendorong Speelman mengadakan kontrak dengan Sultan Bima pada tahun 1669 dan kemudian pada tahun 1765 di mana dinyatakan bahwa hanya VOC saja yang boleh membeli komoditi tersebut.

2.2 Penduduk

Menurut Zollinger, orang. Bima berasal dari Suku Melayu, sama dengan keturunan orang Sunda; namun berbeda dengan orang Sunda, warna kulit orang Bima agak gelap (hitam), bagian bawah muka agak menonjol, postur tubuh agak kecil, leher agak besar, dada lebar dan ukuran badan bagian atas sedikit lebih panjang dibandingkan dengan bagian bawahnya.[21] Zollinger menambahkan bahwa hal itu merupakan karakteristik atau ciri khas dari penduduk yang mendiami pulau-pulau di bagian timur. la tidak begitu yakin akan adanya persamaan antara suku Makassar dengan orang-orang Bima sebagaimana sering dikemukakan oleh penulis lainnya. Alasan yang dikemukakannya ialah: *pertama*, rumah orang Makassar didirikan diatas tiang-tiang yang tinggi (rumah kolong), sedangkan rumah orang Bima tiangnya hanya beberapa kaki dari permukaan tanah; *kedua*, Bima memiliki tulisan (huruf) tersendiri dan mempunyai lembaga pemerintahan yang berbeda dengan Makassar. Yang *ketiga*, menurut Braam Morris, bahwa karakter orang-orang Bima jauh berbeda dengan orang Makassar, nafsu untuk berkuasa orang-orang Makasar tidak pernah terlihat pada orang-orang Bima, sebaliknya orang-orang Bima menonjol dengan sifat-sifat kesabaran dan kepatuhan.[22]

Selain orang-orang Bima masih ada orang-orang pendatang seperti orang-orang Bugis, Makassar, Melayu, Jawa, Sasak dan Manggarai. Mereka pada umumnya bermukim di daerah pantai antara lain di pelabuhan Bima dan Sape. Orang-orang Eropa atau Indo-Eropa yang berdiam di Bima pada umumnya adalah serdadu, sedangkan orang-orang Cina, Arab dianggap sebagai pendatang baru.[23] Di ibukota Bima yang terdiri atas 25 wijk atau kampung yang berjumlah 700 rumah, selain dihuni oleh orang-orang Bima terdapat juga suku pendatang. Mereka menempati kluster-kluster tertentu yang cendrung bersifat homogen seperti kampung Bugis dan kampung Melayu, bahkan menurut Zollinger ada kampung Walanda.[24] Kampung Walanda dihuni sekitar 14 keluarga Indo-Eropa, berlokasi di tepi pantai dengan jalan-jalan yang lebar dan teratur dengan sejumlah rumah kayu yang besar-besar. Di sebelah utaranya terdapat kampung Bugis, dan tidak jauh di sebelah timur lautnya terdapat kampung Melayu. Di sebelah barat

kampung Walanda terdapat benteng Belanda yang dikelilingi tembok tanah dan parit, di dalamnya terdapat rumah tinggal Penguasa Belanda (*gezaghebber*). Benteng ini dipersenjatai 8 pucak meriam, dua di antaranya dalam kondisi baik milik gubernemen sedangkan sisanya milik sultan dalam keadaan rusak. Menurut catatan para pelancong, pada tahun 1880 Coft menyebutkan bahwa benteng ini dihuni oleh seorang sersan, seorang kopral, dan 15 orang serdadu pribumi. Lima belas tahun kemudian (1895) Asselbergs menyebutkan penghuni benteng itu 2 orang Jerman dan 1000 orang serdadu pribumi.[25]

Di perkampungan orang-orang Bima yang berlokasi di bagian tenggara ibukota terdapat istana sultan Bima berdekatan dengan masjid. Masjid dibangun dari bata beratap tumpang; rumah-rumah para kepala kondisinya tidak jauh berbeda dengan penduduk biasa, hanya ukurannya lebih besar. Demikian juga dengan rumah tinggal para bangsawan, para pangeran dan pejabat kerajaan dibuat dari kayu, beratap sirab. Tempat tinggal Sultan (istana) dibuat dari kayu berukuran besar, berdinding papan dan atapnya bertingkat, terlihat lebih baik dan konstruksinya lebih kuat dibandingkan dengan rumah-rumah orang Bima pada umumnya.[26] Sebaliknya rumah tinggal orang Makassar atau Bugis kondisinya tidak jauh berbeda dengan rumah orang Bima, dibangun diatas tiang-tiang sekitar 2 atau 3 kaki di atas permukaan tanah, beratap alang-alang atau sirap dari bambu.

Di samping dua kelompok penduduk di atas masih ada penduduk asli yaitu orang-orang Donggo (Dou Donggo) dan orang-orang Kolo (Dou Kolo). Orang Donggo mendiami daerah pegunungan Pajo di sebelah barat Teluk Bima, sedangkan orang Kolo menempati wilayah pegunungan di sebelah timur Teluk Bima.[27] Karena mereka mendiami daerah pegunungan Zollinger menyebut orang-orang Donggo ini sebagai orang gunung seperti halnya orang-orang Tengger di Jawa.[28] Di Manggarai, wilayah kerajaan Bima di Flores selain penduduk asli terdapat juga orang-orang pendatang seperti orang Bugis, Makassar dan Bima yang mendiami daerah pantai. Rumah tinggal penduduk asli amat sederhana dan pada umumnya berada di tengah-tengah kebun (*tuinhuis*).

Belum ada data yang pasti berkenaan dengan jumlah penduduk kerajaan Bima pada kurun waktu tertentu, terutama untuk periode sebelum abad ke-19. Data yang disajikan oleh para musafir dan para penulis asing berkenaan dengan jumlah penduduk Bima setelah kurun waktu meletusnya Gunung Tambora (1815) pada umumnya didasarkan atas perkiraan saja. Yang pasti bahwa letusan Gunung Tambora pada tahun 1815, selain menelan banyak korban, penduduk banyak yang mengungsi ke tempat lain yang lebih aman. Lekkerkerker [29] memperkirakan jumlah penduduk Bima sebelum meletusnya Gunung Tambora 80.000 jiwa dan setelah meletusnya berkurang menjadi 36.000 jiwa. Menurut perkiraan Zollinger,[30] pada awal tahun 1815 (sebelum meletusnya gunung Tambora) penduduk pulau Sumbawa diperkirakan berjumlah 170.200 jiwa dengan rincian sebagai berikut: Bima 90.000 jiwa, Sumbawa 60.000 jiwa. Dompo 10.000 jiwa, Tambora 6.000 jiwa, Sanggar 2.200 jiwa dan Papekat 2.000 jiwa. Jumlah penduduk tersebut berkurang hampir setengahnya (84.200 jiwa) akibat letusan gunung Tambora dengan rincian sebagai berikut: 10.000 mati seketika, 37.825 mati karena sakit dan kelaparan dan 36.275 mengungsi ke pulau-pulau sekitarnya. Berkenaan dengan jumlah penduduk Bima, Zollinger menyebutkan bahwa jumlah penduduk berkurang sebanyak 30.000 jiwa, 15.000 di antaranya mati sakit dan kelaparan dan 15.000 lagi mengungsi ke pulau-pulau di sekitarnya, sehingga jumlah menjadi 60.00 jiwa. Ternyata perkiraan atau jumlah tersebut tidak jauh terpaut dengan jumlah yang tercamtum dalam Syair Kerajaan Bima, yakni 60.000 jiwa pada tahun 1819.[31] Namun dalam bagian lain Zollinger juga menyebutkan jumlah penduduk Bima 45.000 jiwa pada tahun 1847 Jumlah tersebut menurut Braam Morris[32] dianggap terlalu rendah dari jumlah yang sesungguhnya, sebab logikanya jumlah penduduk tentunya makin bertambah bukan sebaliknya. Ia kemudian mencoba menghitung jumlah penduduk Bima berdasarkan jumlah rumah dan perkirakan jumlah jiwa pada setiap rumah. Untuk rumah-rumah yang berada di ibukota Bima diperkirakan setiap rumah dihuni oleh 15 jiwa, untuk rumah-rumah yang berlokasi ditiga distrik utama (Belo, Bola dan Sape) diperkirakan setiap rumah dihuni oleh 10 jiwa, sedangkan untuk rumah-rumah diperkampungan rang-orang Donggo (penduduk asli)

diperkirakan dihuni oleh 8 jiwa. Untuk wilayah Flores (Manggarai), rumah-rumah orang pendatang di Reo dan Pota setiap rumah diperkirakan dihuni oleh 8 jiwa, sedangkan untuk rumah-rumah di kampung (479 kampung) setiap rumah diperkirakan dihuni oleh 6 jiwa. Ditambah dengan jumlah penduduk pulau Gunung Api (Sanghyang) 500 jiwa penduduk pulau-pulau kecilnya lainnya 1000 jiwa dan penduduk yang berdiam diwilayah yang diperintah langsung oleh gubernemen sebanyak 3000 jiwa. Dari perhitungan tersebut kemudian diperoleh angka atau jumlah 74.420 jiwa.[33] Jumlah tersebut menggambarkan keadaan pada tahun 1886. Jika perhitungan ini dapat dibenarkan maka selama 67 tahun (1819--1886) penduduk Bima bertambah 14.250 jiwa atau sekitar 213 jiwa setiap tahunya. Menurut sensus tahun 1920 jumlah penduduk Bima (Bima dan dompu) tercatat 152.000 jiwa dan 10 tahun kemudian (1930) jumlahnya bertambah menjadi 200.000 jiwa.[34]

Suatu ciri yang paling menonjol dalam masyarakat Bima masa lalu ialah pengelompokannya yang tegas dan beraneka ragam. *Pertama* adalah pengelompokan secara vertikal dari atas ke bawah; penduduk, dikelompokan menjadi tiga kelas, yaitu kelas bangsawan (*de-adel*) kelas menengah (*middel-stand*) dan Pandelingen.[35] Yang termasuk kelas pertama ialah sultan, pangeran dan keluarga sultan serta sejumlah besar pembesar-pembesar tinggi kesultanan, yang dibagi dalam dua tingkat keningratan yakni Ruma dan Rato. Kelas yang *kedua* terdiri dari para kepala rendahan, para ulama dan penduduk kampung yang merdeka; mereka ini merupakan mayoritas rakyat. Yang *ketiga* adalah orang-orang yang tergadai (*pendelingen*), pada mulanya mereka adalah orang-orang yang pernah melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum yang dikenakan denda tapi meraka tidak sanggup membayar denda itu sehingga mereka harus bekerja sebagai budak. *Kedua* adalah pengelompokkan mendatar (horizontal) yaitu pengelompokan rakyat merdeka (kelas menengah) dalam sejumlah *Dari* yang merupakan jenis kelompok keahlian (*gilden*). Tiap dari ditentukan oleh jenis kewajiban masing-masing terhadap sultan, sehingga dengan adanya tugas serta kewajiban tersebut mereka berhak untuk menikmati hasil panen dari tanah adat (*ornamentsvelden*). Diluar tugas-tugas khusus "*dari-dari*" itu sebagai

warga masyarakat mereka juga mempunyai tugas kemasyarakatan yang lain yang bersifat umum yang disebut *rawirasa* dan *sara*. Kedua tugas kemasyarakatan itu disebut *rawi kaboju* yang pada prinsipnya adalah kegotong- royongan yang mendasari hidup kemasyarakatan suku Bima. Menurut Chambert-Loir,[36] sebetulnya kelompok tersebut mempunyai arti sosial yang lebih dalam karena bersifat *endogame*, di mana anggota satu *dari* tidak boleh kawin dengan anggota *dari* yang lain. Salah satu akibat langsung dari pegelompokan itu ialah memeliharakan keaslian suku bangsa karena orang-orang asing digolongkan dalam satu *dari* tertentu dan dengan demikian kemungkinan kawin campur dapat diperkecil. Zollingger[37] menyebut 12 *dari* sedangkan menurut, Braam Morris[38] jumlahnya ada 27 *dari* yaitu : Dari Batu, Dari Ngoce, Dari Jara Mbojo, Dari Jara Bolo, Dari Ngaji, Dari suba Nae, Dari Dambe Mone To'i, Dari Jara, Dari Luma Rasanae dan Luma Bolo, Dari Bangka Jawe, Lumba, Padolo dan Batasape, Dari Sampio, Silu Mbojo dan Silu Bolo, Dari Pakkoro, Dari Besi Mbojo dan Besi Bolo, Dari Maas Mbojo dan Maas Bolo, Dari Owa, Dari Bedi, Dari Mone Wera, Dari Luma Kae, Dari Sangeang, Dari Kolo, Dari Sa Bicara Kai, Dari Pabise Mbojo, Pabise Bolo dan Saturu Eli, Dari Tolotui Mbojo dan Tolotui Bolo, Dari Parisi (Prisi), Dari Rato Mbojo dan Rato Bolo, Dari Sumpa Sape dan Sumpa Mbojo, Dari Cindawa dan Dari Mardeka. Mereka semua berada di bawah pengawasan tertinggi Bumi Luma Rasa Nae dan Bumi Luma Bolo. Bumi Luma Rasa Nae mengepalai para *dari* yang berada di sebelah timur Teluk Bima, sedangkan Bumi Luma Bolo mengepalai para *dari* yang berada di sebelah barat Teluk Bima.[39]

Catatan

1) Kesultanan Bima berakhir dengan ditetapkannya UU. No.1 Th.1957 tentang penghapusan daerah-daerah Swapraja yang sekaligus diikuti dengan pembentukan Daerah Tingkat II di seluruh Indonesia.

2) Th.Pigeaud, *Java in The Fourteenthe Century Vol. I : Javanese Texts in Transcription*, Koninklijk Instituut voor Taal, Land Volkenkunde, The Hague Mastinus Nijhoff, 1960 : 17

3) Periksa : G. Kuperus, "De Madjapahitsche Onderhoorigheid Seran", *TNAG*, 59, 1942 : 771--774 ; C.C.F.M.Le Roux, "De Madjapahitsche Onderhoorighaden Hutan Kandali en Gurun en de Oude naam voor het eiland Flores", *TNAG*, 59, 1942 : 915-927.

4) Belum diketahui secara pasti kapan daerah Manggarai menjadi wilayah kekuasaan Bima, sumber lokal menyebut pada masa pemerintahan Manggampo Dongo sekitar abad ke-14 (Periksa: L.Massir Q. Abdullah, *Bo (Suatu Hmpunan Catatan Kuno Daerah Bima)*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Pongembangan Permuseuman Nusa Tenggara Barat, 1981/1982 : 23--24). Dalam sumber VOC (Daghregister) pada tahun 1661 Manggarai disebut sebagai wilayah kekuasaan Bima. (Periksa: W.Ph.Coolhaas, "Bijdrage tot de kennis van het Manggaraische Volk, (West-Flores)", *TNAG*, 59, 1942: 162.

5) L.J.von Dijk,"De Zelfbesturende landschappen in de Residentie Timor en Onderhoorighoden", *De Indische Gids*, 1925: 530.

6) J'.E.Jasper, "Het eiland Soembawa en zijn bevolking", *TBB*, 34, 1908: 75; D.F.van Braam Morris, "Nota van Toelichting Behoerende bij het Contract gesloten met het landschap Bima op den 20 sten October, aan de Regeering ingediend doorden Gouverneur van Celebes en Onderhloorigheden", *TBG* XXXV, 1890: 176--177.

7) D.F.van Braam Morris, *op. cit.*: 177.

8) Sri Wulan Rudjiati Mulyadi (editor), *Bandar Bima*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Ditjen Kebudayaan, Direktorat Jarahnitra, Bagian Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara, 1992/1993: 63.

9) *Loc.cit.* ; D. F. Van Braam Morris, *op. cit.*: 176--177.

10) *Ibid*, 178-184.

11) *Ibid*, 179.

12) W. Ph. Coolhaas, *op. cit.* : 170

13) *Ibid*, 168; 334--347; D.F.van Braam Morris, *op.cit.* : 180--182.

14) D.F. van Bram Morris, *op. cit.* : 183 ; Sri Wulan Rudjiati Mulyadi *op. cit.*: 69 (periksa Juga : J. W. Meerburg, "Proeve eener beschrijving van land en volk van Midden-Manggarai (West-Flores)" *TBG*, XXIV, 1891 : 456--458).

15) *Loc-cit.*

16) Sri Wulan Rudjiati Mulyadi, *op-cit.*: 70

17) *Loc.cit.* ; Coolhaas berpendapat bahwa hubungan Manggarai dengan Bima terputus sejak tahun 1928 (Periksa: W. Ph. Collhaas *op.cit.*: 168)

18) Periksa: *Republik Indonesia, Propinsi Sunda kecil*, Kementerian Penerangan (tt): 142.

19) D.F.van Braam Morris, *op. cit.*: 187.

20) G. Kuperus, "Beschrijvingen over de ontwekkeling en den huidigen vormenrijkjdom van het Cultuurlandschap en de Onderafdeeling Bima (Oost-Soembawa)", *TNAG* 55, 1938: 230.

21) Pendapat Zollinger ini kemudian dikutip oleh Braam Morris (Periksa : D.F. van Braam Morris, *op. cit.* : 195)

22) *Ibid*, 197.

23) *Ibid*, 196.

24) H.Zollinger, "Verslag van een reis naar Bima en Soembawa en naar eenige platsen op Celebes, Saleijer en Flores gedurende de maanden Mei tot December 1847", *VBG*, XXIII 1850: 98. Kampung Walanda sekarang lebih dikenal dengan nama Kampung Benteng Karena lokasinya berdekatan dengan bekas benteng Belanda. (Periksa: Henri Chambert-Loir, "State, City; Commerce: The Case of Bima", *Indonesia*, April No. 5, Cornell South east Asia Program, 1994 : 72).

25). Henri Chamber-Loir *op. cit.*: 76.

26). D.F.van Braam Morris, *op. cit.*: 207 Istana (bekas istana) sultan Bima yang sekarang disebut Asi Wadu yang artinya istana dari batu (bata). Di bangun pada tahun 1920 dan sejak tahun 1989 dialihfungsikan sebagai Museum Daerah yang menyimpan benda-benda bersejarah tingalan sultan Bima. Di sebelah timurnya masih berdiri bangunan istana dari kayu (asi Bou) yang dibangun oleh sultan Hamid pada tahun 1781.

27) H.Zollinger, "A Visit to The Mountainers, Do Donggo in The Country of Bima", *JIAEA*, Vol. II, No. XI, Nov., 1948 : 668 ; H. Zollinger, *op. cit.* : 127--130; D.F. van Braam Morris, *op. cit.* 198.

28) *Loc. cit*, Sekarang orang-orang Donggo ini mendiami daerah pegunungan Lambitu dan Soromandi.

29) C. Lekkerkerker, "*Enkele Nieuwe Gegevens Over Soembawa*", *TNAG*, 1933 : 76.

30) H. Zolliger, *op. cit.* : 151, 176.

31) Henri Chambert-Loir, *Naskah dan Dokumen Nusantara III, Syair Kerajaan Bima*, EFEO, Jakarta-Bandung, 1982 : 19.

32) D.F.van Braam Morris, *op. cit.*: 210.

33 *Ibid*, 210-212.

34) C.Lekkerkerker, *op. cit.*: 176.

35) Henri Chambert-Loir, *op. cit.* : 19--20; Helius Syamsuddin, *Perang Ngali dan Perang Sapugara di Pulau Sumbawa tahun 1908*. Makalah pada Seminar Sejarah Nasional ke III, Proyek IDSN, Direktorat Jarahnitra, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1981 : 3--4.

36) *Ibid*, 20

37) H.Zollinger, *op. cit.* : 132--133. Ke-12 Dari yang disebutkan oleh Zollinger itu adalah: Dari Ratto, Dari Jara Ngoco, Dari Jara Bolo, Dari Ngaji, Dari Suba, Dari Damber Morie, Dari Tadolo, Dari Deddeh, Dari Pakora, Dari Owa, Dari Sayanelie, dan Dari Dabiesie.

38) D.F.van Braam Morris, *op.cit.*: 200--205.

39) Helius Syamsuddin, *Op. Cit.* : 4.

BAB III

KEMUNCULAN KERAJAAN BIMA SAMPAI ABAD KE-17

3.1 Bima Sebelum Islam

Tidak banyak yang dapat diungkapkan mengenai situasi dan kondisi Bima sebelum Islam karena sumber-sumber yang berkenaan dengan periode tersebut masih langka. Kelangkaan sumber mungkin karena daerah Bima dan sekitarnya memang miskin dengan data sejarah dan arkeologi atau karena belum pernah dilakukan penelitian secara intensiv berkenaan dengan aspek kesejarahan maupun kepurbakalaannya. Orang-orang Belanda baru manaruh perhatian terhadap pulau Sumbawa pada abad ke-17, sebelumnya mereka tidak pernah menganggap penting baik dari segi politik maupun perdagangan. Chambert Loir menghubungkan kelangkaan sumber itu karena perhatian orang-orang Belanda terhadap pulau Sumbawa lebih bersifat politik daripada dagang tambahan pula usaha penelitian tidak dirangsang oleh aktivitas kebudayaan atau agama, sehingga pulau itu tidak menjadi sasaran penelitian yang mendalam.[1] Laporan mengenai adanya temuan benda-benda arkeologis dari masa sebelum perang, terkecuali jumlahnya sedikit nilai kesejarahan yang terkandung pada benda-benda yang bersangkutan masih banyak yang belum terungkapkan karena kendala-kendala yang bersifat tehnis-akademis.[2] Meskipun penelitian sudah mulai digalakkan sejak tahun 1976 oleh Pusat Penelitian-Arkeologi Nasional (Pusat Arkenas), penelitian itu

lebih banyak bersifat pengulangan atau melakukan inventarisasi dan dokumentasi temuan-temuan yang telah atau belum dilaporkan sebelumnya sehingga menurut hemat kami hasilnya belum menunjukkan kemajuan yang berarti.

Di Desa Mbawi, Kecamatan Donggo, Bima masih ada sejumlah peninggalan prasejarah berupa menhir, sedangkan di Rora terdapat beberapa buah lesung batu. Di Pulau Sangeang pernah ditemukan nekara perunggu yang sekarang menjadi koleksi Museum Nasional, Jakarta Menurut para ahli, nekara perunggu dari pulau Sangeang termasuk nekara perunggu yang paling bagus yang pernah ditemukan di Indonesia. Dari bukti-bukti itu dapat ditarik simpulan bahwa pada zaman prasejarah daerah Bima telah dihuni oleh manusia atau masyarakat yang sudah memiliki kebudayaan tinggi. Seperti halnya masyarakat prasejarah, selain berburu dan bercocok tanam mereka juga hidup dari menangkap ikan dan mencari kerang Laut. Asumsi ini dikaitkan dengan keberadaan sejumlah gua di tepi pantai di Kecamatan Wera. Berdasarkan data etnografi diduga masyarakat Bima sebelum Islam seperti halnya orang-orang Donggo yakni penduduk asli daerah Bima yang sekarang bermukim di pegunungan Lambitu dan Soromandi. Mereka memuja pada sejumlah benda yang dianggap mengandung kekuatan gaib, mahluk-mahluk supernatural (*henca*) dan roh-roh nenek moyang yang disebut *parafu-pamboro*. Menurut Zollinger[3], orang-orang Donggo tidak mengenal dewa dalam pengertian agama Hindu. Mereka menguburkan mayat di dalam lubang dengan posisi berdiri, disertai pakaian lengkap seperti cincin, gelang, kalung, bokor dan tutup kepala. Kubur ini kemudian ditutup dengan batu plat, seperti halnya pada makam Padende yang oleh masyarakat sekitarnya dianggap sebagai makam Gajah Mada. Seperti halnya orang-orang Donggo diduga masyarakat Bima pra-Islam terdiri dari berbagai kelompok yang dipimpin oleh kepala-kepala suku mereka yang disebut *Ncuhi*. Daerah Bima Tengah dipimpin oleh Ncuhi Dara, Bima Timur oleh Ncuhi Dorowani, Bima Utara oleh Ncuhi Banggapupa, Bima Selatan oleh Ncuhi Parewa dan daerah Bima Barat oleh Ncuhi Bolo.[4] Kelima Ncuhi ini hidup berdampingan secara damai, apabila ada persoalan yang menyangkut kepentingan bersama mereka berkumpul untuk musyawarah. Ahmad Amin menyebutkan

bahwa kira-kira tahun 1575 datang seorang dari Jawa dan kelima Ncuhi sepakat untuk mengangkat orang tersebut menjadi raja Bima dengan gelar *Sangaji*.[5] Menurut Bouman, para Ncuhi itu sebenarnya adalah tuan-tuan tanah yang berkuasa di wilayah masing-masing yang kemudiam dipersatukan oleh Maharaja Sang Bima menjadi satu kerajaan yang bercorak kehinduan.[6] Menurut legende nama Bima, baik sebagai nama kerajaan atau ibukota diambil dari nama Sang Bima yaitu seorang bangsawan Jawa yang berhasil mempersatukan kerajaam-kerajaan kecil di daerah itu menjadi satu kerajaan yakni kerajaan Bima. Di dalam legenda itu diceritakan pula bahwa Sang Bima mempunyai kekasih seekor naga dari pulau Sitonda. Naga itu hamil karena pandangan mata Sang Bima yang tajam dan dari padanya kemudian lahir seorang putri yang cantik bernama Tasi Saring Naga. Sang Bima lalu mengawini putrinya dan dari perkawinan itu lahirlah Indra Jamrut dan Indra Komala, yang kelak menjadi cikal bakal yang menurunkan raja-raja Bima dan Dompu.[7]

Keberadaan pengaruh Hindu, baik agama Hindu maupun agama Budha di daerah Bima dan sekitarnya tidak diragukan lagi, sebab hal itu didukung oleh data sejarah maupun bukti-bukti arkeologis. Permasalahannya adalah sejak kapan atau bilamana pengaruh Hindu itu muncul dan apakah kerajaan Bima yang dibangun oleh Sang Bima itu merupakan kerajaan yang berdaulat atau sebuah negara vazal (taklukkan) kerajaan-kerajaan Hindu-Jawa belum dapat dipastikan meskipun data sejarah dan bukti arkeologi yang ditemukan di Bima memberikan indikasi hubungan Bima dengan pulau Jawa. Dalam sumber Cina, Chu-fan chi yang ditulis oleh Chou-ju-kua pada tahun 1225 disebutkan bahwa di antara 15 daerah yang menjadi kekuasaan Cho-po disebutkan nama Ta-kang, yang diduga berlokasi di pulau Sumbawa, Flores atau Sumba. Jika Cho-po indentik dengan Jawa maka tentunya kerajaan berkuasa di Cho-po pada waktu itu adalah kerajaan Kadiri. Menurut van Naerssen.[8] Kadiri merupakan satu kerajaan maritim sebab di dalam salah satu prasastinya yang berangka tahun 1181 AD disebut nama *senapati* sarwwajala, seorang, pejabat (panglima) yang berhubungan dengan tugas-tugas kelautan. Jika tafsiran ini dapat diterima maka ada kemungkinan pulau Sumbawa (termasuk Bima) termasuk wilayah kekuasaan kerajaan Kadiri atau

setidak-tidaknya di bawah pengaruhnya. Dalam sejumlah naskah Jawa kuno seperti Nagarakertagama, Pararaton, Kidung Pamancangah, Roman Ranggalawe dan Serat Kanda disebutkan sejumlah nama tempat di pulau Sumbawa yang sekaligus menjadi bukti bahwa tempat-tempat tersebut sudah dikenal oleh kerajaan Majapahit atau termasuk wilayah kerajaan Majapahit. Dalam kitab Nagarakertagama yang ditulis Empu Prapanca pada tahun 1365, pupuh 14:3 dikutip sebagai berikut :[9]

sawetan ikanang tanah jawa muwah ya warnananen
ri bali makamukya tan badahulu mwan i lwagajah
gurun makamukya sukun / ri taliwang ri dompo sape
ri sanghyang api bhima ceram i hutan kadaly apupul

Dari kutipan di atas disebutkan sejumlah nama tempat di pulau Sumbawa yang termasuk wilayah kerajaan Majapahit, yakni Taliwang; Dompo, Sape, Sanghyang api, Seran dan Utan Kadali.[10] Tiga di antaranya yakni Sape (sek: Labuhan Sape), Sanghyang Api (sek: pulau Sanghyang) dan Bhima (sek: Bima) berlokasi di daerah Bima dan merupakan wilayah kerajaan Bima dimasa lampau.Dalam pupuh 72 kitab yang sama disebutkan serangan Majapahit atas Dompo pada tahun 1357 di bawah pimpinan Senapati Nala, dan peristiwa itu disebutkan juga di dalam kitab Pararaton. Berdasarkan uraian Nagarakertagama van Naerssen kemudian beranggapan bahwa peristiwa tersebut merupakan masa awal zaman Hindu di pulau Sumbawa.[11] Selain dari naskah-naskah Jawa kuno, keberadaan pengaruh budaya Hindu ditunjang pula oleh sejumlah data arkeologi, baik yang bernafaskan agama Hindu maupun Budha. Dalam catatan orang-orang asing, terutama orang Belanda disebutkan 4 lokasi sebagai tempat penemuan benda-benda arkeologi di Bima.[12] *Pertama* didesa Tato, sekitar 3 pal di sebelah timur laut kota Bima. Di sini pernah ditemukan arca Trimurti (Mahesamurti) dan arca Syiwamahakala. Arca-arca tersebut ditemukan di tengah sawah di kampung Salawah dan keberadaan di tempat itu diduga sengaja dibuang oleh sekelompok muslim fanatik yang dalam kronik Bima disebut *membuang berhala*, pada zaman Sultan Abdullah. *Kedua* adalah desa Sila sekitar 6 pal di sebelah baratdaya kota Bima ditemukan lingga yang dipergunakan sebagai nisan kubur di halaman masjid. Menurut van

Naerssen penggunaan lingga sebagai nisan kubur merupakan bukti perpaduan antara sisa-sisa pemujaan terhadap roh nenek moyang dengan pemujaan terhadap Syiwa-lingga.[13] Yang *ketiga* adalah Wadu Tunti yakni di kampung Padende; ditempat ini terdapat sebuah batu bersurat dengan tulisan Jawa kuno. Meskipun keberadaan batu bersurat ini telah dilaporkan pada tahun 1910, namun sampai sekarang inskripsinya belum dapat dibaca sehingga isinya belum diketahui. Menurut N.Y. Krom secara paleografis inskripsi itu diperkirakan berasal dari sekitar 1350 sampai 1400 AD.[14] Selain inskripsi pada batu yang sama terdapat pahatan (relief) menggambarkan empat orang tokoh bergaya wayang dan salah satu di antaranya (tokoh yang paling besar) diduga sebagai dewa Syiwa. Dengan bukti itu van Naerssen akhirnya sampai pada suatu simpulan bahwa sebelum berkembangnya agama Islam, antara tahun 1350 sampai 1600 di Bima telah berkembang agama Hindu khususnya aliran Syaiwa. Tempat yang *keempat* yang disebut-sebut sebagai lokasi temuan benda-benda purbakala adalah Batu Pahat (Watu Paa). Situs ini terletak di tepi pantai teluk Bima, sekitar satu jam pelayaran dengan motor tempel ke arah utara dari pelabuhan Bima. Secara administratif Batu Pahat termasuk wilayah desa Kananta, kecamatan Donggo, kabupaten Bima. yang menarik di tempat ini ialah adanya sejumlah peninggalan purbakala yang berlatar belakang agama Hindu (lingga, arca Ganesa dan Agastya) berdampingan dengan peninggalan yang bernafaskan agama Budha (stupa dan arca Budha).[15] Benda-benda tersebut dipahatkan pada ceruk batu karang dalam bentuk relief tinggi (hout relief) Adanya benda-benda purbakala yang memiliki latar belakang agama yang berlainan yang ditempatkan dalam satu kesatuan ruang mengundang pertanyaan apakah hal itu merupakan gambaran sinkritisme agama di masa lampau. Untuk menjawab pertanyaan itu diperlukan penelitian yang lebih mendalam, sebab ada pula kemungkinannya situs Batu Pahat itu dipergunakan sebagai tempat pemujaan oleh dua penganut agama (Hindu dan Budha) pada kurun waktu yang berbeda sehingga sinkritisme agama tidak pernah terjadi. Jika demikian halnya maka pertanyaannya adalah yang mana di antara kedua agama itu berkembang lebih awal di daerah Bima dan sekitarnya. Jika hal itu dikaitkan dengan keadaan dan situasi di Bali

dan Lombok, dua pulau lain yang terletak di sebelah barat pulau Sumbawa, diduga agama Budha berkembang lebih awal. Di Lombok diperkirakan agama Budha Mahayana telah berkembang pada masa Borobudur sekitar abad ke-8 atau 9. Dugaan itu didasarkan pada temuan empat buah arca Budha dari perunggu bergaya Borobudur pada tahun 1960 di Lombok Timur.[17] Demikian pula di Bali, agama Budha diperkirakan telah dianut sejak abad ke-8, didasarkan pada penemuan stupa-stupa tanah liat yang di dalamnya terdapat meterai-meterai yang bertuliskan mantera-mantera agama Budha. Isi mantera-mantera yang tertulis pada metera-metera itu sama dengan mantera-mantera yang dipahatkan pada candi Kalasan dari tahun 778 AD.[18] Apakah keadaan serupa berlaku juga di pulau Sumbawa, khususnya Bima menarik penelitian untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Selain relief-relief arca yang diuraikan di atas, di situs Batu Pahat terdapat inskripsi Jawa kuno yang dipahatkan pada salah satu ceruknya yang hingga sekarang belum dapat dibaca karena selain ada retakan pada batunya, juga ada coretan cat yang dapat mengganggu. Tetapi menurut Buchari secara paleografis inskripsi itu diperkirakan dari abad ke-6 - 7 AD.[19] Sayang sekali isi dari prasasti ini belum dapat diungkapkan padahal ada kemungkinan isinya dapat menjelaskan keberadaan relief-relief Budha dan stupa yang ditempatkan berdampingan dengan relief-relief Ganesa atau Agastya. Pertanggalan inskripsi tersebut mungkin satu-satunya petunjuk yang dapat dipakai sebagai pedoman untuk menentukan umur situs Batu Pahat. Petunjuk lain yang dapat dikemukakan adalah data toponim, yaitu nama kampung yang letaknya berdekatan paling dekat dengan situs Batu Pahat yaitu kampung Sowa. Menurut Soekmono,[20] nama Sowa mungkin dapat dihubungkan dengan nama tempat Suwal yang disebut dalam prasasti Blanjong Sanur dari tahun 913 AD yang dikeluarkan oleh raja Kesari Warmadewa. Jika tafsiran ini dapat dibenarkan maka ada kemungkinan raja Kesari Warmadewa telah meluaskan pengaruhnya (kekuasaan) sampai di Lombok dan Sumbawa sebab dalam prasasti Blanjong Sanur disebutkan bahwa Sri Kesari Warmadewa telah mengalahkan musuh-musuhnya di Gurun dan Suwal.[21] Jika demikian halnya maka pengaruh Hindu yang berkembang di daerah Bima dan sekitarnya tidak hanya dari Jawa seperti yang diperkirakan sebelumnya, tetapi juga dari Bali mengingat pulau Sumbawa berada dalam satu kawasan yang saling berdekatan.

Hubungan pulau Sumbawa (Sambawa) dengan pulau Bali disebutkan juga dalam sumber sastra, yaitu Kidung Pamancangah. Dalam kidung tersebut disebutkan bahwa Pasung Girih, raja Bedahulu mengirim ekspedisi ke Sambhawa yang pada waktu itu diperintah oleh Dedelanatha. Bahkan dibagian lain dari kidung ini menyebutkan bahwa cucu perempuan Mpu Kapakisan, seorang Brahmana dari Jawa kawin dengan seorang dari Sambhawa.[22] Sumber lain menyebutkan bahwa ketika raja Batu Renggong memerintah di Kerajaan Gelgel dengan ibukotanya di Samprangan (Gianyar) pulau Bali tidak lagi menjadi kekuasaan raja Jawa (Majapahit) tetapi merupakan kerajaan yang berdiri sendiri. Batu Renggong tidak hanya memerintah seluruh Bali, tetapi sampai di Sasak (Lombok), Sumbawa serta seluruh Balambang sampai Puger (Lumajang).[23] Apakah Sambhawa, (Sumbawa) identik dengan Pulau Sumbawa yang tentunya termasuk di dalamnya Bima, ataukah hanya Sumbawa bagian barat yang sekarang menjadi wilayah kebupaten Sumbawa masih menjadi persoalan. Namun dari uraian di atas dapat ditarik simpulan bahwa pengaruh budaya Hindu di pulau Sumbawa datang (dibawa) dari Jawa dan Bali, baik melalui jalur politik (dominasi politik) maupun dibawa oleh para brahmana (pendeta). Kalau van Naerssen memperkirakan masa awal berkembangnya budaya Hindu di daerah Bima dan sekitarnya sejak pertengahan abad ke-14 maka dengan di tentukannya pertanggalan relatif prasasti Batu Pahat, kurun waktu itu dapat ditarik sekitar 5 atau 6 abad ke belakang yaitu sekitar abad ke-8 atau abad ke-9 masehi, meskipun pada waktu itu di Bima belum ada suatu kerajaan. Masa ini berakhir atau dianggap berakhir dengan berkembangnya agama Islam yang menurut Noorduyn dibawa oleh orang-orang Makassar pada awal abad ke-17. Menurut sumber lokal yang kemudian dikutip oleh Braam Morris, selama keberadaan kerajaan atau kesultanan Bima telah memerintah 49 raja/sultan, 37 di antaranya pada kurun waktu sebelum Islam.[24] Sedangkan menurut Rouffaer yang dikutip oleh Moorduyn hanya ada 26 raja/ sultan, dan 14 di antaranya berkuasa pada kurun waktu sebelum Islam, dimulai dari Maharaja Sang Bima sampai dengan Rumata Manuru Sarehi.[25]

3.2 Masuk dan Berkembangnya Islam di Bima

Berbicara mengenai awal kedatangan Islam dan islamisasi di daerah Bima dan sekitarnya belum dapat ditentukan secara tepat. Selain datanya yang kurang lengkap, penelitian kearah itu belum banyak dilakukan. Tetapi yang lebih penting dari itu ialah masih adanya kekaburan dasar konseptual yang dipergunakan para penulis (peneliti) antara masuknya Islam, berkembangnya Islam dan berdirinya suatu kerajaan Islam atau munculnya Islam sebagai kekuatan politik.[26] Konsep-konsep semacam itu semestinya dibedakan meskipun dalam banyak hal sulit ditarik batas yang tegas. Para ahli hampir sepakat bahwa masuknya Islam atau datangnya Islam di Indonesia berawal dari kontak antara penduduk setempat dengan orang-orang Islam melalui perdagangan, kemudian ada di antara mereka yang bermukim (sementara atau menetap) atau sudah ada penduduk setempat yang memeluk agama Islam meskipun jumlahnya kecil. Peristiwa ini biasanya dikaitkan dengan keberadaan bekas-bekas Islam di suatu tempat antara lain nisan-nisan kubur. Berkembangnya Islam atau Islamisasi adalah penyebaran Islam di suatu tempat (wilayah) atau dari satu tempat ke tempat yang lain melalui da'wah baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan (terbuka) sehingga terbentuk masyarakat yang bercorak Islam. Keberadaannya biasanya dibangunnya masjid sebagai sarana untuk beribadah. Dalam kenyataannya antara masuk dan berkembangnya Islam seringkali sukar ditarik garis pemisah, sebab setelah agama Islam dianut oleh seseorang atau sekelonpok orang da'wah akan berlangsung meskipun secara sembunyi-sembunyi diantara sesama dan sahabat terdekat, di dalam satu keluarga seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW pada mulanya. Disamping itu Islam mengajarkan bahwa setiap muslim berkewajiban menyampaikan sesuatu yang diketahuimya tentang agamanya Sehingga setiap muslim pada dasarnya adalah penda'wah walaupun hanya sedikit. Itulah sebabnya di dalam da'wah Islam tidak membeda-bedakan tugas antara pedagang, muballig dan penguasa. Berdirinya suatu kerajaan yang bercorak Islam biasanya didahului dengan terbentuknya suatu masyarakat Islam yang kuat. Di Indonesia keberadaan negara atau kerajaan yang bercorak Islam ini ditandai

dengan masuk Islamnya seorang penguasa (raja, datu) dan kemudian diikuti dengan pemakaian nama atau gelar sultan atau yang senafas dengan itu, meskipun dalam kenyataannya tidak seluruhnya rakyatnya memeluk agama yang baru itu.

Di atas telah dijelaskan bahwa berdasarkan data sejarah dan bukti-bukti arkeologi masa Hindu di daerah Bima dan sekitarnya diperkirakan berlangsung sejak abad ke-7 atau 8 sampai dengan awal abad ke-17. Situasi itu kemudian berubah dengan datangnya agama Islam menurut Noorduyn[27] dibawa oleh orang-orang Makassar. Sejak itu pula pengaruh politik dan budaya Gowa menjadi dominan sehingga masuk akal jika banyak informasi sejarah tentang Islam di pulau Sumbawa di temukan dalam catatan tertulis orang-orang Makassar.

Kapan dan bagaimana agama Islam datang di Bima dan dari mana asal kedatangannya belum dapat dipastikan. Kronik Bima atau yang lazim disebut Bo kerajaan Bima mencatat bahwa pada masa pemerintahan raja Bima yang ke-36, Sariese terjadilah kontak pertama dengan orang-orang Eropah (mungkin yang dimaksud adalah orang Portugis), sedangkan raja Bima yang ke-37, Sawo adalah raja yang terakhir yang belum memeluk agama Islam. Zollinger berpendapat yang kemudian dikutip oleh Braam Morris bahwa agama Islam pertama kali datang di Bima antara tahun 1450--1540; sultan Bima yang pertama adalah Abdul Galir dan agama yang baru itu dibawa oleh muballig-muballig dari Makasar.[28] Helius Syamsuddin menghubungkan kedatangan agama Islam di Bima dan daerah sekitarnya dengan masa kejayaan Malaka sebagai pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam di Asia Tenggara antara tahun 1400 -- 1511.[29] Ia berasumsi bahwa setelah jatuhnya Malaka ketangan Portugis pada tahun 1511, saudagar-saudagar muslim yang juga bertindak sebagai muballig mencari daerah baru atau kembali ke Jawa atau Sumatera meneruskan kegiatannya. Di antara mereka itu ada yang singgah di Bima lalu menyebarkan agama Islam dalam perjalanannya dari Jawa ke Maluku atau sebaliknya. Tome Pires melaporkah bahwa rute pelayaran perdagangan dari Malaka ke Maluku atau sebaliknya melewati Jawa dan Bima; di Bima para pedagang menjual barang-barang dagangan yang dibawa dan dibeli dari Jawa, kemudian membeli pakaian (kain kasar) dengan harga murah untuk dijual (ditukar) dengan

rempah-rempah di Banda dan Maluku.[30] Adanya rute pelayaran perdagangan dari Malaka ke Maluku yang melewati pantai utara pulau Jawa menyebabkan hubungan perdagangan antara Malaka dengan beberapa kota di pantai utara Jawa terutama Gresik terjalin dengan baik, karena menurut Meilink Roelofsz, Gresik adalah pelabuhan yang mengontrol import rempah.-rempah dari Banda dan Maluku.[31] Setiap tahun tidak kurang 8 buah jung tiba di Maluku, sebagian di antaranya datang dari Malaka dan sebagian lagi dari Gresik. Oleh karena itu dalam aktivitas penyebaran Islam ke Maluku dan daerah-daerah yang disinggahi sepanjang rute perdagangan selain saudagar-saudagar muslim dari Malaka tentunya saudagar-saudagar muslim dari Jawa ikut berperan aktif. Menurut Pigeaud,[32] dalam kurun waktu abad ke-15 sampai 17 di Jawa terdapat tiga pusat penyebaran Islam : Jawa Barat pusatnya Cirebon dan Banten. Jawa Tengah pusatnya di Demak dan Jepara, sedangkan di Jawa Timur berpusat di Gresik dan Ampel (Surabaya). Dari Jawa Timur Islam disebarkan ke Maluku dan Nusa Tenggara, terutama ke pulau Lombok dan Sumbawa. Menurut tradisi setempat pada masa pemerintahan Marhum (1465--1485) di Ternate datang seorang dari Jawa yaitu Maulana Husain yang menunjukkan kemahirannya menulis huruf-huruf Arab yang ajaib dalam AlQur'an sehingga sangat menarik Marhum dan orang-orang Maluku. Kemudian ia diminta oleh mereka agar mengajarkan huruf-huruf yang indah itu tetapi sebaliknya Maulana Husain minta agar mereka juga mempelajari agama Islam. Sultan Zainal Abidin (1486--1500), raja Ternate yang pertama memeluk agama Islam dikatakan mendapatkan ajaran agama tersebut dari madrasah Giri (Gresik). Ketika berada di Jawa ia terkenal sebagai raja Bulawa (raja cengkeh) dan sekembalinya dari Jawa membawa mubalig bernama Tuhu-bahahul.[33] Dalam Babad Lombok disebutkan bahwa Islam dibawa ke Lombok oleh Sunan Prapen dan setelah berhasil mengislamkan pulau Lombok Sunan Prapen meneruskan perjalanannya ke timur untuk mengislamkan Sumbawa dan Bima.[34] Jika informasi dalam Babad Lombok itu dapat dibenarkan maka peristiwa itu seharusnya terjadi pada masa pemerintahan Sunan Dalem di Giri (1506--1546).[35] Berdasarkan pengamatannya terhadap sejumlah inskripsi pada makam-makam sultan Bima,

Rouffaer berpendapat bahwa di Bima pengaruh Melayu dan Arab sangat kuat, karena inskripsi-inskripsi tersebut ditulis dengan huruf Arab dan bahasanya Melayu, bukan dengan huruf dan bahasa Bima atau Bugis.[36] Menurut Rouffaer, Islam di Bima dibawa atau datang dari Melayu, Aceh dan Cirebon. Pembawa-pembawa Islam terutama orang-orang Melayu datang di Bima pada masa pemerintahan raja Manuru Sarehi sekitar tahun 1605.[37] Ditambahkan pula bahwa Kadhi Jalaludin, ulama yang pernah menjadi guru agama Islam sultan Bima I, Abdul Kahir yang dimakamkan di komplek makam Dantraha tidak lain adalah seorang Melayu. Dari penjelasan di atas dapat diambil simpulan bahwa dugaan Malaka atau Jawa sebagai tempat asal kedatangan Islam di Bima dan daerah sekitarnya pula tampaknya masuk akal. Asumsi ini dikaitkan dengan lokasi Bima pada rote lintas perdagangan antara Malaka dan Maluku dan kedudukan atau posisi Bima sebagai salah satu pusat perdagangan pada rote tersebut. Dalam aktivitas perdagangan saudagar-saudagar muslim baik dari Malaka, Sumatera maupun dari Jawa ikut ambil bagian dalam penyebaran Islam ditempat-tempat atau daerah yang disinggahi sepanjang rote pelayaran-perdagangan dari Malaka sampai ke Maluku.

Di sebelah barat dan timur pelabuhan Bima terdapat pemukiman orang-orang Melayu yang oleh orang Bima disebut *Kampung Melayu* sedangkan penghuninya dinamakan *dau Melayu*. Hingga sekarang kampung Melayu dikenal sebagai tempat (pusat) studi Islam di Bima terutama dalam mempelajari kitab Al Qur'an. Diduga orang-orang Melayu sejak beberapa abad yang silam telah mempunyai peran penting dalam penyiaran agama Islam di Bima ; orang-orang Melayu tidak hanya dikenal sebagai pedagang yang ulet, mereka juga dikenal sebagai perantara atau *middelman* dalam penyebaran Islam dan mengantarkan budaya Melayu ke daerah Bima dan sekitarnya.[38] Bahkan mereka dikenal sebagai perantara yang menjembatan kelompok-kelompok etnik di Bima dengan orang-orang Belanda. Bagi masyarakat Bima, orang-orang Melayu tidak sama dengan orang-orang Bugis atau saudagar-saudagar dari Gowa, mereka dianggap sebagai guru sultan-sultan Bima, bahkan sebagai guru seluruh orang Bima dalam agama Islam. Orang-orang Melayu dianggap amat berjasa dan menunjukkan dedikasi tinggi terhadap kerajaan Bima karena telah

ikut berjuang menumpas bajak laut sehingga banyak di antara mereka yang mati atau tenggelam di laut dalam. Oleh karena itu sultan dan rakyat Bima sangat menghormati orang Melayu dan menganggap mereka sebagai saudara. Sultan kemudian menghadiahkan sebidang tanah sebagai tempat mereka membangun perkampungan secara turun temurun dan sultan Bima telah berwasiat agar para penggantinya kelak tidak mengambil kembali tanah tersebut. Terkecuali itu sebagai pedagang, orang-orang Melayu dibebaskan dari pajak, sultan memberikan hak istimewa kepada para penghulu dan imam orang-orang Melayu untuk mengatur dan mengorganisir perkampungan mereka menurut hukum Islam.[39] Tambahan pula tidak diizinkan wanita Melayu menjadi pelayan di istana sultan. Dalam sumber lain disebutkan bahwa Islam dibawa ke Bima oleh Datuk Dibandang dan Datuk Ditiro, yang dalam kronik Gowa dan Tallo disebut sebagai pembawa agama Islam di kerajaan Goa dan Tallo.[40] Diduga kedua mereka itu adalah orang Melayu yang datang dari Sumatera: Datuk Dibandang khususnya adalah seorang bangsawan Minangkabau dari Pagaruyung.[41] Kedua muballig itu datang di Bima sebagai utusan sultan Gowa untuk menyebarkan Islam. Mereka kemudian menjadi guru agama Islam sultan Abdul Kahir, sultan Bima I. Pada tahun 1055 H (1645 M) kedua muballig itu dipanggil ke Makassar oleh sultan Goa dan tugas penyiaran agama islam selanjutnya diserahkan kepada anaknya, Encik Naradireja dan Encik Jayaindra. Menurut Rouffaer, Datuk Dibandang (Dato ri Bandang) datang ke Sulawesi Selatan sekitar tahun 1600, kemudian mengislamkan raja Gowa dan Tallo pada tahun1606, sedangkan Datuk Ditiro (Dato ri Tiro) diduga berasal dari Aceh dan keduanya datang di Bima melalui Sape (Labuan Sape) dan terus ke Sila untuk menyebarkan agama Islam.[42] Ditambahkan pula bahwa kedua muballig ini tidak pernah menetap di Bima, melainkan di Sila dan dari sana kemudian dipanggil pulang kembali ke Makassar oleh sultan Gowa. Bilamana Datuk Dibandang dan Datuk Ditiro datang di Bima kronik Bima menyebut dua versi; versi *pertama* menyebut tahun 1018 Hijrah atau 1609 M dan versi *kedua*, tahun 1050 Hijrah atau 1640 M.

Berdasarkan kajiannya terhadap kronik-kronik Gowa, Noorduyn berpendapat bahwa Islam dibawa ke Bima dan daerah sekitarnya

dengan kekuatan senjata oleh orang-orang Makasar, tidak lama setelah Gowa menjadi muslim dan berhasil mengislamkan sebagian terbesar daerah Sulawesi Selatan antara tahun 1605--1611.[44] Pendapat Noorduyn mendapat dukungan dari sumber-sumber lokal yaitu catatan harian kerajaan Bima. Dalam kronik Gowa disebutkan bahwa Bima, Dompo dan Sumbawa ditaklukkan oleh Karaeng Matoaya, raja Tallo yang juga perdana menteri kerajaan Gowa. Dalam kronik itu disebutkan juga bahwa Gowa empat kali mengirim ekspedisi militernya ke Bima, dua kali ke Sumbawa dan masing-masing satu kali ke Dompu, Kengkelu (Tambora) dan Papeka.[45] Ekspedisi pertama dikirim pada tahun 1618, kedua tahun 1619 dan ketiga pada tahun 1626 setelah Karaeng Matoaya dan raja Gowa berhasil menaklukkan Buton. Ekspedisi yang keempat dikirim pada tahun 1632 karena pada tanggal 13 Nopember 1632 di Bima terjadi pemberontakan dan pada tanggal 25 Nopember 1632 Karaeng Buraqne dikirim ke Bima untuk menumpas pemberontakan tersebut. Meskipun peristiwa tidak dicatat dalam buku harian kerajaan Bima, namun mendapat dukungan dari sumber-sumber VOC. Dalam sumber-sumber VOC disebutkan bahwa sebuah kapal Belanda (VOC) berlayar dari Batavia dan tiba di Bima pada tanggal 24 Januari 1633 untuk membeli beras dan komoditi lainnya. Kapal ini kembali pada tanggal 23 Mei 1633 dengan misi yang kurang berhasil karena di Bima ditemukan padi, rumah dan desa-desa terbakar; seluruh negeri diporakporandakan oleh pasukan Makassar yang terdiri dari 400 kapal dan beribu-ribu orang yang dikirim oleh raja Makassar untuk menempatkan kembali adik iparnya sebagai raja Bima karena telah dipaksa turun tahta oleh para pemberontak dan melarikan diri ke sebuah pulau dekat Gunung Api (sek: pulau Sangeang).[46] Menurut Chambert Loir, peristiwa tersebut tidak lain adalah perang suksesi di kerajaan Bima.[47]

Speelman, gubernur VOC di Makassar memaparkan aspek lain dari peristiwa tersebut, dan menekankan bahwa sebenarnya anti Makassarlah sebagai penyebab pemberontakan itu. Banyak orang Bima yang tidak setuju dengan raja atau sultan yang sedang memerintah setelah bersekutu (kawin) dengan wanita Makassar. Mereka melarikan diri dan berlindung di kerajaan Dompu kemudian mengangkat senjata dibantu oleh orang-orang Bima dalam

pembuangan. Speelman melaporkan bahwa peristiwa itu terjadi sekitar 35 tahun yang lalu (sekitar tahun 1634) sehingga menurut Noorduyn harus dihubungkan dengan peristiwa yang sama seperti yang disebutkan dalam kronik Gowa.[48] Berdasarkan informasi Speelman itu Noorduyn berpendapat bahwa peperangan yang terjadi antara tahun 1632--1633 di Bima bukan perang suksesi seperti yang di duga Chambert Loirt melainkan suatu pemberontakan yang bertujuan untuk menentang dan menggulingkan kekuasaan sultan Bima yang pro Makassar. Ia menambahkan bahwa sultan Bima yang dimaksud dalam sumber VOC itu tidak lain adalah Abdul Kahir yang dalam kronik Gowa disebutkan telah kawin dengan anak perempuan raja Gowa.[49]

Dalam waktu yang sama ada dua orang pendeta Jesuit, Manuel Azevedo dan Manuel Ferreire berada di Makassar kemudian datang ke Bima yang secara khusus melaporkan bagaimana agama Islam datang ke daerah itu. Mereka datang ke Makassar dari Melaka pada tanggal 4 Januari 1617, namun setelah melihat tidak ada prospek untuk menyebarkan agamanya di Makassar, mereka akhirnya memutuskan untuk pergi ke Bima meneruskan misinya. Kedua Pendeta itu datang pada bulan Maret 1618 dan setibanya di Bima mereka menjumpai dua orang utusan dari Jawa (Gairi atau Giri) dan seorang lagi dari Makassar sedang menghadap raja Bima. Mereka meminta kepada raja agar memeluk agama Islam dan menuruti kehendak mereka sebab jika ditolak akan diperangi. Dengan demikian pada waktu kedua pendeta Jesuit itu tiba di Bima raja Bima belum memeluk agama Islam, sedangkan ketiga utusan yang dijumpainya itu tidak lain adalah utusan yang meminta raja Bima untuk memeluk Islam secara suka rela, yang sekaligus menginformasikan kemungkinan dilaksanakan tindakan militer. Tampaknya upaya diplomatik seperti yang dilaporkan oleh Ferreire tidak berhasil, terbukti kemudian Makassar mengirim ekspedisi militernya, karena mungkin raja Bima menolak memeluk agama Islam. Berkenaan dengan adanya berbagai laporan mengenai islamisasi di Bima baik dari orang-orang Portugis, sumber-sumber VOC maupun kronik-kronik Gowa, Noorduyn kemudian sampai pada satu simpulan bahwa Islamisasi di Bima dan sekitarnya berlangsung sebelum pengiriman ekspedisi Makasar yang ke IV, yakni antara

tahun 1626--1632/33, meskipun sudah dimulai sejak tahun 1618.[50] Berita Portugis yang menyebutkan serangan orang-orang Makasar yang membawa agama Islam ke Bima berlangsung tidak lama setelah kedatangan Ferreira pada bulan Maret 1618 dan sebelum keberangkatan Azevedo meninggalkan Makasar pada pertengahan tahun 1638, membuat jelas bahwa peristiwa itu adalah ekspedisi militer I yang dikirim ke Bima pada bulan April 1618, tidak lama setelah Ferreira meninggalkan Bima: sedangkan berdirinya kerajaan yang bercorak Islam (kasultanan) akan berlangsung beberapa tahun kemudian. Sehubungan dengan peristiwa itu kronik Bima menyebutkan bahwa Abdul Kahir (sultan I) memeluk agama Islam pada tanggal 15 Rabi'ul Awal 1030 Hijrah bertepatan dengan 7 Februari 1621, tidak lama setelah raja Gowa mengirim ekspedisi militernya yang kedua tahun 1619.[51] Namun perlu diketahui bahwa versi lain dari kronik Bima menyebutkan bahwa sultan I (raja pertama yang memeluk Islam) tidak sama dengan tokoh atau raja Bima yang menolak memeluk Islam, melainkan keponakannya. Pamannya yang dikenal sebagai Mantau Asi Peka atau Raja Salisi berselisih dengan keponakannya Ma Bata Wadu yang pada waktu itu telah memeluk agama Islam. Dengan bantuan pasukan Makassar Raja Salisi atau Mantau Asi Peka dikerajaan dan di tangkap, dan setelah itu kedudukannya digantikan oleh keponakannya, Mantau Bata Wadu sebagai sultan Bima, yang mungkin sekali berlangsung sekitar tahun 1640, seperti yang disebutkan dalam kronik Bima. Menurut Noorduyn terjadinya diskontinuitas di dalam kelas penguasa disebabkan tingginya perbedaan isu-isu keagamaan karena raja tua berkeras kepala menolak untuk memeluk agama baru itu (agama Islam).[52] Setelah raja Bima memeluk Islam gelar *Sangaji* diganti dengan gelar sultan, sedangkan para Ncuhi diubah gelarnya menjadi *Gelarang*. Hak-hak raja dan para Ncuhi tetap seperti semula.

Sultan Abdul Kahir memerintah sejak tahun 1630--1640, sedangkan menurut Braam Morris sejak tahun 1640 tanpa menyebutkan tahun berakhirnya.[53] Abdul Kahir (Abdul Kahar) dikenal sebagai peletak dasar agama Islam dan menjadikan kerajaan Bima sebagai kerajaan yang bercorak Islam. Di dalam sejarah Daerah Bima maupun dalam lontara Gowa dikenal dan sering disejajarkan dengan

Sultan Alaudin dan Sultan Malikul Said dari kerajaan Gowa dan Tallo, baik dalam penyebaran Islam maupun dalam perebutan pengaruh dengan Belanda yang ingin menguasai perdagangan di Indonesia bagian timur pada waktu itu. Setelah wafat digantikan oleh anaknya yang kemudian bergelar Sultan Abdul Khair Sirajudin, yang memerintah 1640--1682.

Menurut catatan Bo kerajaan Bima ketika istri Sultan Abdul Kahir, Rumata Ma Bata Wadu melahirkan putranya yang pertama ia mendatangi Bicara/Bumi Renda La Mbila Manuru Suatu untuk meminta nama bagi putranya itu. Oleh Rumata Manuru Suatu anak yang baru dilahirkan itu diberi nama La Mbila dan setelah menjadi sultan, La Mbila mendapat tambahan nama Abdul Khair Sirajudin sehingga nama lengkapnya adalah La Mbila Abdul Khair Sirajudin. Di dalam lontara Gowa sultan ini dikenal dengan sebutan Sultan I Ambela Abdul Khair Sirajudin. Ketika La Mbila menanjak dewasa, ayahnya sultan Abdul Kahir meninggal dunia sehingga terpaksa memangku jabatan sultan dalam usia yang masih muda. Dalam Lontara Gowa dikatakan bahwa ia kawin di Makasar pada tahun 1646 dengan putri raja Gowa, Sultan Malikul Said bernama Karaeng Bonto Jene, setelah beberapa tahun menjadi sultan. Dari perkawinan itu lahir sultan Nurudin (sultan Bima III) pada tahun 1651 dan tiga anak wanita lainnya. Selama pemerintahan Sultan Abdul Khair Sirajudin tercatat beberapa peristiwa penting di kerajaan Bima antara lain :

1. Penyesuaian hukum adat dengan hukum Islam sehingga pemerintahan kerajaan benar-benar berjalan sebagaimana lazimnya kerajaan Islam;
2. Penyesuaian bentuk Majelis Kerajaan dengan memasukkan unsur unsur agama Islam; kalau sebelumnya Majelis Kerajaan terdiri dari Majelis Sara dan Majelis Hadat, maka setelah penyesuaian terdiri dari Unsur Sara, Unsur Sara Tua dan Unsur Hukum;
3. Memperluas penyiaran agama Islam dengan mewajibkan pelaksanaan Syariat Islam dan memberikan kedudukan yang tinggi bagi para muballig, oleh karena itu dalam kronik Bima , Sultan Abdul Khair Sirajudin disebut *Palita Agama* (lampu agama):[54]

4. Memerintahkan penyempurnaan Kitab Catatan Kerajaan dengan membuat (menulis) Bo, yang ditulis diatas kertas dengan huruf Arab dan berbahasa Melayu;[55]

5- Menetapkan hari-hari besar kerajaan yang diperingati setiap tahunnya. Oleh Majelis Kerajaan hari-hari besar disebut *Rawi Sara Ma Tolu Kali Sa Mbaa*, yakni :

   a. Peringatan Maulud Nabi Muhammad SAW tanggal 12 Rabiul Awal yang sengaja dirayakan atau diperingati 2 hari kemudian (tanggal 15 Rabiul Awal) karena disatukan dengan peringatan kemenangan Islam di kerajaan Bima dan dinyatakan secara resmi sebagai kerajaan Islam pada tanggal 15 Rabiul Awal tahun 1030 Hijrah. Upacara ini lebih dikenal dengan nama Upacara Sirih-puan atau Ua-pua.[56]

   b. Hari Raya Idul Fitri;

   c. Hari Raya Idul Adha.

Sebagai sekutu kerajaan Gowa, Sultan Abdul Khair Sirajudin selalu bahu membahu dengan iparnya I Mallombasi Daeng Mattawang alias Sultan Hasanuddin dari Gowa menentang Belanda. Pada tahun 1666 Sultan Gowa Hasanuddin menyerang Buton karena memberikan bantuan dan perlindungan kepada Arung Palaka yang memihak Belanda Sultan Gowa mengirim pasukan/armada yang terdiri dari 20 kapal dipimpin oleh Karaeng Bontomarannu bersama-sama dengan Datu Luwu bernama Setiaraja Sultan Alimuddin dan Sultan Bima. Pada tanggal 1 Januari 1667 Speelman mengirim pasukan/armadanya untuk membantu Buton sehingga terjadilah pertempuran sengit dengan kekalahan dipihak pasukan Gowa. Karaeng Bontomarannu bersama-sama dengan Datu Luwu dan Sultan Bima menemui Speelman untuk mengadakan perundingan yang berakhir dengan penyerahan pada tanggal 4 Januari 1667.

Dalam penyerangan Belanda terhadap benteng Somba Opu dan Panakukang, Sultan Abdul Khair Sirajuddin sempat bertempur bersama-sama dengan laskar Gowa mempertahankan : benteng tersebut. Bo kerajaan Bima menyatakan bahwa jatuhnya benteng Panakukang terjadi Pada tahun 1070 Hijrah, sedangkan sejarah Gowa

mencatat tanggal 12 Juni 1660. Jatuhnya benteng Panakukang ini mengakibatkan lahirnya perjanjian 19 Agustus 1660 dan perjanjian 21 Desember 1660 yang ditandatangani oleh pihak Belanda dan Gowa. Dalam perjanjian tersebut antara lain dicantumkan syarat-syarat untuk memisahkan persekutuan Gowa dengan Bima. Meskipun perjanjian itu telah ditandatangi, Gowa dan Bima tetap bersekutu. Hal itu bukan saja karena Sultan Hasanuddin dan Sultan Abdul Khair Sirajudin mempunyai prinsip yang sama tapi persekutuan itu dipererat dengan ikatan kekeluargaan melalui perkawinan. Noorduyn beranggapan bahwa perkawinan yang terjadi antara sultan-sultan Bima dengan putri sultan atau bangsawan Gowa adalah perkawinan politik karena melalui perkawinan itu Bima dimasukkan dalam dinasti Gowa dan mengikat Bima menjadi bagian dari kerajaan Gowa.[57]

Sultan Abdul Khair memerintah daerah yang cukup luas seperti Floresbarat (Manggarai) dan pulau-pulau kecil di antara Flores dan Sumbawa. Karena wilayah ini amat strategis bagi pelayaran perdagangan maka dalam perjanjian Bongaya yang ditandatangi pada hari Jum'at tanggal 18 November 1667, tiga pasalnya di antaranya menyangkut kerajaan Bima, sultan Bima dan bangsawan-bangsawan Bima. Walaupun perjanjian itu telah terpaksa ditandatangani oleh Sultan Hasanuddin dan raja-raja lainnya, Karaeng Bontomarannu, sultan Bima, Raja Tallo Sultan Harun Al Rasyid dan Karaeng Lengkoso tetap belum mau menandatanganinya. Namun atas desakan Speelman, raja Tallo dam Karaeng Lengkese terpaksa menandatangani Perjanjian Bongaya pada tanggal 31 Maret 1668, sedangkan kerajaan Bima baru menyerah kepada Belanda pada tanggal 8 Desember 1669 dengan ditandatanganinya suatu perjanjian di Jakarta oleh Jeneli Monta-Abdul Wahid dan Jeneli Parado-La Ibu, atas nama sultan Bima. Meskipun secara resmi kerajaan Bima dinyatakan telah menyerah namun praktek pemerintahan kerajaan sepenuhnya berjalan menurut kebijaksanaan Sultan Abdul Khair. Kekuasaan Belanda hanya terlibat dalam perdagangan yang dikendalikan oleh seorang Kuasa Usaha yang dikenal sebagai Khojah Ibrahim.

Sultan Abdul Khair wafat pada tanggal 17 Rajab 1693, bertepatan dengan 22 Juli 1682 dan dimakamkan di Komplek Makam Tolo Bali. Setelah wafatnya, beliau bergelar Rumata Mantau Uma Jati yang,

berarti raja yang memiliki rumah jati. Ia kemudian digantikan oleh Sultan Nurudin Abubakar Ali Syah sebagai sultan yang ketiga, memerintah dari 1682--1687. Catatan Lontara dan Bo kerajaan Bima menyatakan bahwa Sultan Nurudin adalah anak sulung Sultan Abdul Khair dengan Karaeng Bonto Jene yang dilahirkan pada 13 Dasember 1651 dan wafat pada 23 Juli 1687. Sebagai putra mahkota ia mendapat nama Mapparabung Daeng-Mattallik Karaeng-Panaragang, ia sendiri kawin dengan putri bangsawan Gowa bernama Daeng Tamemang. Menurut sumber VOC sebelum menjadi sultan, beliau pernah tinggal di Jawa, bahkan pada tahun 1676 ikut bergabung dengan pasukan Makassar di bawah Karaeng Galesong membantu Trunojoyo melawan Susuhunan Mataram dan VOC. Sejak bulan Januari 1680 sampai - Maret 1681 dia tinggal di Cirebon dan pada 9 Maret 1682 berangkat dari Batavia kembali ke Bima disertai 230 pengikutnya.[58]

Peristiwa-peristiwa penting yang perlu dicatat selama pemerintahan Sultan Nurudin adalah pengiriman pejabat-pejabat kerajaan Bima ke daerah Manggarai yang bertindak sebagai Na'ib sultan di wilayah itu yang sekaligus berkewajiban menyiarkan Islam . Jabatan-jabatan keagamanan kerajaan Bima mulai disempurnakan yakni dengan diadakannya jabatan Qadhi, Lebe, Khatib dan lain sebagainya, bahkan di istana sultan diangkat petugas dibidang keagamaan yang berkedudukan sebagai mufti istana. Pada masa Pemerintahan Sultan Nurudin berdatangan para mubatlig dari Sumatera, Banten, Sulawesi, bahkan dari Malaka dan tanah Arab, sebagian di antaranya perlakuan sebagai pajabat kerajaan. Sebagai contoh adalah seorang Arab dari Banten, Syeh Umar Al Bantami yang menjadi Mufti di istana kerajaan, bahkan dialah yang diberi tugas mendidik putera-putera sultan.

Sultan Nurudin wafat pada tahun 1687 dan dimakamkan di Komplek Makam Tolo Bali berdampingan dengan makam ayahandanya. Setelah wafatnya beliau diberi sebutan (gelar) Rumata Ma Waa Paju; diberikannya nama tersebut karena beliaulah yang menetapkan agar para pejabat kerajaan memakai payung kebesaran terutama pada upacara-upacara adat kerajaan. Sultan Nurudin kemudian digantikan oleh anak sulungnya yang kemudian bergelar Sultan Jamaludin Ali Syah yang memerintah sejak tahun 1687--1692.

sebagai sultan yang keempat. Sultan Jamaludin kawin dengan Fatima Karaeng Tanata, putri bangsawan Gowa, Karaeng Besei pada tahun 1688. Dari perkawinannya ini lahir 4 orang anak laki-laki dan salah seorang di antaranya kelak menggantikannya sebagai sultan Bima yang kelima dengan gelar Sultan Hasanuddin Muhammad Syah. Sejak kecil Sultan Jamaluddin mendapat didikan Syeh Umar Al Bantami, dari padanya ia mendapat cerita tentang kepahlawanan raja-raja Banten, Malaka dan kepahlawanan Islam. Cerita-cerita itu dapat berkesan dihatinya dan ketika menjadi sultan cerita dan ajaran Syeh Umar Al Bantami itu mempengaruhi sikapnya terhadap Belanda, sehingga kurang mendapat simpati pemerintah VOC. Ketika terjadi pembunuhan permaisuri sultan Dompu (bibi Sultan Jamaludin) secara kebetulan Sultan Jamaludin tengah berkunjung kepada bibinya. Kesempatan itu kemudian dipergunakan oleh Belanda (VOC) untuk menyingkirkannya. Atas pengaduan sultan Dompu, gubernur VOC di Makassar kemudian memanggil Sultan Jamaludin ke Makassar lalu ditahan. Dari Makasar dibawa ke Batavia dan ditahan disana sampai wafatnya pada tanggal 6 Juli 1696 dan dimakamkan di Tanjung Periok. Pada tahun 1701 VOC membangun benteng dan loji di Bima ke mudian menempatkan petugas-petugasnya bergelar *Koopman* dan *Onderkoopman*. Dari petugas-petugas VOC itulah kemudian diketahui bahwa Sultan Jamaludin telah wafat. Tiga tahun kemudian, tulang belulang Sultan Jamaludin dipindahkan ke Bima dan dimakamkan di Komplek Makam Tolo Bali berdampingan dengan makam bekas gurunya Syeh Umar Al Bantami yang telah mendahuluinya.

3.3. Bima Dalam Jaringan Pelayaran Perdagangan Nusantara

Telah dijelaskan bahwa di pulau Sangeang (Bima) pernah ditemukan nekara perunggu yang menurut para ahli tergolong yang paling bagus yang pernah ditemukan di Indonesia. Apakah nekara perunggu itu merupakan produksi lokal atau barang impor belum diketahui secara pasti meskipun tehnik penuangan benda-benda perunggu seringkali dihubungkan dengan kebudayaan Dongson di Hindia Belakang. Berdasarkan telaah paleografi atas prasasti Jawa Kuno yang dipahat pada batu karang di situs Watu Pahat (Bima) diduga pengaruh Hindu (agama Hindu dan Budha) telah

berkembang di Bima dan daerah sekitarnya pada abad ke-8 atau 9 Masehi. Sedangkan bukti-bukti arkeologi yang ditemukan di daerah pedalaman memberikan indikasi berkembangnya agama Hindu aliran Syaiwa yang kemungkinan besar dibawa dari Jawa.Berdasarkan sumber Cina dan sejumlah karya sastra berbahasa Jawa Kuno dapat diambil simpulan bahwa keberadaan budaya Hindu di pulau Sumbawa (termasuk Bima) dibawa melalui penaklukkan dan dominasi politik kerajaan-kerajaan Hindu di Jawa secara silih berganti. Meskipun demikian tidak tertutup kemungkinan bahwa budaya tersebut masuk ke pulau Sumbawa melalui kontak dagang atau dibawa oleh para Brahmana yang sengaja datang ke daerah ini untuk menyebarkan agama Hindu.[59] Jika demikian halnya maka nama-nama tempat di pulau Sumbawa seperti Taliwang, Seran, Hutan Kadali, Dompo, Bhima, Sape dari Sanghyang Api mungkin telah dikenal oleh orang-orang Jawa melalui kontak dagang sebelum pulau Sumbawa ditaklukkan oleh kerajaan Majapahit. Dalam Kidung Ronggolawe disebutkan bahwa kuda yang baik dapat diperoleh dari Kore di Bima. F.H. van Naerssen berpendapat bahwa kuda Sumbawa diimpor oleh orang-orang Jawa dan adanya ternak kuda di Bima telah dikenal sejak awal berdirinya kerajaan Majapahit karena hubungan lalulintas (pelayaran) dengan pulau Jawa.[60]

Berbicara mengenai posisi Bima dalam jaringan pelayaran serta keterlibatannya dalam aktivitas perdagangan erat kaitannya dengan pembicaraan mengenai posisi serta kedududukan wilayah Nusa Tenggara dalam lintas pelayaran-perdagangan nusantara dimana pulau Sumbawa (termasuk Bima) di dalamnya. Kawasan Nusa Tenggara, mulai dari pulau Bali diujung barat sampai pulau Timor diujung timur terbentang pada jalur pelayaran-perdagangan nusantara yang diperkirakan sudah digunakan sejak abad ke-14. Dalam catatan perjalanan jarak jauh, *Shun Feng Hsiang Sung atau angin baik pembimbing pelayaran*, yang dihimpun sekitar tahun 1430 disebutkan 27 jalur pelayaran yang dilaukan oleh orang-orang Cina pada waktu itu.[61] Kapal-kapal Cina yang berlayar ke kepulauan Nusantara melalui dua jalur, yaitu jalur barat dan jalur timur. Selain itu masih ada lagi lima jalur pelayaran keberbagai tempat atau daerah di dalam wilayah Indonesia antara lain dari Krueng Aceh ke Banten

yang terbagi dalam tiga etape, yaitu dari Aceh ke Barus: dari Barus ke Pariaman. kemudian dari Pariaman ke Banten.[62] Dari Banten ada lagi dua jalur yang menuju ke Banjarmasin dan Timor.[63] Jalur pelayaran ini melewati atau singgah di Kalapa (Chiao-lu-pa), Tanjung Indramayu (Chiao-ch'ing wan), Cirebon (Che-li-wen), Gunung Muria (Pa-na ta-sahan). Dari Gunung Muria jalur yang menuju ke Banjarmasin membelok ke utara melewati Pulau Karimunjawa (Chi-li-wen) dan terus ke Sampit, sedangkan jalur yang ke Timor pelayaran dilanjutkan ke timur menuju Gunung Genuk (Hu-chiao shan), Tanjung Awarawar (Shung-yin hsu) sampai ke ujung barat Pulau Madura (Wu-liu-na shan). Dari sini membelok ke selatan menyebrangi Selat Madura menuju Jaratan dan Gresik, lalu ke arah timur sampai ke ujung timur Pulau Madura, kemudian membelok lagi ke selatan menyebrangi Selat Madura untuk kedua kalinya ke arah Panarukan (Pen-tzu-nu-kan) di pantai utara Jawa Timur Dari Panarukan pelayaran diteruskan ke Bali (Ma-li ta-shan) Lombok (Lang-mu shan) dan Sumbawa (San-pa ta-shan). Dari sini pelayaran dilanjutkan ke Pulau Sangeang (Huo Shan) dan melalui Selat Sangeang (antara Pulau Sangeang dan Tanjung Naru) memasuki Selat Sape lalu membelok ke selatan menuju Pulau Sumba (Hsunpa ta-shan) dan akhirnya sampai di Kupang (Chu-pang) dan Timor (Ch'ih-wen). Kapal-kapal Cina yang menuju ke pantai utara Timor berlayar melewati Tanjung Salamu kemudian memasuki pelabuhan Kupang, sedangkan kapal-kapal yang menuju ke pantai selatan berlayar melalui selat Roti dan terus ke Timur menyusuri pantai selatan pulau Timor. selain jalur Banten Timor, sumber yang sama juga menyebutkan jalur pelayaran dari Patani ke Timor.[64] Dari Patani kapal-kapal Cina berlayar menyusuri pantai timur Semenanjung Malaya sampai pulau Tioman (Ti-pan). Dari sini terus ke selatan menuju Pulau Badas (Ch'ihsu), Karimata (Chi-ning ma-ta), pulau Karimunjawa sampai ke Gunung Muria (dekat Jepara) pelayaran dilanjutkan ke pulau Timor melalui atau singgah di beberapa tempat seperti yang disebutkan dalam jalur Banten-Timor.

Jalur-jalur pelayaran orang-orang cina ke Timor seperti yang digambarkan oleh sumber Cina bukannya tanpa alasan mengingat pulau Timor dan Sumba memiliki produk andalan yang tidak dapat

diperoleh ditempat lain, yakni kayu cendana. Menurut Meilink-Roelofsz, mungkin sekali tujuan orang-orang Cina ke Timor adalah untuk mencari kayu cendana, mereka tidak pernah datang ke Maluku dan itulah sebabnya pulau rempah-rempah hanya disebutkan secara sporadis dalam sumber-sumber Cina.[65]

Rute pelayaran-perdagangan yang menyusuri pantai utara Pulau Jawa dan Nusa Tenggara tetap dilanjutkan (digunakan) sampai abad ke-16 atau 17, bahkan sampai abad ke-18 seperti yang tersurat dalam sumber-sumber VOC. Dengan demikian rute ini kemudian tidak hanya digunakan (dilalui) oleh orang-orang Cina, tapi juga oleh orang-orang Portugis, Belanda dan pedagang-pedagang dari Malaka untuk mencari rempah-rempah di kepulauan Maluku. Orang-orang Portugis datang di kepulauan Nusantara sekitar abad ke-16 dan dalam pelayarannya ke Maluku mereka singgah di beberapa pulau di kawasan Nusa Tenggara seperti Flores, Solor, Timor dan Sumba untuk mencari kayu cendana.[66] Ketika orang-orang Belanda datang di Indonesia untuk pertama kalinya pada tahun 1595, mereka berlabuh di Teluk Banten dan sebelum pulang ke negerinya meneruskan pelayarannya sampai di Bali melalui rute pantai utara pulau Jawa. Ketika Malaka muncul sebagai imperium di Selat Malaka saudagar-saudagar dari Asia Barat dan India tidak lagi berlayar langsung ke Maluku melainkan hanya sampai di Malaka.[67] Pelayaran ke Maluku dilakukan oleh pedagang-pedagang dari Malaka dengan menyusuri pantai timur Sumatera, pantai utara Jawa dan Nusa Tenggara. Menurut Meilink-Roelofsz, aktivitas perdagangan Malaka ini menyebabkan Islam tersebar luas dan dalam hubungan ini pula perdagangan tampaknya menjadi faktor penting dalam Islamisasi di seluruh Nusantara.[68]

Setelah Malaka jatuh ketangan Portugis pada tahun 1511, rute dan jalur pelayaran-perdagangan ini tetap dipertahankan, meskipun ada pendapat bahwa pedagang-pedagang muslim yang tidak suka kepada Portugis mengalihkan tujuannya ke Aceh yang pada waktu itu telah berkembang menjadi imperium dan pusat penyebaran Islam. Bahkan pedagang-pedagang muslim yang tadinya bermukim di Malaka terpaksa hengkang dari sana mencari tempat baru untuk bermukim dan melakukan aktivitas perdagangan. Selain itu ada juga asumsi yang mengkaitkan berpindahnya sebagian kapal-kapal asing

membuang sauh dari Malaka ke Aceh disebabkan Portugis menarik pajak pelabuhan terlalu tinggi.[70] Dari Aceh pelayaran kemudian dilanjutkan dengan menyusuri pantai timur Sumatera, memasuki Selat Sunda dan dilanjutkan ke timur menyusuri pantai utara Jawa, Nusa Tenggara. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa selama beberapa abad, kawasan Nusa Tenggara sering dikunjungi para pedagang dari berbagai wilayah Nusantara dan dari berbagai negara. Hal itu selain letaknya yang strategis pada lintas pelayaran-perdagangan rempah-rempah, juga karena kawasan Nusa Tenggara memiliki produk-produk andalan seperti kayu cendana dari pulau Timor dan Sumbawa; kayu dye (kayu celup) dari Sumbawa;(Bima); belerang dari Solor dan Flores: budak dari Bali, Lombok, Sumbawa, Flores dan Timor. Menurut sumber VOC,[71] dari 10.000 budak yang dibawa ke Batavia selama dua dekade 1661--1682), 24% di antaranya berasal dari Bali. Demikian juga halnya dengan budak-budak Indonesia di pelabuhan-pelabuhan VOC di tempat-tempat lain di Nusantara dan Semenanjung Harapan (Afrika) selama dekade terakhir abad ke-17, budak-budak yang berasal dari Bali menempati jumlah nomor dua setelah budak-budak dari Sulawesi. Berkembangnya perdagangan budak di kawasan Nusa Tenggara antara lain disebabkan meluasnya praktek penculikan.

Kayu cendana telah lama menjadi incaran pedagang-pedagang Cendana dan Portugis. Menurut Tome Pires,[72] kayu sandal (cendana) banyak terdapat dihutan-hutan di Pulau Timor dan Sumba dan harganya murah; setiap tahun datang pedagang-pedagang dari Jawa dan Malaka membeli kayu cendana untuk dijual ke Malaka karena kayu ini ini dipergunakan oleh semua bangsa. Di India kayu cendana dipergunakan sebagai obat, parfum dan berperan penting dalam upacara-upacara kremasi dan upacara korban, sedangkan di Eropa dipergunakan sebagai ramuan obat oleh para apoteker.[73] Kayu dye (kayu celup) yang merupakan produk andalan Sumbawa (Bima) di jual ke Malaka dan dari sana kemudian diepkspor ke Cina; demikin juga dengan belerang yang berasal dari Solor dan Flores diekspor ke Cochin-Cina melalui Malaka. Produk-produk dari Nusa Tenggara ini pada umumnya dapat diperoleh secara barter dengan kain dari Gujarat, barang-barang dari logam (pedang, pisau, kapak dan paku), manik-manik, timah dan porselin.[74] Meskipun penduduk Nusa Tenggara juga

telah berlayar dengan perahu-perahu berukuran kecil ke beberapa tempat di pantai utara Jawa membawa budak, kuda dan beras untuk dijual, namun mereka belum sampai ke Malaka. Karena itu pedagang-pedagang dari Malaka yang datang membeli produk dari Nusa Tenggara .

Selain menghasilkan produk-produk andalan yang sangat dibutuhkan dan laku dipasaran, menurut Tome Pires di kawasan Nusa Tenggara terdapat pelabuhan-pelabuhan alam yang baik untuk lepas sauh, air bersih berlimpah-limpah dan suplay makanan cukup bagi pedagang-pedagang Melayu dan Jawa yang beristirahat dalam perjalanan mereka ke Maluku.[75] Dalam konteks seperti inilah Bima harus ditempatkan karena Bima merupakan bagian dari sistem dan jalur pelayaran-perdagangan yang ada pada waktu itu, dimana ia ikut berperan.

Bima sebagai kerajaan atau sebagai salah satu bandar dalam lintas pelayaran-perdagangan dari Malaka ke Maluku atau sebaliknya menjadi penting artinya baik sebagai tempat singgah (istirahat) maupun sebagai tempat aktivitas perdagangan. Sebagai bandar, Bima terletak pada pada sebuah teluk (Teluk Bima) yang terlindung oleh perbukitan di sekitarnya. Oleh karena itu kapal-kapal yang singgah atau lepas sauh aman dari hempasan gelombang, baik pada waktu angin muson bertiup dari barat (barat laut) maupun dari timur (tenggara). Namun selain posisi geografis dan fisiografisnya, Bima berkembang sebagai kota bandar atau pusat kerajaan didukung pula oleh sumber daya yang dimilikinya maupun sumber daya dari daerah sekitarnya. Di sini tersedia cukup air bersih, bahan makanan, daging dan ikan yang dapat diperoleh dengan murah sebagai bekal melanjutkan pelayaran. Sebagai tempat aktivitas perdagangan, Bima dan daerah sekitarnya menghasilkan produk atau komoditi tertentu seperti kain kasar, budak, kuda, kayu dye (kayu celup) dan hasil bumi lainnya seperti kacang-kacangan dan beras (padi). Menurut Tome Pires,[76] pedagang-pedagang dari Jawa dan Malaka yang pergi ke Banda dan Maluku singgah di Bima untuk menjual barang-barang yang dibawanya dari Jawa dan menbeli kain kasar untuk dijual di Maluku dan Banda; demikian juga budak dan kuda dibawa dan dijual ke Jawa. Budak selain dari pulau Sumbawa didatangkan juga dari Manggarai

(Flores Barat) dan pulau Solor yang pada waktu itu (abad ke 17--18) menjadi wilayah kerajaan Bima.

Seperti telah disinggung di atas, kayu dye (kayu celup) dari Bima dijual ke Malaka, kemudian dari sana diekspor ke Cina karena permintaan cukup banyak, meskipun kwalitas kayu dye dari Bima lebih rendah dibandingkan dengan yang berasal dari Siam. Hasil bumi terutama beras banyak yang dibawa (dijual) ke Jawa, bahkan menurut sumber VOC secara berkala kapal-kapal VOC datang di Bima untuk membeli beras. Kapal-kapal yang datang maupun yang berangkat ke dan dari Bima selalu mengikuti angin muson. Pada saat angin muson barat (barat laut) di pelabuhan Bima berdatangan kapal-kapal dari arah barat seperti Sumbawa, Lombok, Bali, Jawa dan Malaka sedangkan dari Bima berangkat kapal-kapal yang berlayar ke arah timur dan utara seperti ke Selayar, Sulawesi, Flores, Solor, Buton Ambon, Banda dan Maluku. Sebaliknya pada saat angin muson timur (tenggara) berdatangan kapal-kapal dari arah timur atau utara dan berangkat kapal-kapal yang menuju ke arah barat. Kalau dianalogikan dengan keadaan pada permulaan abad ke-19 sesuai dengan data yang dikumpulkan oleh Zollinger,[77] ternyata jumlah kapal yang datang maupun yang berangkat ke dan dari pelabuhan Bima selama angin muson timur (Mei - Oktober) hampir dua kali lipat dibandingkan dengan kapal yang datang dan berangkat ke dan dari pelabuhan Bima pada saat angin muson barat atau barat laut (Nopember - April). Selain itu perlu diketahui bahwa Sape merupakan pelabuhan yang cukup penting di pantai timur (di Selat Sape), sehingga pelabuhan ini merupakan pintu masuk dari pantai timur. Dalam sumber lokal disebutkan bahwa Dato ri Tiro ketika datang ke Bima mendarat melalui pelabuhan Sape; demikian juga ketika sekelompok bajak laut menyerang Bima mendarat melalui pelabuhan yang sama.[78]

Posisi Bima dalam lintas pelayaran-perdagangan antara Malaka-Maluku atau sebaliknya serta keterlibatannya dalam aktivitas perdagangan mendorong munculnya Bima sebagai kota bandar maupun sebagai kota pusat kerajaan yang terpenting di kawasan Nusa Tenggara, sekaligus mempercepat proses Islamisasi dan munculnya Bima sebagai kerajaan Islam. Dengan kata lain proses Islamisasi di daerah Bima dan sekitarnya erat kaitannya serta didorong oleh

keterlibatan Bima dalam perdagangan regional maupun internasional yang pada waktu itu telah didominasi oleh pelaut-pelaut dan pedagang-pedagang muslim. Dampak perdagangan ini sangat besar bagi pertumbuhan dan perkembangan Bima baik sebagai kota bandar maupun kota pusat pemerintahan karena perniagaan dapat memacu pertumbuhan negara (kerajaan) atau kota-kota di daerah pantai. Dalam perdagangan penguasa akan mendapatkan income dari pajak (pajak pelahuhan dan pajak perdagangan) dan sebagian dari income tersebut dipergunakan untuk membangun kota maupun kerajaan (negara) dalam arti yang seluas-luasnya. Setelah Bima muncul sebagai kerajaan Islam datanglah para ulama dan muballig Islam dari berbagai daerah maupun dari mancanegara seperti Syeh Umar Al Bantami, ulama Arab yang datang dari Banten ; Dato ri Bandang dan Dato ri Tiro; masing-masing berasal dari Minangkabau dan Aceh yang datang dari Makassar; Kadhi Jalaludin dan Syeh Umar Bamahsun, keduanya dari Arab. Mereka datang ke Bima untuk menyebarkan agama Islam atau karena sengaja diundang oleh penguasa (sultan) menjadi guru sultan dan keluarganya, kemudian diangkat menjadi mufti (penasehat) kerajaan.

Seiring dengan berkembangan Bima sebagai kota bandar dan kota pusat pemerintahan, maka heterogenitas penduduknyapun semakin tinggi. Di Bima berdatangan para pedagang dari berbagai daerah dan berbagai bangsa, sebagian di antaranya tinggal menetap dan membangun perkampungan mereka menurut kelompok etnis maupun profesi. Dalam laporan perjalanannya, Zollinger[79] menyebutkan nama-nama kampung seperti kampung Bugis, kampung Melayu dan kampung Walanda. Meskipun data itu menggambarkan situasi pada awal abad ke-19, ada kemungkinan bahwa heterogenitas penduduk Bima sudah mulai berlangsung sejak abad ke-17 atau 18.

3.4 Hubungan Bima dengan Kerajaan-kerajaan Sekitarnya

Telah dijelaskan bahwa dalam sumber-sumber sastra Jawa kuno disebutkan sejumlah nama tempat atau daerah di pulau Sumbawa yang menjalin hubungan politik maupun budaya dengan pulau Jawa dan Bali. Tempat-tempat yang di maksud adalah Taliwang, Seran, Hutan

Kadali, Sambawa, Kore, Sanghyang Api, Dompo, Bima dan Sape. Apakah tempat-tempat tersebut merupakan suatu kerajaan" dibawah kekuasaan raja-raja Jawa atau Bali, atau sebagai pelabuhan tempat persinggahan kapal-kapal dan pelaut-pelaut dari Jawa belum diketahui secara pasti. Pada saat ini, nama-nama tempat atau daerah yang pernah disebut-sebut dalam berbagai karya sastra itu sebagian di antaranya adalah kota kabupaten atau kecamatan seperti Sumbawa, Dompu, Bimas Taliwang, Utan dan Sape sedangkan yang sebagian lagi tetap berfungsi sebagai pelabuhan; Kore dan Bima di pantai utara, Sape di pantai timur menghubungkan Pulau Sumbawa dengan pulau-pulau di sekitarnya. Dengan demikian keberadaan nama-nama tempat itu dalam sejumlah karya sastra berbahasa Jawa Kuno membuktikan bahwa tempat atau daerah-daerah yang bersangkutan telah dikenal oleh orang-orang Jawa atau Bali, baik melalui dominasi politik maupun kontak dagang.

Di dalam Bo kerajaan Bima disebutkan bahwa hubungan Bima dengan Pulau Jawa telah berlangsung sejak abad ke-10, pada waktu Raja Batara Mitra pergi ke Jawa dan disana ia kawin dan mendapatkan seorang anak bernama Manggampo Jawa.[80] Setelah Batara Mitra meninggal di Jawa, Manggampo Jawa pulang ke Bima menggantikan ayahnya menjadi raja. Dari Jawa ia membawa serta seorang pande bernama Ajar Panuh yang kemudian mengajar orang-orang Bima membangun candi, membuat batu bata dan mengajarkan kepandaian baca tulis.[81] Jika dihubungkan dengan prasasti berbahasa Jawa Kuno (prasasti Watu Tunti dan prasasti Watu Pahat) mungkin informasi yang disebutkan dalam sumber-sumber lokal itu mengandung kebenaran. Di sisi lain dapat diambil simpulan bahwa Bo kerajaan Bima memberikan gambaran betapa kuatnya pengaruh budaya Jawa sebelum datangnya Islam sebagaimana yang tampak dari bukti-bukti arkeologi dan uraian kitab Nagarakertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca.

Setelah Majapahit runtuh dan munculnya kerajaan-kerajaan Islam, hubungan ekonomi perdagangan antara Bima dengan Pulau Jawa dan daerah-daerah lain di kawasan barat Nusantara tetap berlansung. Tome Pires menyebutkan bahwa kapal-kapal dari Malaka dan Jawa yang berlayar ke Maluku untuk mencari rempah-rempah

singgah di Bima untuk berdagang dan mengambil air minum, bahan makanan untuk melanjutkan pelayaran mereka. Hubungan pelayaran-perdagangan ini selain mendorong munculnya Bima sebagai salah satu bandar yang terpenting di kawasan Nusatenggara, Juga mendorong munculnya Bima sebagai kerajaan dan pusat penyiaran Islam di kawasan itu. Selain itu Bima pun menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan, terutama kerajaan Gowa dan Tallo. Kapan hubungan itu mulai berlangsung belum dapat ditentukan secara Pasti. Dalam Bo kerajaan Bima disebutkan bahwa raja Bima, Manggampo Donggo belajar cara-cara mengendalikan pemerintahan yang kemudian berkembang menjadi tata hadat yang berlaku di kerajaan Bima dikemudian hari dari kerajaan Gowa. Sejak itu pula hubungan dengan kerajaan Gowa dan Tallo berlansung hingga terjalin hubungan keluarga melalui perkawinan.

Di dalam Bo kerajaan Bima disebutkan bahwa pada tahun 1028 Hijrah bertepatan dengan tahun 1618 M telah datang di Labuhan Sape saudara Daeng Mangali di Bugis Sape dengan orang-orang Luwu, Tallo dan Bone untuk berdagang. Mereka datang menghadap Ruma Bumi Jara menyampaikan sebuah cilo, kain bugis dan sepucuk surat dari saudara sepupu Ruma Bumi Jawa di Bone bernama Daeng Malaba. Disebutkan Juga bahwa isi surat itu selain memberitakan kerajaan Gowa, Tallo, Luwu, Bone dan Daeng Malaba sekeluarga telah memeluk Islam, juga meminta agar Bumi Jara masuk Islam dan mengantar orang-orang yang membawa surat itu untuk menghadap Ruma Bicara. Karena pada waktu itu Ruma Bicara telah wafat maka orang-orang itu dibawa oleh Bumi Jara kepada adik Ruma Bicara bernama Rato Waro Bewi dan anak Ruma Bicara bernama La Mbila. Utusan itu mempersembahkan sebuah cilo pinggur emas sejari dan sebilah keris buatan Bontoala dan sepucuk surat dari Datu Luwu, La Patiware Daeng Parabung atau Sultan Muhammad dan La Tenri Waru dari Bone, sedangkan dari utusan itu sendiri dipersembahkan sehelai kain tenun Mandar. Adapun isi surat itu mengajak agar Ruma Bicara masuk Islam karena cocok dengan wasiat keturunan mereka yang dulu-dulu untuk keselamatan rakyat dan negeri.[82] Menurut hemat penulis berita atau catatan harian kerajaan Bima selain memberikan informasi tentang proses masuk dan berkembangnya agama Islam di

Bima, juga di dalamnya tersirat hubungan perdagangan antara kerajaan Bima dengan daerah-daerah di Sulawesi Selatan. Luwu. Tallo dan. Bone. Ada kemungkinan Ruma Bumi Jara adalah pejabat setingkat syahbandar di pelabuhan Sape, sehinga sebagai syahbandar selain bertugas mengkoordinasikan kegiatan perdagangan di pelabuhan, ia juga sebagai mediator (perantara) antara Para pedagang dengan penguasa setempat, yang dalam hal ini adalah Ruma Bicara sebagai pemegang kekuasaan yang sesungguhnya dalam struktur pemerintahan kerajaan Bima.[83] Sedangkan persembahan berupa cilo, kain tenun, dapat ditafsirkan sebagai suatu hadiah dari para pedagang kepada penguasa setempat karena telah diberikan izin untuk berdagang di wilayahnya.

Dalam Bo kerajaan Bima disebutkan juga bahwa pada 9 hari bulan Jumadil Akhir pada tahun Ba 1078 Hijrah (1667 M), tatkala Gowa ditaklukkan oleh Belanda, kerajaan Bima mengadakan perjanjian dengan kerajaan Balanipa.[84] Ini berarti bahwa kerajaan Bima tidak hanya menjalin hubungan politik dan ekonomi dengan kerajaan-kerajaan suku Bugis-Makasar, tapi juga dengan kerajaan suku Mandar. Menurut L. Massir Q. Abdullah perjanjian itu diadakan antara Sultan Bima, Abdul Khair Sirajudin yang bergelar Rumata Mantau Uma Jati atau di dalam Lontara Gowa dikenal dengan nama I Ambela dengan Raja Balanipa Mara' dia Balanipa.[85] Dalam sumber lokal disebutkan juga bahwa pada masa pemerintahan Manggampo Donggo, sekitar abad ke-14 Bima meluaskan kekuasaannya ke daerah-daerah sebelah timur seperti alor, Sawu, Solor, Sumba, Flores dan Komodo.[86] Menurut Braam Morris, penguasaan atas daerah-daerah tersebut berakhir pada tahun 1864 atas desakan Belanda.[87]

Dalam kronik Gowa dan Tallo disebutkan 6 buah kerajaan di pulau Sumbawa, yaitu Sumbawa, Dompu, Bima, Sanggar, Papekat dan Tambora. Kerajaan-kerajaan kecil ini kemudian ditaklukkan oleh ekspedisi Makassar (Gowa) dalam rangka menyebarkan agama Islam di Pulau Sumbawa pada permulaan abad ke-17.[88] Dan sejak menjadi vazal Gowa, kerajaan-kerajaan di Pulau Sumbawa mengirimkan upeti ke Makassar berupa hasil bumi, kain kasar, kayu sapan dan yang terutama sekali adalah kuda Sumbawa yang amat terkenal itu; Kuda Sumbawa dipergunakan sebagai kuda perang atau untuk keperluan

berburu di Sulawesi Selatan. Selain itu kerajaan-kerajaan di pulau Sumbawa berkewajiban mensuplay Makassar dengan personil (pasukan), baik untuk kepentingan menyerang maupun untuk mempertahankan diri.

Hubungan politik Makassar dengan Sumbawa, terutama dengan kerajaan Bima dan Sumbawa dipererat dengan tali perkawinan antara putri para bangsawan Sulawesi Selatan dengan elit penguasa setempat. Contoh-contoh yang berasal dari abad ke-17 adalah perkawinan sultan Bima I, Abdul Kahir dengan adik ipar Sultan Gowa, Alaudin bernama Daeng Sikontu; perkawinan Sultan Bima II, Abdul Khair Sirajudin dengan Karaeng Bonto Jene, putri Raja Gowa, Malikul Said,; perkawinan Sultan Bima III, Nurudin Ali Syah dengan Daeng Tamemang, putri bangsawan Gowa Karaeng Lengkese (Lengkoso) dan perkawinan Sultan Bima IV, Jamaludin Ali Syah dengan Fatima Karaeng Tanata, putri bangsawan Gowa Karaeng Besei.[89] Dari kerajaan Sumbawa misalnya perkawinan Mas Pamayan, putra Raja Selaparang yang menjadi raja di Sumbawa dengan Karaeng Panaikang Daeng Niaq, adik tiri raja Tallo, Harun al Rasyid:. perkawinann Datu Loka (Mas Bantan) dengan Karaeng Tanasanga, saudara perempuan raja Tallo; Abdul Qadir.[90] Ternyata hubungan perkawinan ini tetap dilanjutkan oleh sultan-sultan Bima dan Sumbawa yang memerintah periode sesudahnya, sehingga ada kemungkinan bahwa hal itu menjadi alasan mengapa para pemberontak terhadap kompeni yang berasal dari kaum bangsawan di Sulawesi Selatan mencari perlindungan (suaka) di Pulau Sumbawa. Menurut Noorduyn,[91] perkawinan antara Sultan-sultan Bima dengan putri bangsawan (elit) penguasa Makasar adalah perkawinan politik karena melalui perkawinan ini dimasukkan dalam keluarga dinasti Gowa dan mengikat Bima menjadi bagian kerajaan Gowa. Dengan kata lain perkawinan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat loyalitas serta kesetiaan elit penguasa kerajaan Bima kepada putrinnya, raja-raja Gowa. Jika asumsi Noorduyn itu dapat dibenarkan maka perkawinan yang dimaksud tentunya adalah perkawinann-perkawinan yang berlangsung sebelum Bima dan Makasar jatuh ke tangan VOC.

Secara politis hubungan Makasar (Gowa) dengan kerajaan-kerajaan di Pulau Sumbawa berakhir dengan ditandatanganinya

perjanjian Bongaya pada tahun 1667, yang mengakhiri perang Makasar. Walaupun perjanjian itu telah ditandatangani oleh Sultan Hasanudin dan raja-raja lainnya, namun Karaeng Bontomaranu, Raja Tallo Sultan Harun al Rasyid, Karaeng Lengkoso dan Sultan Bima tetap belum mau menandatanganinya. Namun atas desakan Speelman, raja Tallo dan Karaeng Lengkoso terpaksa menandatangi perjanjian Bongaya pada tanggal 9 dan 31 Maret 1668, sedangkan kerajaan Bima baru menyerah kepada Belanda (VOC) dengan suatu perjanjian yang ditandatangani di Batavia oleh Jeneli Monta, Abdul Wahid dan Jeneli Parado, La Ibu atas nama sultan Bima pada tanggal 8 Desember 1669.

Walaupun secara politis hubungan Bima dengan VOC mulai berlangsung dengan ditandatanganinya perjanjian 8 Desember 1669, nanum hubungan perdagangan antara keduanya telah dirintis jauh sebelumnya. Dalam sumber lokal disebutkan bahwa pada tahun 1611 telah diadakan perjanjian antara orang-orang Belanda dengan Raja Rumata Manuru Sarei di dusun Cenggu yang disebut Sumpa Ncake. Menurut Braam Morris perjanjian itu terjadi secara lisan antara raja Bima bernama Sarise dengan orang Belanda bernama Steven van Hagen pada tahun 1605 dan merupakan perjanjian antara Bima dengan Belanda yang pertama, tetapi dalam bentuk lisan.[92] Sedangkan menurut L. Massir Q. Abdullah perjanjian itu terjadi pada masa pemerintahan Mantau Asi Peka (Raja Salisi), saudara Sarei sebab menurutnya Manuru Sarei tidak pernah tercatat sebagai raja yang berkuasa di kerajaan Bima.[93] Perjanjikan inilah yang menimbulkan pertentangan yang panjang dan merupakan salah satu sebab jatuhnya Raja Salisi dari tahta kerajan yang sekaligus mewarnai saat-saat masuk dan berkembangnnya agama Islam di Bima. Dengan kata lain berkembangnya agama Islam di Bima didorong pula oleh foktor dan kondisi sosial-politik kerajaan Bima pada waktu itu.

Sejak kerajaan-kerajaan di pulau Sumbawa (termasuk Bima) menjadi taklukkan VOC, semua keputusan politik yang dianggap penting harus mendapatkan persetujuan pemerintah VOC melalui residen di Bima atau melalui gubernurnya yang berkedudukan di Makasar. Meskipun demikian kekuasaan untuk memerintah di Pulau Sumbawa tetap diserahkan kepada penguasa-penguasa lokal, terkecuali yang berkaitan dengan masalah ekonomi dan perdagangan menjadi

monopoli VOC. Dalam hal seperti ini pemerintahan pribumi berfungsi sebagai penghubung antara penguasa VOC (Belanda) dan penduduk setempat untuk menjamin kepentingannya, baik berupa pajak maupun tenaga kerja. Para penguasa pribumi dengan pengaruh tradisionalnya yang kharismatik akan mampu memenuhi patronnya, penguasa VOC. Namun sebaliknya kepentingan para penguasa pribumi masih bisa dijamin oleh penguasa VOC karena kekuasaannya masih tetap dipertahankan, termasuk hak-hak istimewa yang dimilikinya. Dengan demikian sistem politik dan birokrasi tradisional yang sudah berjalan dan mapan tetap dilanjutkan terkecuali dalam berbagai hal yang dianggap penting seperti pergantian tahta, perkawinan dikalangan elit penguasa pemerintah VOC ikut campur, langsung maupun tidak langsung. Untuk mengurus dan mengendalikan kekuasaan VOC dibidang perdagangan di Bima ditempatkan seorang kuasa usaha yang dikenal sebagai khojah Ibrahim. Dan baru pada tahun 1701 Belanda membangun benteng dan loji, kemudian menempatkan petugas-petugasnya yang bergelar Koopman dan Onderkoopma.

Meskipun menurut sumber-sumber VOC kerajaan Bima, Dompu dan Sumbawa jarang berperang, namun mereka sering berkomplot. Ini berarti bahwa meskipun kerajaan-kerajaan di Pulau Sumbawa dibawah kekuasaan VOC pada saat tertentu mereka bersekutu untuk menentang VOC. Sebaliknya tidak Jarang terjadi pertikaian antara penguasa-penguasa lokal, dimana kemudian VOC mendapatkan manfaat dari peristiwa tersebut. Pada tahun 1695 terjadi peperangan antara Bima dengan Tambora yang dibantu oleh Arung Teku, sedangkan Bima dibantu oleh Dompu dan VOC.[94] Setelah perang usai Arung Teku tetap tinggal di Tambora, namun ketika Arung Teku merampok Manggarai pada tahun 1699, maka untuk kedua kalinya VOC menyerang Tambora dan memaksanya untuk menandatangi suatu perjanjian baru. Pada tahun 1701 raja Tambora ditangkap dari diasingkan oleh VOC dan raja baru yang diangkat dipaksa untuk menandatangi suatu perjanjian pada tanggal 18 April 1701. Tidak jarang pula pertentangan atau intrik-intrik yang terjadi dikalangan elit penguasa di Pulau Sumbawa dipergunakan sebagai alasan atau dalih oleh VOC untuk nenyingkirkan raja atau sultan yang sedang memerintah karena dianggap kurang loyal kepada mereka. Pada

tahun 1691 permaisuri Sultan Dompu yang juga adalah bibi Sultan Bima, Jamaludin Ali Syah terbunuh. Ketika peristiwa itu terjadi secara kebetulan Sultan Jamaludin yang dikenal sebagai sultan yang kurang simpati kepada VOC sedang berkunjung kepada bibinya sehingga kesempatan itu dipergunakan oleh Belanda (VOC) untuk menyingkirkannya. Atas pengaduan Sultan Dompu, VOC menuduh bahwa Sultan Bima terlibat dalam peristiwa pembunuhan tersebut. Gubernur VOC di Makasar kemudian memanggil Sultan Jamaludin ke Makasar, lalu ditahan dan kemudian diasingkan ke Batavia hingga akhir hayatnya .

Pergolakan politik dan peperangan terus melanda kerajaan-kerajaan di Pulau Sumbawa sampai abad-abad berikutnya. Sebagai contoh antara lain perang antara Dompu dengan Tambora pada tahun 1748 karena masalah perbatasan kedua wilayah, perang antara Papekat dengan Tambora pada tahun 1730 dan 1756 karena masalah perbudakan dan perang antara Bima dengan Dompu pada tahun 1771. Dalam sumber lokal disebutkan juga ketegangan antara Sumbawa dan Dompu karena meyangkut utang yang harus dibayar oleh Dompu kepada tanah Sumbawa. Dalam perselisihan itu Kompeni memberikan pinjaman kepada tanah Dompu untuk membayar utang kepada tanah Sumbawa.[95] Peperangan atau pertikaian yang terjadi itu adakalanya sengaja direkayasa oleh penguasa Kompeni yang kemudian memberikan penguasa Kompeni peluang kepadanya untuk menanamkan pengaruhnya di Sumbawa dan daerah-daerah lainnya.

Meskipun demikian dalam sumber lokal tersirat adanya usaha untuk menjaga hubungan yang baik antara penguasa-penguasa kerajaan di Pulau Sumbawa dengan jalan membuat perjanjian yang adakalanya disebut persumpahan. Adakalanya perjanjian semacam itu telah dibuat oleh nenak moyang mereka yang telah meninggal. Tapi yang menarik dari perjanjian atau persumpahan itu ialah adanya berbagai pembalasan yang akan menimpa seseorang yang melanggar perjanjian itu. Disebutkan dalam perjanjian itu bahwa barang siapa yang melanggar atau merubah perkataan dalam surat perjanjian, maka orang itu akan dimurkai oleh adat tanah Bima. Selain itu dalam perjanjian yang diadakan di tanah Bima, terdapat pula ketentuan yang menunjukkan betapa berkuasanya kompeni dalam menentukan

perjanjian dengan raja-raja di Pulau Sumbawa. Dikatakan bahwa siapa-siapa yang tidak mau mendengar atau mengikut apa yang kita putuskan, itulah musuh kompeni. Dalam bagian lain dikatakan bahwa apa yang kompeni dengan segala sobat bikin putus, itulah yang kami dengar dan kami ikut. Pada akhir dari suatu persumpahan terdapat suatu ancaman atau akibat yng akan dihadapi orang yang melanggar sumpah, antara lain ia akan dimakan kerisnya sendiri serta keluar duburnya dari lidahnya dan akan hancur lebur seperti lilin.[96] Selain dengan membuat perjanjian atau persumpahan, hubungan itu dijalin pula melalui perkawinan antara elit penguasa di Pulau Sumbawa. Sebagai contoh adalah perkawinan antara sultan Bima, Abdul Hamid Muhammad Syah, dengan Masiki Syafiatudin dan Datu Sagiri, anak Sultan Sumbawa, Harum al Rasyid.[97]

Catatan

1) Henri Chambart-Loir, *Naskah Dan Dokumen Nusantara III, Syair Kerajaan Bima.* Lembaga Penelitian Perancis Untuk Timur Jauh, Jakarta - Bandung, 1982 : 12.

2) Pada tahun 1910 di Wadu Tunti ditemukan sebuah prasasti Jawa Kuno, sedangkan pada tahun 1982 ditemukan pula prasasti Jawa Kuno di Watu Paa (Watu Pahat), namun sampai sekarang kedua prasasti ini belum dapat dibaca. (Periksa: G.P. Rouffaer, "Oudjavaasche Inscriptie van Soemhawa", *NBG*, 48, 1910: 110--113 ; Henri Cham bert-Loir, *Naskah Dan Dokumen Nusantara V. Ceritera Asal Bangsa Jin Dan Segala Dewa-Dewa.* Penerbit Angkasa dan Ecole Francaise D'extreme-Orient, Bandung, 1985: 50--51.

3) M.H.Zollinger, "A Visit to The Mountainers, Do Dongo in The Country of Bima", *JIAEA*, vol.II, no.XI, November 1948: 687--694; H. Zollinger, *Verslag van een reis naar Bima en Soembawa en naar eenige Plaatsen op Celebes, Saleier en Flores gedurende de maanden Mei tot December 1847*", *VBG* XXIII, 1850: 121--17.

4) Uka Tjandrasasmita (editor), *Sejarah Nasional Indonesia* III. Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1984: 311.

5) *Loc. Cit.*

6) M. A.Bouman, "*Toeharlanti: De Bimaneesche Sultansverhefing*", *KT*, 14, 1925: 710--717.

7) D.F. van Braam Morris, "Nota van Toelichting Behoorende bij het Contract gesloten met het landschap Bima op den 20 sten. October, aan de Regeering ingediend door den Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden", *TBG* XXXV, 1890:227.

8) F.H. van Naerssen, "*Hindoejavaanshe overblijfselen. op Soembawa, TNAG*, 55, 1938: 91--92.

9) Th. Pigeaud, *Java in The Fourteenthe Century Vol.I : Javanese Texts in Transcription*, Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde The Hague Martinus Nijhoff, 1960 : 17

10) G.Kuperus, "*De Madjapahitsche Onderhoorigheid Seran*",*TNAG*, LIX 1942: 771--774; C.C.F.M.Le Roux, "*De Madjapahitsche Onderhoorigheden Hutan Kadali en Gurun en de Oude naam voor het Eiland Flores*", *TNAG* LIX, 1943: 915--927.

11) F.H.van Naerssen *op.cit.* : 90--99;

12) *Loc. Cit.* Periksa juga: J. Noorduyn,,"Bima en Sumbawa; Bijragen tot de Geschiedenis van de Sultanaten Bima en Sumbawa door A.Ligtvoet en G.P.Rouffaer", *VKI* 129, Foris Publications Dordrecht Holland/Providence-USA, 1987: 95--98.

13) *Ibid*, 98.

14) *Ibid*, 96. Periksa juga: G.P. Rouffaer, *op.cit*, : 110--113; Henri Chambert-Loir, 51; J.Noorduyn, *op. cit*: 95--97.

15) F.H.van Naerssen, *op. cit.* : 93

16) Endang Sh.Soekatno, "Watu Paa, Sebuah Pemujaan di Tepi Pantai", *Saraswati. Esai-Esai Arkeologi, Kalpataru Majalah Arkeologi* no.9, 1990: 206--213.

17) R. Soekmono, "Archaeology and Indonesian Historiography", dalam *An Intruduction to Indonesian Historiography*, Edited by Soedjatmoko, Cornel University Press, Ithaca New York: 44.

18) W.F.Stutterheim, *Oudheden van Bali I (Het. Oude Rik van Pejeng*). Teks Liefrinck van der Tuuk, Singaraja, Bali 1930:35.

19) Henri Chambert-Loir. *op.cit.*: 51.

20) Endang Sh.Soekatno, *op.cit.*: 211.

21) R.Goris, *Prasasti Bali I dan II*. Lembaga Bahasa dan Budaya. Fakultas Sastra dan Filsafat. Universitas Indonesia. NV.Masa Baru Bandung. 1953: 65 : 195.

22) F.H.van Naerssen, *op.cit.*: 92.

23) H.J. de Graaf, "Lombok in de 17 e Eeuw". *Djawa* XXI. 1941:357.

24) D.F.van Braam Morris. *op. cit.*: 226.

25) J.Noorduyn, *op.cit.*: 101.

26) Abubakar Atjeh. *Sekitar Masuknya Islam ke Indonesia*. CV. Ramadhani Semarang. 1971 : 32: Taufik Abdullah," Tesis Weberdan Islam di Indonesia". dalam Taufik Abdullah (editor). *Agama, Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi*. Buku Obor. LP3ES, 1979:1--3.

27) J.Noorduyn, "Makasar and The Islamisation of Bima". *BKI*. 142. 1987; 317--319.

28) D.F.van Braam Morris: *op. cit.*: 228; H.Zollinger. *op cit.*: 126.

29) Helius Syamsudin. "The Coming of Islam and The Role of The Malays as Middelmen on Bima". Papers of The Dutch-Indonesian Historical Conference held at Logevuursche. The Netherlands 23--27 Juni 1980 : 293--298.

30) Armando Cortesao,*The Suma Oriental of Tome Pires: An Account of the East from Read Sea to Japan, written in Malacca and India in 1511--1644*, Translated fron Portuguse MS.in the Bibliothique de la chambre des Deputtes, Paris and edited by Armando Cortesao. London: The Hakluyt Society. 1944: 203.

31) M.A.P.Meilink-Roelofsz, *Asian Trade and European Influence in The Indonesian Archipelago Between 1500 and About 1630*. s-Gravenhage, Matinus Nijhoff, 1962: 83--84

32) Th.Pigeaud, *Literature of Java vol. I: Synopsis of Javanese Literature 900-1900*. Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde, Leiden, The Hague Martinus Nijhoff, 1967: 134.

33) Uka Tjandrasasmita, *op.cit.*: 21--22.

34) P. de Roo de la Faille, "Studie over Lomboksch Adatrecht, Bali en Lombok", *Adatrecht Bundels XV*. s-Gravenhage Martinus-Nijhoff 1918: 135--140.

35) H.J.de Graaf. *op. cit.*: 356.

36) J. Noorduyn. *op.cit.* : 90--91.

37) *Loc-cit.*

38) Helius Syamsudin, *op.cit.* : 292.

39) *Ibid.* 296--297

40) *Ibid.* 294--295; H. Damste, "Islam en Sirihpoeante Bima (Soembawa), Atjehsche Invloeden". *BKI.* 100. 1941: 55--70: Henri Chambert-Loir, "Dato ri Bandang:Legendes de Islamization de la region de Celebes-Sud". *Archipel* 29. 1985: 137--167.

41) *Ibid.* 296: Sri Wulan Rudjiati Mulyadi (editor), *Bandar Bima.* Departemen Pendidikan dan kebudayaan, Ditjen Kebudayaan, Direktorat Jarahnitra, Bagian Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara, 1992/1993: 14--17.

42) J. Noorduyn, *op. cit.* : 91.

43) Helius Syamsudin. *op. cit.*: 295--296.

44) J.Noorduyn, *op. cit.* : 312.

45) *Ibid.* 327--328.

46) Daghregister 1631--1634: 140; 174.: J.Noorduyn, *op. cit,*: 330, L Massir Q. Abdullah, Bo (Suatu Himpunan Catatan Kuno Daerah Bima). Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Pengembangan Permuseuman Nusa Tenggara Barat, 1981/1982: 13--16.

47) Henri Chambert-Loir, *op. cit.*: 153.

48) J.Noorduyn, *op. cit,* : 330--331

49) *Loc. cit.*

50) *Ibid.* 338

51) *Ibid.* 339; L. Massir Q.Abdullah, *op. cit.*: 17.

52) *Loc. cit.*

53) D.F. van Braam Morris, *op.cit.*: 226

54) J. Noorduyn, *op.cit.*: 112,(catatan kaki no.125). Istilah itu adalah terjemahan Melayu dari nama (gelar) Arab: Sirajudin.

55) L.Massir Q. Abdullah, *op. cit.*: 7

56) H. Damste, op.cit.: 55--70; Helius Syamsudin, *op. cit.*,: 297.

57) J.Noorduyn, *op. cit* : 324

58) J.Noorduyn, *Op. Cit.*,: 48.

59) Dalam sumber Bali disebutkan bahwa Dang Hyang Nirartha, cicit Mpu Bharadah berimigrasi ke Bali pada masa raja Batu Renggong berkuasa di Gelgel. Ia melakukan dharmayatra ke seluruh Bali, Lombok dan Sumbawa untuk menyebarkan agama Hindu. Di Lombok ia dikenal dengan Pangeran Sangupati, sedangkan di Sumbawa sebagai Tuan Semeru. (Periksa: Ida Bagus Sidemen, "Dang Hyang Nirartha dan Kawangsan di Bali", dalam *Seminar Sejarah Nasional V Subtema Penulisan Sejarah,* Depdikbud, Direktorat Jarahnitra Proyek IDSN, Jakarta, 1990: 88--110).

60) F. H.van Naerssen,, *op. cit.*.: 91

61) J.V.Hills, "Chinese Navigators in Insulinde About A.D. 1500", *Archipel* 18, 1979: 69--72.

62) *Ibid.* 78

63) *Ibid.* 84--85

64) *Ibid.* 81--82

65) M.A.P.Meilink-Roelofsz, *op cit.*.: 26

66) B.J.O.Schrieke, *Indonesian Sociological Studies*; Part. I W. van Hoeve Publishres Ltd. The Hague 1966: 41--48; D.H.Burger, *Sedjarah Ekonomis Sosiologi Indonesia.* PN.Prajnya Paramita, d/h. Wolter, Jakarta, 1960: 45--52.

67) M.A.P. Meilink-Roelofsz, *op cit.*: 24

68) *Ibid.* 34

69) Uka Tjandrasasmita (editor), *op. cit.*: 125--126

70) Dharmono Hardjowidjono, *Benarkah Orang-Orang Portugis melancarkan perang terhadap umat Islam selama kehadiran mereka di Indonesia ?*. Makalah Seminar Sejarah Nasional II, 26--29 Agustus 1970 di Yogyakarta: 4.

71) A.Reid, "Introduction: Slavery and Bondage in Southeast Asian History", dalam Anthony Reid (Ed.) *Slavery, Bondage and Dependency in Southeast Asia.* University of Queensland Press, St. Lucia-London-New York, 1983: 30.

72) Armando Cortesao, *op. cit.*: 204

73) M.A.P. Meilink-Roelofsz,, *op.cit.* : 87

74) *Ibid.* 86--87

75) Armando Cortesao, *op.cit.*: 202

76) *Ibid.* 203;M.A.P.Meilink-Roelofsz, *op. cit.*: 86--87.

77) H.Zollinger, *op.cit.*: 115--118 (Periksa tabel I dan II)

78) Dalam kronik Bima disebutkan bahwa pasukan-pasukan Makasar dibawah Karaeng Maroanging menyerbu Bima melalui pelabuhan Sape, demikian juga ketika Daeng Mangali, orang-orang. Luwu, Tallo dan Bone datang di Bima untuk berdagang dan menyebarkan agama Islam juga melalui pelabuhan Sape. (Periksa : L. Massir Q.Abdullah, *op. cit.*: 8, 17)

79) H.Zollinger, *op.cit.*: 98.

80) L. Massir Q.Abdullah, *op. cit.*: 2

81) *Loc.cit.*

82) *Ibid*, 17--18

83) Ruma Bicara atau Raja Bicara bergelar Tureli Nggampo atau disebut juga Wazir Al Muazam, selain sebagai Perdana Menteri yang menjalan pemerintahan, Raja Bicara merangkap ketua

Dewan (Majelis) Hadat yang beranggotakan Para Tureli, Jeneli dan Bumi. (Periksa. D.F.van Braam Morris, *op.cit.* : 176--233

84) L. Massir Q.Abdullah, *op. cit.*: 31--32

85) *Loc. cit.*

86) *Ibid.*23--24

87) D.F. van Braam Morris, *op.cit.* : 176--233.

88) Lihat cacatan no : 44

89) J.Noorduyn, *op. cit.*: 582 catatan no. 7

90) *Ibid.* 11, 31--32 Bahkan dalam kronik Goa dan Tallo, Sultan Sumbawa yang kelima, Mas Madina atau Muharram Harun Al Rasyid pernah kawin dengan Batari Toja Aru Timurung saudara perempuan Raja Bone, La Patau Matienrowe ri Nagaulang. (Periksa J.Noorduyh, *op. cit.*: 17).

91) Lihat cacatan no : 57.

92) L. Massir Q.Abdullah, *op.cit.*: 22-23; D.F.van Braam Morris *op. cit.* : 200.

93) *Loc. cit.*

94) *Sejarah Daerah Nusa Tenggara Barat* Proyek Penelitian Dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan,1977/1978: 61.

95) Aliudin Mahyudin, *Surat-Surat dan Catatan Harian Dari Kerajaan Bima.* Departemen Pendidikan dan Kebudayaan., Proyek Penerbitan. Buku Sastra Indonesia dan Daerah, Jakarta 1983: 10.

96) *Ibid.* 12

97) J. Noorduyn, *op. cit.* 23.

BAB IV

KESULTAAN BIMA DAN VOC DALAM ABAD KE-18

4.1 Pemerintahan

Telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa masyarakat Bima sebelum Islam terdiri dari berbagai kelompok masyarakat yang dipimpin oleh kepala-kepala suku yang disebut Ncuhi. Bahasa Bima mengartikan Ncuhi sebagai asal usul kehidupan atau suri asal usul pertumbuhan "Ncuhi adedu dou ma dou, ina mpuuna ba weka, ma rimpa di siri bea nggawona. di batu wea lelena", artinya Ncuhi adalah pemimpin, cikal bakal kita, tempat kita berlindung yang harus kita turuti segala perintahnya.[1] Struktur masyarakat Bima pada zaman Ncuhi (pra-Hindu) adalah masyarakat keluarga atau masyarakat persekutuan hidup yang berdasarkan pertalian darah. Dalam cerita-cerita lama zaman itu dilukiskan sebagai *Zaman Ncuhi Ro Naka.*

Menurut Bouman, para Ncuhi itu pada hakekatnya adalah para tuan tanah yang berkuasa di wilayahnya masing-masing, yang kemudian dipersatukan oleh Maharaja Sang Bima menjadi satu kerajaan yang bercorak kehinduan.[2] Ada kemungkinan bahwa kelompok-kelompok, masyarakat yang dipimpin oleh para Ncuhi itu karena berbagai alasan yang belum diketahui membentuk suatu konfederasi yang kemudian menjadi satu kesatuan dalam bentuk pemerintahan kerajaan. Perubahan atau perkembangan bentuk konfederasi menjadi kerajaan ditandai dengan pengangkatan Sang

Bima atau keturunannya sebagai raja yang kemudian disebut sangaji. Dalam sumber-sumber lokal disebutkan bahwa raja Bima, Manggampo Donggo belajar cara-cara mengendalikan pemerintahan yang kemudian dikenal sebagai tata hadat kerajaan Bima dari kerajaan Gowa. Jika hal itu dapat dibenarkan maka sistem pemerintahan yang berlaku dikerajaan Bima merupakan pengaruh dari Sulawesi Selatan, terutama dari kerajaan Gowa. Tampaknya pernyataan tersebut mengandung kebenaran karena didukung oleh data sejarah maupun bukti-bukti arkeologi yang memperlihatkan kuatnya pengaruh budaya Sulawesi Selatan di daerah Bima dan sekitarnya meskipun data yang ada pada umumnya menggambarkan atau berasal dari kurun waktu yang lebih kemudian.

Pemerintahan kerajaan Bima terdiri atas seorang raja yang bergelar sultan yang dalam bahasa daerah disebut *Ruma Sangaji Mbojo*. Sultan Bima dalam mengendalikan pemerintahan dibantu oleh Dewan Kerajaan yang disebut Hadat. Keberadaan raja atau sultan dan Dewan Hadat itu merupakan hal yang umum dalam struktur pemerintahan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan, meskipun dengan penyebutan yang berbeda-beda sesuai dengan tradisi masing-masing. Di kerajaan Gowa Dewan Kerajaan semacam itu dikenal dengan *Batte Salapang*, sedangkan di kerajaan Bone dengan nama *Arung Pitue*.[3] Dewan Hadat dipimpin oleh seorang pejabat yang disebut *Raja Bicara* atau *Ruma Bicara*; dalam sumber-sumber VOC jabatan ini sering disebut *Raja Tureli Nggampo*, sedangkan pada masa kejayaan Islam di Bima disebut sebagai *Wazir al Muazam*. Raja Bicara dilantik oleh sultan dan dalam prateknya jabatan ini seringkali dipegang oleh keluarga terdekat sultan secara turun temurun, bahkan oleh saudara sultan yang sedang memerintah. Dalam sistim pemerintahan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan, khususnya di kerajaan Gowa jabatan serupa dikenal dengan nama Tomabicara, sedangkan di kerajaan Bone disebut To'marilaleng.[4] Mereka adalah ketua Dewan Hadat dan merupakan kerabat terdekat dari raja. Pejabat ini merupakan saluran penyampaian kehendak raja kepada rakyat, dalam penyelenggaraan pemerintah berfungsi sebagai pimpinan dewan pemerintah atau sebagai perdana menteri.

Sultan dalam pandangan masyarakat Bima masa lalu dianggap sebagai wakil Tuhan. Anggapan itu mengandung makna bahwa mentaati perintah raja atau sultan merupakan suatu kewajiban, sedangkan menentang terhadap perintahnya berarti menentang perintah Tuhan. Walaupun sultan dinyatakan sebagai penguasa tertinggi kerajaan, pada hakekatnya kekuasaan sultan masih dibatasai dan dikendalikan oleh ketentuan-ketentuan hadat. Sultan adalah tokoh sebagai pemegang amanat hadat: sejak pelantikannya ia dihormati dan dimuliakan sebagai pemegang *Ngusi kuasa hiasa ro guna*, ia memberikan keputusan perang, hukuman mati dan hubungan dengan dunia luar.[5] Namun sultan tidak dapat menggunakan kekuasaan tersebut sebelum dipertimbangkan oleh Majelis Hadat. Dengan demikian Dewan Hadat pada dasarnya adalah lembaga legislatif atau lembaga penasehat sultan dalam berbagai hal yang berkaitan dengan kenegaraan, baik politik ekonomi maupun sosial budaya.

Sultan diwajibkan di istana (Asi) karena istana merupakan pusat pengendalian kekuasaan, agama dan kebudayaan termasuk di dalamnya kesenian. Di istana itu pula Majelis Hadat mengadakan musyawarah,terutama pada tiga hari besar kerajaan yaitu Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha dan Maulud Nabi. Sultan bersama keluarga terdekatnya yang tinggal di istana terikat oleh ketentuan-ketentuan adat yang ketat. Mereka dilayani oleh para petugas istana dan biduanda-biduanda dijaga oleh petugas hadat dan diatur oleh petugas protokoler. Masyarakat di luar istana dapat berhubungan dengan sultan dan keluarganya hanya dalam urusan dinas, sultan hanya dapat ke luar istana dan berhubungan dengan orang luar bila diatur oleh petugas hadat. Segala urusan protokoler dipimpin oleh dua orang pejabat yang disebut Rato Parenta dan wakilnya Rato Ncandi. Untuk urusan pelayanan umum diatur oleh Bumi Sari-tunggu dan Bumi Ndora. Selain itu masih ada sejumlah pejabat yang berhubungan dengan kerumahtanggaan yaitu Bumi Preka, Bumi Daka-tau dan Bumi Roka. Bumi Preka adalah petugas yang membuat dan merawat pakaian sultan, Bumi Dakatau bertugas mempersiapkan makan sultan termasuk menjamu para tamu sedangkan Bumi Toka adalah petugas yang membersihkan berbagai macam senjata milik sultan seperti tombak, pedang dan sejumlah keris kerajaan.[6]

Sultan dipilih oleh Dewan Kerajaan berdasarkan garis laki-laki (garis ayah), namun tidak selalu anak tertua akan menggantikan ayahnya menjadi sultan. Demikian juga ibu yang melahirkan sultan atau calon tidak selalu dari keturunan asli bangsawan, artinya ia boleh saja merupakan keturunan dari kalangan rendahan. Bila sultan mangkat maka sebelum jenazahnya dimakamkan sultan pengganti harus segera dilantik. Pelatihan sultan dilakukan di pasar di depan istana pada suatu tempat yang disebut Amba Nea.[7] Jika sultan masih dibawah umur, maka pelaksanaan pemerintahan dilaksanakan perwalian yang bertindak atas nama sultan. Perwalian itu dapat saja dipegang oleh janda sultan yang baru wafat atau oleh salah seorang pejabat tinggi kerajaan yang ditunjuk oleh Dewan kerajaan dengan persetujuan pemerintah VOC atau Hindia Belanda.[8]

Di atas telah disinggung bahwa Dewan Hadat dipimpin oleh seorang Raja Bicara. Dewan ini beranggotakan 24 pejabat tinggi kerajaan dengan gelar Toreli, Jeneli dan Bumi. Toreli berjumlah 6 orang, yakni Toreli Belo, Toreli Donggo, Toreli Sakuru, Toreli Bolo, Toreli Waho dan Toreli Prado.[9] Pada kurun waktu tertentu Toreli tidak sampai berjumlah 6 orang. Menurut Couvreur organisai pemerintah kerajaan Bima erat kaitannya dengan Sulawesi Selatan. Raja Bicara dan Toreli sebenarnya merupaka nama atau gelar yang senapas, sebab Raja Bicara adalah Toreli, sedangkan Toreli adalah keluarga atau satu keturunan dengan Raja menurutnya, Sultan -Raja Bicara-Toreli adalah gelar atau sebutan yang sama atau setingkat dan mereka itu merupakan tiga elemen pembentukan pemerintahan kerajaan Bima.[10] Seperti halnya Toreli, Jeneli pun berjumlah 6 orang yakni; Jeneli Rasanae, Jeneli Sape, Jeneli Monta, Jeneli Bolo, Jeneli Woha dan Jeneli Prado.[11] Sebenarnya jumlah jeneli disesuaikan menurut banyaknya jumlah kejemelian karena pada hakekatnya para jeneli itu selain sebagai anggota Dewan Legislatif, ia adalah kepala eksekutif (kepala distrik) di wilayahnya masing-masing. Pada mulanya ada 3 distrik (Belo, Bolo dan Sape), kemudian berkembang menjadi 6, bahkan pada akhir abad ke 19--20 berkembang menjadi 10, dan terakhir menjadi 11. Wilayah kejenilian itulah yang sekarang menjadi wilayah kecamatan di kabupeten Daerah Tingkat II Bima. Meurut Couvreur, para Jeneli itu adalah *landsvorst* atau *landgroot*, yang di

Sulawesi Selatan sama dengan Karaeng atau *Maramba* di Sumba. Para Jeneli itu memiliki asal usul keturunan yang berbeda dengan sultan. Raja Bicara dan Toreli, sebab perkawinan antara laki-laki Toreli dengan wanita Jeneli atau sebaliknya tidak pernah terjadi.[12]

Adapun Bumi berjumlah 12 orang yakni Bumi Luma Rasanae, Bumi Luma Bolo, Bumi Sarimbojo, Bumi Gampo, Bumi Nata, Bumi Waworaddu, Bumi Baralau, Bumi Punci, Bumi Sabanta, Bumi Tente dan Bumi Lawiu. Ke-12 Bumi itu merupakan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Bumi Luma Rasanae dan Bumi Luma Bolo. Mereka bertugas mengadili dan memutuskan suatu perkara, tetapi jika terjadi perbedaan pendapat maka keputusan terakhir berada di tangan Raja Bicara. Semua perkara kejahatan yang besar disampaikan oleh kepala desa kepada GalarangNaE kemudian diteruskan ke Bumi Luma untuk diperiksa kemudian diputuskan. Hasil keputusan itu disampaikan kepada Raja Bicara untuk dikukuhkan. Ruma (Raja) Bicaralah yang berhak untuk menentukan jenis hukuman kepada tersangka apakah hukuman seumur hidup, diasingkan, dipenjarakan dengan memakai belenggu atau hukuman denda. Menurut Couvreur, Bumi berarti orang bijaksana dan gelar ini setingkat dengan para Jeneli karena pada kurun waktu tertentu jumlah mereka sama dengan jumlah Jeneli.[13] Dalam beberapa sumber gelar *Bumi* sering diganti dengan gelar *Rato*, misalnya Rato Rasanae sama dengan Bumi Luma Rasanae dan Rato Bolo sama dengan Buli Luma Bolo dan seterusnya.

Dalam menjalankan tugasnya para Tureli dan Jeneli dibantu oleh Para Bumi dengan susunan sebagai berikut :[14]

a). Toreli Belo dan Jeneli Rasanae dibantu oleh Bumi Sarimbojo, Bumi Nggampo dan Bumi Nata,

b). Toreli Donggu dan Jeneli Sape dibantu oleh Bumi Cenggu dan Bumi Waworaddu;

c). Toreli Sakuru dan Jeneli Monta dibantu oleh Bumi Baralau;

d). Toreli dan Jeneli Bolo dibantu oleh Bumi Punti dan Bumi Sambanta;

e). Toreli dan Jenoli dibantu oleh Bumi Tento; dan

f). Toreli dan Jeneli Prado dibantu oleh Bumi Lawiu.

Para Toreli, Jeneli dan Bumi ini secara bersama-sama dan kolegial merupakan (membentuk) Dewan Kerajaan (Hadat) bertugas berkenaan dengan semua urusan pemerintahan. Mereka bersama-sama dengan sultan mempunyai kekuasaan untuk memecat dan menetapkan bahkan untuk menyatakan perang. Mereka juga bertanggungjawab untuk menjaga hubungan baik dengan pemerintah Belanda maupun dengan kerajaan-kerajaan tetangganya. Raja Bicara adalah jabatan yang tertinggi dan penguasa negara karena dalam perakteknya dialah yang menjalankan roda pemerintahan kerajaan. Raja Bicara berhak menandatangani perjanjian atau kontrak-kontrak dengan penguasa VOC atau pemerintah Hindia Belanda sebagai wakil atau atas nama sultan. Suatu keputusan atau ketetapan negara belum dapat dilaksanakan sebelum diperkuat oleh Raja Bicara dan hanya dalam hal-hal yang penting sekali keputusan harus ditetapkan oleh sultan sendiri.

Menurut Braam Morris, para Toreli sebenarnya adalah pembesar kerajaan atau mantri tinggi, sedangkan Jeneli ada dilapis kedua, dan Bumi adalah mantri biasa.[15] Toreli dan Jeneli dipilih oleh kepala-kepala kampung yang menjadi bawahannya dan bertugas sebagai perwakilan (semacam dewan perwakilan rakyat), sedangkan Bumi bertugas di bidang pengadilan. Toreli Belo dan Toreli Wohan Jeneli Rasanae dan Jeneli Woha dipilih oleh kepala-kepala kampung dari distrik Belo; Toreli Donggo dan Jeneli Sape dipilih oleh kepala-kepala kampung dari distrik Wera dan Sape, Toreli Sakuru dan Jeneli Monta dipilih oleh kepala-kepala kampung dari distrik Donggo, Toreli dan Jeneli Bolo dipilih oleh kepada-kepala dari distrik Bolo dan Toreli dan Jeneli dipilih oleh kepala-kepala dari Prado, Krumbu dan Donggule.[16]

Tanggungjawab kepolisian diserahkan kepada Bumi Renda. Dalam menjalankan tugasnya Bumi Ronda dibantu oleh para Anangguru; Mbojo, Wera, Mboda Nae, Satutu Donggo, Bicara Kae, Bumi Sumpi Mbojo dan Bumi Sumpi-sumpi Bolo, serta Kapitan (g) dan Lutanang (letnan). Dua yang terakhir sebagai pimpinan pasukan bersenjata.[17]

Panggilan menghadap pengadilan dan seluruh eksekusi pelaksanaan keputusan pengadilan adalah tugas Bumi Ronda. Selain itu dalam keadaan perang Bumi Renda adalah panglima perang sehingga seluruh urusan peperangan diserahkan pada kebijaksanaan Bumi Renda. Untuk urusan luar negeri ada tiga orang Bumi diperbantukan pada pemerintah tertinggi kerajaan, yaitu Bumi Prisi Mbojo, Bumi Prisi Bolo, dan Bumi Prisi Kae. Mereka bertugas sebagai penghubung orang-orang luar negeri (asing) termasuk untuk urusan dengan Gubernemen Hindia Belanda. Mereka jugalah yang menjadi utusan raja dan Majelis Kerajaan dan merupakan orang-orang kepercayaan dengan tugas sebagai juru bahasa dan juru bicara. Bumi Prisi Mbojo mempunyai pengaruh yang besar terhadap raja dan pembesar kerajaan, tidak hanya dalam pengambilan keputusan, juga dalam nasehatnya. Selain sebagai anggota Dewan Kerajaan (Hadat) Tureli Bolo diberikan tugas tambahan sebagai kepala pelabuhan atau Syahbandar.[18]

Di bawah para Bumi ada Galarang Kepala, yaitu Galarang Kepala Belo, Bolo dan Sape, kemudian ada Galarang (Kepala Desa), para Lebe (lebai), para Cepeweki (wakil), para Domo Dou (kepala lingkungan kecil), dan para Dalu (Kepala) dari berbagai kampung. Galarang kepala Belo, Bolo dan Sape disebut Ompu Nae (ompu = kakek, nae = besar). Meskipun kemudian Belo, Bolo dan Sape menjadi distrik dibawah pimpinan Jeneli, mereka tetap ada dan menjadi semacam lembaga adat yang masih berfungsi sampai periode sultan terakhir. (1915--1951).

Para Galarang ini dipilih oleh penduduk kampung yang bersangkutan dan jabatannya ditetapkan oleh Raja Bicara melalui prosedur sebagai berikut. Hasil pemelihan dilaporkan oleh Galarang Kepala yang bersangkutan kepada Bumi Luma Rasanae atau Bumi Luma Bolo, sesuai dengan wilayah masing-masing. Selanjutnya Bumi Luma melaporkan kepada Raja Bicara sebagai ketua Dewan Hadat yang kemudian mengangkat dan menetapkan Galarang terpilih. Para Galarang Kepala dipilih oleh kepala-kepala kampung bawahannya dan melalui Bumi Luma kemudian ditetapkan oleh Raja Bicara dengan syarat bahwa ada persetujuan dari sultan.

Di wilayah Flores Barat (Manggarai) sistim pemerintahan hampir sama dengan di Bima, setiap daerah (landschap) dipimpin oleh seorang Naib yang bertindak sebagai wakil sultan di wilayahnya. Menurut Colhaas,[20] selain Naib (Raja Naib) masih ada Raja Bicara, 5 orang Ratu, yaitu ; Ratu Tua Bumi Rube, Ratu Bumi Sarengngembe, Ratu Bumi Langawu, Ratu Bumi Sarinjaya dan Ratu Bumi Langgara, seorang Ana' Guru Sape, seorang Syahbandar dan seorang Bumi Perissi. Selain itu masih ada kepala-kepala distrik, Dalu atau kepala rendahan kemudian kepala-kepala kampung. Untuk pemukiman orang-orang pendatang seperti Bima, Makasar, Bugis, Selayar dan Bone di ibukota Reo dikepalai oleh Galarang.

Syarak Tanah Bima (Sara Dana Mbojo) terdiri dari Khalif, para Imam, para Khatib, para Lebe, Para Bilal dan para Robo. [21] Mereka termasuk kelompok *Dari Ngaji* dan berada dibawah pengawasan Khalif yang bergelar Anagguru Mangaji (kepala kerokhanian). Pada kurun waktu tertentu adakalanya fungsi Khalif ditiadakan dan dirangkap oleh Raja Bicara atau Sultan. Tugas-tugas keagamaan ini meliputi memelihara ketaatan terhadap ajaran Islam dan memelihara masjid-masjid. Selain itu tugas Syarak meliputi urusan perceraian, perkawinan, perzinahan dan pewarisan.[22] Untuk penyelesaian masalah warisan dikenakan biaya pengadilan sebesar 10 persen. Dalam masalah perzinahan (termasuk incest) Bumi Luma duduk sebagai anggota Lembaga Syarak karena masalah tersebut termasuk dalam tindak pidana kriminal.

Seperti telah dijelaskan di atas, semua urusan dan administrasi pengadilan ditangani oleh para Bumi. Semua tindak kejahatan dan perkara sipil (pidana dan perdata)yang disampaikan oleh kepala-kepala desa atau galarang harus sepengetahuan Bumi Luma. Merekalah yang memeriksa dan kemudian mendiskusikannya dengan para Bumi yag lain. Hukuman yang dijatuhkan bermacam-macam yaitu hukuman mati, pembuangan, pengasingan dalam penjara (kurungan) dan pembayaran denda. Hukuman mati dijatuhkan pada mereka yang melakakukan pembunuhan, melakukan pelanggaran susila di dalam istana dan melakukan pencurian di istana (keraton) yang mendatangkan kerugian. Pencurian biasanya dihukum penjara, sedangkan penganiayaan, perkelahian dan sejenisnya biasanya

dikenakan hukuman denda. serendah-rendahnya berjumlah 4 real dan setinggi-tingginya 160 real. Bila terjadi perzinahan antara dua bersaudara (incest), keduanya dibuang ke Gunung Api (pulau Sangeang) atau ke pulau Komodo, demikian pula kepada para pembangkang terhadap kekuasaan pemerintah atau kepada seorang pangeran atau tokoh ternama lainnya yang bersalah. Hukuman mati biasanya dilakukan dengan keris, ditenggelamkan atau dilempar dengan batu sampai mati (direjam). Kepala-kepala kampung diberi wewenang memutuskan perkara-perkara kecil yang dikenakan hukuman denda sebesar 4 real, sedangkan perkara-perkara yang dihukum dengan denda besar (tinggi) menjadi wewenang para Bumi. Hukuman denda tertinggi (160 real) hanya dapat ditetapkan (dikenakan) oleh sultan atau oleh pejabat tinggi kerajaan. Perkara-perkara sipil dengan hukuman denda sebesar 8 real menjadi wewenang kepala kampung setempat, sedangkan perkara sipil dengan hukum denda 20 real menjadi wewenang para kepala Galarang. Di Flores semua urusan pengeliatan ada ditangan para naib dan para dalu.[231]

Pendapatan (penghasilan) para birokrat kerajaan diperoleh sebagai berikut : Raja atau sultan mendapatkan 3 % dari jumlah pamasukan dan pengeluaran barang atau sekitar f 4.000 setiap tahumnya Pendapatan ini ditambah dengan hasil sarang burung sebanyak 3 pikul seharga f 4.500; hasil dari ternak kuda di Lambu, Kangga Pai, Poja, Wera, Sangeang dan Sai yang diperkirakan berjumlah f 1.000 setiap tahun; hasil penjualan kayu sapan, hasil penggadian opium sebesar f 500 setiap tahun; hasil dari tanah hadat sebesar 100.000 ikat padi atau 1250 pikul beras; hasil atau penyerahan dalam bentuk natura produksi tanah pertanian yang disebut *angge-adda*; pajak tanah pertanian dari rakyat besarnya 2 gulden; pajak bangunan dan rumah baru sebesar 4 real; pajak atau pembayaran yang diserahkan oleh rakyat antara lain 3 ekor dari 50--60 ekor setiap tahun, 1 real dari harga penjualan setiap ekor kerbau yang dikenal dengan nama *sage sura*; hasil uang yang dikumpulkan setiap tahun dari berbagai distrik dan setiap distrik diperkirakan berjumlah 50 sampai 60 real yang dikenal dengan nama *mussa-sura*. Kemudian dari Manggarai pada setiap tiga tahun hijau, katun, dan budak yang

jumlahnya diperkirakan bernilai sekitar f 500: uang denda (hukuman denda) yang jumlahnya diatas 80 real.[25]

Untuk pejabat tinggi kerajaan penghasilan diperoleh dari hasil tanah hadat. (*ornamentspadivelden*) ditambah dengan : sebagian biaya pengadilan yang berjumlah 10% untuk perkara-perkara sipil: sebagian dari denda dibawah 80 real; sebagian dari hasil kayu sapan; 10--15 real, dari massasura yang berasal dari setiap distrik; 4 real dari setiap rumah atau bangunan; penyerahan produksi pertanian dari rakyat dalam bentuk in natura; kemudian, sebagian dari kebutuhan sehari-hari harus disediakan (dipenuhi) oleh rakyat.[26]

Penghasilan para Toreli dari para Jeneli diambil dari tanah hadat, produksi pertanian yang diserahkan oleh rakyat dalam bentuk natura; sebagain dari uang denda dibawah 80 real, 1 real dari pajak rumah dan bangunan. Untuk para Bumi, selain dari tanah hadat juga dari uang denda dibawah 80 real, sebagian dari biaya perkara sipil; produksi pertanian dalam bentuk in natura dari rakyat dan pajak rumah dan bangunan sebesar 1/2 real.[27]

Penghasilan para kepala distrik dan para kepala kampung selain diperoleh dari hasil tanah hadat, juga dari samua uang denda yang besarnya dibawah 4 real, biaya pengadilan sipil yang besarnya dari 8 sampai 20 real, 1/4 gulden dari pajak rumah dan bangunan, pajak hutan (boschrechten) untuk izin pengambilan kayu dan produksi hutan. Selain itu rakyat diwajibkan untuk membangun dan memperbaiki rumah tinggal, tidak hanya rumah tinggal (istana) sultan, dan rumah para pejabat tinggi kerajaan, juga rumah tinggal para pejabat rendahan dan para pangeran (bangsawan) alinnya.[28]

4.2 Penetrasi VOC

Telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa kontak pertama antara Bima dengan orang-orang Belanda telah dimulai sejak awal abad ke-17, ketika terjadi perjanjian lisan antara raja Bima, Sarise atau raja Salisi dengan orang Belanda bernama Steven van Hagen pada tahun 1605. Dalam sumber lokal perjanjian ini dikenal sebagai Sumpa Ncake.[29] Isi perjanjian tersebut sampai sekarang belum

diketahui, namun pada masa-masa berikutnya tampak telah terjalin hubungan dagang antara Bima dengan VOC yang berpusat di Batavia. Dalam catatan harian VOC atau Dagh-register disebutkan bahwa VOC mengirim kapal-kapalnya ke Bima untuk membeli beras dan komoditi lainnya.[10]

Secara politis hubungan Bima dengan VOC mulai berlangsung dengan ditandatanganinya perjanjian 8 Desember 1669 dengan Admiral Speelman. Perjanjian ini merupakan kontrak pertama dengan VOC sebagai akibat keikutsertaan sultan Bima, Abdul Khair Sirajuddin membantu kerajaan Gowa memerangi Belanda. Karena kalah perang, Sultan Hasanudin terpaksa menandatangani perjanjian dengan Belanda pada tahun 1667, yang dikenal sebagai *Perjanjian Bongaya*. Isi perjanjian itu antara lain memisahkan kerajaan Bima dengan kerajaan Gowa agar tidak saling berhubungan dan saling membantu. Dalam kontrak tahun 1669 Bima memberikan terobosan kepada kompeni untuk berdagang di Bima dan raja atau sultan tidak boleh meminta atau manarik cukai pelabuhan terhadap kapal dan barang-barang kompeni yaag keluar masuk pelabuhan.[11] Setiap terjadi pergantian raja atau sultan kontrak baru pun dibuat yang tujuannnya selain untuk memperbaharui dan memperkuat kontrak-kontrak sebelumnya, juga secara perlahan-lahan kompeni bermaksud untuk menempatkan Bima dan kerajaan-kerajaan lain di pulau Sumbawa di bawah kekuasaannya. Selain itu pertikaian antara elit penguasa di pulau Sumbawa, baik yang sengaja direkayasa oleh kompeni atau bukan pada dasarnya memberikan peluang yang besar kepada VOC untuk memperluas pengaruh serta kekuasaannya di wilayah itu. Untuk mewujutkan keinginannya, VOC kemudian mengadakan pendekatan melalui pembuatan kontrak atau perjanjian secara paksa. Sebagai contoh pada tanggal 9 Pebruari 1765 VOC mengadakan perjanjian secara kolektif dengan kerajaan-kerajaan di pulau Sumbawa yaitu : Bima, Sanggar, Dompu, Tambora, Pekat dan Sumbawa. Cornelis Sinkelaar Gubernur VOC bersepakat dengan Abdul Kadim Raja Bima, Datu Jerewe raja Sumbawa, Ahmad Alaudin Juhain Raja Dompu, Abdul Said Raja Tambora, Muhammad Ja Hoatang Raja Sanggar dan Abdul Rachman Raja Pekat, untuk secara bersama-sama dengan VOC memelihara ketenteraman, bersahabat baik dan mengadakan

persekutuan dengan VOC.[32] Dalam pasal 1 kontrak tersebut di nyatakan bahwa raja-raja di pulau Sumbawa baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berjanji akan terus momatuhi kontrak yang pernah dibuat sebelumnya, demikian juga prosedur-prosedur dari masa yang berbeda-beda yang telah dibuat dengan VOC masih berlaku dan akan terus dipatuhi. Pada tahun 1675 VOC diizinkan untuk mendirikan posnya di Bima. Perjanjian itu diperbaharui lagi pada tahun 1701 dan sejak itu secara resmi VOC hadir di Bima. Mula-mula ditempatkan seorang dengan jabatan Koopman atau Onderkoopman, kemudian seorang residen dan akhirnya seorang Komandan. Pada tahun 1708 J. Happon ditunjuk sebagai residen yang pertama, namun pada tahun 1771 jabatan residen digantikan oleh jabatan komandan sampai tahun 1801.[33]

Dalam kontrak disebutkan pula bahwa perjanjian itu dibuat dalam rangka persahabatan dan persekutuan yang abadi didasarkan atas ketulusan, kepercayaan dan kejujuran. Dan sebagai konsekwensi dari kontrak-kontrak itu, kerajaan-kerajaan di pulau Sumbawa tidak boleh (dilarang) mengadakan hubungan (politik maupun dagang) dengan daerah-daerah lain, dengan bangsa Eropa lain atau dengan seseorang kecuali dengan persetujuan dan izin VOC. Meskipun demikian berkaitan dengan penempatan residen di Bima, harus dengan persetujuan kerajaan Bima dan sepengetahuan gubernur dan Dewan Hindia di Makasar.

Akibat lain dari perjanjian ini ialah semua hubungan dengan orang-orang Makassar di daerah ini harus diputuskan. Bagi VOC orang-orang Makassar adalah para pengacau dan penyulut kekacauan karena hubungan Sumbawa dengan Makassar telah berjalan lama. Pada tahun 1695 telah terjadi pelarian orang-orang Makasar dalam jumlah besar ke daerah Manggarai. Bahkan perpindahan orang-orang Makasar itu telah berlangsung sejak 1669, setelah kerajaan Gowa ditaklukan VOC dan ditandatanganinya perjanjian Bongaya pada tahun 1667. Pada tahun 1701 orang-orang Makasar berhasil diusir dari Manggarai, namun ternyata hubungan antara Bima dengan Makasar tidak dapat diputuskan dengan cara-cara kekerasan seperti itu, karena hubungan Bima dengan Makasar tidak semata-mata bersifat politik dan ekonomi (dagang), tapi juga hubungan keluarga melalui perkawinan antara

elit penguasa Bima dengan putri bangsawan Gowa. Pada tahun 1759 orang-orang Makasar menyerang Manggarai dan menduduki daerah itu. Tetapi mereka tidak dapat bertahan lama karena pada tahun 1762 dengan bantuan VOC, Bima dapat menguasai kembali daerah Manggarai. Usaha Gowa untuk mencoba menguasai Manggarai tetap dilakukan misalnya pada tahun 1822 dengan cara menarik pajak, namun tidak berhasil.

Pasal 5 perjanjian tahun 1765 menyebutkan bahwa hanya VOC yang berhak berhubungan dengan semua kerajaan di daerah itu (Sumbawa). Bangsa-bangsa Eropa(selain Belanda) tidak boleh berdagang di Bima, tidak terkecuali orang-orang Moor, Jawa, Sasak, Melayu atau Aceh, Siam kecuali mendapat izin dan persetujuan dari VOC. Jika hal itu tidak dipatuhi maka barang-barang dagangan mereka akan dirampas dan raja-raja di daerah itu (dipulau Sumbawa) harus membantu VOC dalam kegiatan itu. Setiap kapal atau kapal-kapal VOC yang kecelakaan terdampar di wilayah perairan kerajaan-kerajaan di Sumbawa, maka raja bersama rakyatnya harus membantu menyelamatkan kapal dan mengamankan barang-barang milik kompeni.

Dalam pasal 6 dinyatakan bahwa semua raja di Sumbawa, juga orang orang Eropa dan orang-orang Indonesia lainnya tidak diperbolehkan untuk mengangkut atau memindahkan segala sesuatu yang berkaitan dengan hal ihwal perdagangan (koopmanschappen) dari daerah itu atau membawa dari dan keluar atau oleh orang asing yang berdiam di dekat daerah itu, kecuali mendapat izin dari Kompeni. Khusus untuk sapan hout (kayu sapan), penyu dan agar-agar, kompeni telah menetapkan harga untuk setiap tahunnya. Pada waktu sebelumnya barang-barang itu banyak yang dikirim ke Makasar, maka diputuskan bahwa sejak itu tidak seorangpun dapat membawa barang itu keluar dari Sumbawa. Dalam pasal itu dijelaskan pula bahwa kerajaan-kerajaan di Sumbawa tidak diperbolehkan menarik pajak berkaitan dengan ekspor dan impor barang, karena hal itu merupakan kewenangan kompeni.

Dalam pasal 10 dinyatakan bahwa kompeni akan berkedudukan bebas di seluruh daerah (wilayah) dan tempat untuk membangun loji,

termasuk juga dalam hal pemesanan bahan-bahan bangunannya. Kepada penduduk diharuskan mengumpulkan bata atau batu atau raja-raja menugaskan rakyatnya untuk mengikis gunung batu dimana untuk keperluan pekerjaan itu komponi akan membayar upah yang pantas.

Sebagai konsekwensi dari kontrak persahabatan maka pasal 12 mengatakan bahwa suatu hal yang harus dipegang teguh bahwa musuh kerajaan juga musuh VOC, begitu juga sahabat kerajaan merupakan sahabat VOC; untuk itu keduanya harus saling membantu. Untuk membatasi keleluasaan kerajaan-kerajaan di Sumbawa, VOC menegaskan sebagai terbaca pada pasal 13, melarang raja-raja dari setiap daerah untuk mendirikan benteng atau tempat-tempat pertahanan kecuali sepengetahuan VOC. Dipihak lain VOC nampaknya bermaksud menjadi pelindung karajaan-kerajaan di Sumbawa terhadap serangan musuh. Kompeni berjanji akan tetap membantu dan melindungi terhadap semua paksaan dan gangguan dari luar oleh kawanan bajak laut orang-orang Indonesia.

Apabila terjadi perselisihan antara raja-raja di pulau Sumbawa yang dapat mengarah kepada peperangang kompeni berani mengambil resiko untuk bertindak sebagai penengah yang menganjurkan agar kedua belah pihak membawa perkara mereka kepada Gubernur dan Dewan Hindia yang mempunyai hak dan weweuang untuk mendamaikan. Dan untuk memperoleh keuntungan dan persaudaraan ditegaskan bahwa serangan salah satu dari kerajaan (dari pihak-pihak yang berselisih) sesudah aturan perdamaian tidak diindahkan, maka raja yang lain menjadi hina.

Dalam pasal 19 disebutkan bahwa Akaudin alias Datu Jerewe, Raja Sumbawa yang syah dengan para pembesar kerajaan telah berhutang jasa kepada kompeni karena telah membantu Sumbawa dalam mengatasi peperangan yang terjadi di wilayahnya, dengan mengirim ekpedisi untuk menghalau orang-orang Bali dan para pemberontak. Untuk itu Pangeran Taliwang akan membayar dengan uang, kayu sapan atau dengan budak sesuai dengan apa yang telah diungkapkan dapal pasal 12. Dalam pasal 20 ditegaskan bahwa untuk memperoleh ketenangan di negerinya, Raja Dompu akan menetapkan saudaranya sendiris Abdul Kadir sebagai Turehe Hu (gelar pembesar

kerajaan Dompo) dan akan mengembalikan semua yang muncul akibat kekacauan dalam wilayah yang didudukinya sendiri; dinyatakan pula bahwa semua kejadian atau peristiwa yang dahulu telah berlalu tidak akan diingat lagi. bahkan persahabatan mereka akan terus ditegakkan.

Namun demikian suatu hal yang dirasa aneh karena yang menandatangani kontrak itu hanya dari pihak pemerintah kompeni saja yakni : Cornelis Sinkelar, ES Jb Beijnon, Jn, B Dela-Houtenmaisen. Ms Peters, Fk Wm Hk van Blijdenberg, Jn HK Voll., Aij Ravensber, Jn Cn Cruijtpenning dan J. Bleeke, yang diundangkan dan ditetapkan oleh Gubernur dan sekretaris Js Bleeke.

Kontrak berikut yang ditandatangani pada 26 Mei 1972 merupakan perjanjian khusus antara VOC dengan sultan Bima. Dalam kontrak itu dinyatakan mengenai pergantian sultan Abdul Kadim yang karena wafat kemudian digantikan oleh putranya bernama Abdul Hamid Muhammad Syah Zillullahi Fil Alam. Dari sini nampak sekali bahwa kekuasaan VOC amat kuat karena VOC ikut menentukan suksesi kerajaan dan meneguhkan sultan baru. Bahkan Sultan Hamid di lantik di Makasar oleh Gubernur VOC. Disamping itu kontrak tersebut memperkuat isi kontrak yang telah dibuat antara kedua belah pihak pada tahun 1765. Lebih dari itu sultan juga menambahkan bahwa ia bersedia dan akan mematuhi jika ada hal-hal yang akan ditambahkan atau dikurangi dalam isi perjanjian terdahulu.[34]

Catatan

1) S.Hamzah, "Menilai kembali Jatidiri", *Bali Post*, 27 September 1989.

2) M. A. Bouman, "*Toeharlanti : De Bimanesche Sultansverhefing*", *Kolonial Tijdschrift*, 14, 1925 : 710--717

3) Mukhlis P. (dkk.), *Sejarah Kebudayaan Sulawesi*. Departemen Pendidikan dan kebudayaan, Direktorat jendral kebudayaan Direktorat sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek IDSN. 1995: 53.

4) *Ibid.* hal. 55.

5) S.Hamzah, *op. cit.*

6) D.F.van Braam Morris, "Nota van Toelichting Behoorende bij het Contract gesloten met het landschap Bima op den 20 sten October aan de Regeering ingediend doorden Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden," *TBG* XXXV, 1890: 215.

7) *Ibid.* 213

8) *Loc.cit.*

9) D.F.van Braam Morris, *op.cit.*: 116

10) A.Couvreur, "Aanteekeningen nopens de Samenstelling van het Zelfbestuurder van Bima", *TBB*, 522 1917: 6

11) D.F.van Braam Morris, *op.cit.*: 116

12). A.Couvreur, *op. cit.*: 9

13) *Ibid.* 11

14) D.F.van Braam Morris, *op.cit.* : 217; Sri Wulan Rudjiati Mulyadi (editor). *Bandar Bima.* Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Jendral Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional. Bagian Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara 1992/1993: 71.

15) *Ibid,* 217.

16) *Loc.cit.*

17) *Ibid,* 218.

18) *Loc.cit.*

19) *Ibid,* 219.

20) W.Ph. Colhaas, "*Bijdrage tot de kennis van het Manggaraische Volk* (West-Flores)". *TNAG*, 59, 1942 : 170.

21) Mungkin yang dimaksud dengan *Robo* adalah *Marboth.* yakni petugas yang menjaga dan membersihkan mesjid.

22) D.F.van Braam Morris, *op.cit.*: 220.

23) *Ibid,* 221.

24) *Ibid,* 222. Tanah hadat itu terdapat di Sape, Dolohiu, Wera Sonto, Tonggorisa dan Lanta, yang secara khusus dibawah pengawasan para pejabat : Jena Luma Mbojo, Jena Luma Bolo, Jena Mone-nae dan Bata dadi.

25) *Loc.cit.*

26) *Ibid,* 223.

27) *Loc.cit.*

28) *Ibid,* 224

29) L. Massir Abdullah, *Bo (Suatu Himpunan Catatan Kuno Daerah Bima*). Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Proyek Pengembangan Permuseuman Nusa Tenggara Barat, 1981/1982 : 22--23;D. F. van Braam Morris, " Nota van

Toelichting Behoerende bij het Contract gesloten met het landschap Bima op den 20 sten October. aan de Regeering ingediend door den Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden", *TBG* XXXV, 1890 : 200.

30). J. Noorduyn, "Makasar and The Islamization of Bima", *BKI*,142, 1987: 330;, Dighregister 1631--1634: 140; 174.

31). Sri Wulan Rudjiati Mulyadi (editor) *Bandar Bima.* Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Ditjen Kebudayaan Direktorat Jarahnitra, Bagian Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara, 1992/1993: 20--24.

32). J. Noorduyn, "Bima en Soembawa, Bijdragen tot de Geschiedenis van de Sultanaten Bima en Sumbawa door A.Ligtvoet en G.P.Rouffaer", *VKI*, 129, Foris Publications Dordrecht Holland/ Providense - USA, 1987 : 125--130

33). J.E.Jasper, "Het eiland Soembawa en zijn bevolking", *TBB*, 34 1908: 72--73.

34). Henri, Chambert-Loir, *Naskah dan Dokumen Nusantara III, Syair* Kerajaan Bima. EFEO, Jakarta-Bandung, 1982 : 215--216.

BAB V

KESULTANAN BIMA DALAM ABAD KE-19

5.1 Pemerintahan

Seperti halnya Sumbawa, di Kesultanan Bima pada abad ke 19 struktur birokrasi tidak ada perubahan yang menonjol, raja bergelar sultan dan berada di puncak hirarki kekuasaan. Ia didampingi oleh sebuah Dewan Hadat yang dipimpin oleh Raja Bicara atau Ruma Bicara sebagai mangkubumi. Sultan dipilih oleh Dewan Hadat atas dasar keturunan dinasti sang Bima.[1]

Tetapi pada pelaksanaannya Kesultanan Bima tidak diikat oleh suatu hukum administrasi kesultanan yang tertulis. Hukum itu hanya menampakkan diri dalam bentuk tata kerja yang mengikat pelaksanaan tugas majelis "hadat" dan majelis hukum. Pelaksanaan lembaga "hadat" dan "hukum" masing-masing dinamakan "syara-syara" dan "syara hukum". Pengertian syara-syara berarti keseluruhan tugas pokok majelis "hadat" dalam menyelenggarakan pemerintahan kesultanan.[2]

Dewan Hadat - Syara Bima yang diketuai mangkubumi Raja Bicara beranggotakan 24 orang dengan gelar-gelar Tureli, Jenelli, dan Bumi. Tureli berjumlah enam orang; Tureli Belo, Tureli Danggo, Tureli Sekutu, Tureli Bulo, Tureli Woha dan Tureli Parado juga Jenelli berjumlah enam orang: Jenelli Woha, dan Jenelli Parado dan lain-lain,

Bumi berjumlah 12 orang di antaranya Bumi Luma Resa Nae, Bumi Luma Bolo: Bumi Sari Mbojo dan lain-lain.[3] Kesemuanya membentuk Dewan kerajaan (Rijksraad) yang mempertimbangkan dan memutuskan segala perkara penting yang berhubungan dengan negara.

Adapun syara terdiri dari Kali (kadi) Imam, Khatib, Lebe, Bilal dan Robo. Jabatan-jabatan tersebut terdapat disetiap daerah kesultanan terkecuali seorang "Kali" berada di ibukota Bima. Dewan Hadat - Syara ini menggambarkan pembagian tugas antara urusan dunia dan akhirat. Semua petugas agama harus menjaga pelaksanaan ajaran Islam sambil memelihara tempat-tempat beribadat seperti masjid atau langgar.

Gambaran mengenai struktur politik dan organisasi sosial tradisional di Bima selain diberikan oleh Zollinger (1847), juga dilengkapi oleh Gubernur Celebes D.F. Van Braam Morris (1886). Ketika Zollinger datang ke Bima tahun 1847 yang memerintah di Bima ialah Sultan Ismail (1819--1854). Pada masa pemerintahan Sultan Ismail, administrasi pemerintahan sesudah tahun 1815, afdeeling Bima terbagi atas empat landscjap itu Sumbawa, Bima, Dompu dan Sanggar. Keempat landschap itu ditempatkan dibawah *Celebes en Onderhoorigheden*. Pemerintahan tidak langsung (*indirect rule*) ini adalah khas pemerintahan kolonial di luar Jawa. Dengan cara ini Belanda membiarkan adanya *dualisme* dalam struktur politik pemerintahan kolonial. Disatu pihak Belanda mulai memasukan birokrasi sarat dalam sistim pemerintahan kolonial, sedangkan di lain pihak sistim politik tradisional tetap dipertahankan untuk sementara waktu.[4]

Mengenai pelapisan masyarakat, di Bima ada tiga "kelas" yakni bangsawan (*de-adel*), kelas menengah (*middel-stand*) dan *pandelingen*, yang termasuk "kelas" pertama ialah sultan, pangeran dan keluarga sultan serta sejumlah besar pembesar-pembesar tinggi dan terkemuka kesultanan (*ruma ro rato*); kelas kedua sejumlah kepala-kepala yang lebih rendah, golongan agama dan penduduk kampung yang merdeka. Mereka ini merupakan mayoritas rakyat. Kemudian "kelas" ketiga ialah orang-orang yang tergadai (pandelingen). Yang terakhir ini semula adalah orang-orang yang

pernah melakukan kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya yang dikenakan denda. Dengan alasan ini mereka harus bekerja sebagai budak.[5]

Para sultan dan Dewan Hadat juga merupakan homo economicus yang mempunyai peranan penting dalan bidang-bidang ekonomi dan sosial atas dasar kuasa politik yang mereka warisi secara turun temurun. Peran dan kekuasaan ini saling menunjang sehubungan dengan kegiatan-kegiatan dagang pada abad-abad sebelumnya dengan pemerintahan kolonial atau sesudahnya dengan Maluku, Sulawesi, Kalimantan, Jawa dan Singapura. Sultan-sultan dengan para aristokratnya menjadi pedagang hasil bumi dan ternak yang diangkut dengan kapal atau perahu.[6] Sehingga struktural kerajaan-kerajaan Bima menjadi dinamis dalam kegiatan sosial ekonomi antar pulau, konflik-konflik yang semakin melemahkan posisi kuasa politik dan sosial ekonomi para sultan dan para aristoktratnya, cara-cara akomodasi yang terpaksa ditempuh dalam menghadapi kekuasaan kolonial Belanda ini yang meningkatkan sistem birokrasinya.

Masa Pemerintahan Sultan Ismail (1819--1854)

Sultan Ismail adalah putra Sultan Abdul Hamid dilahirkan pada tanggal 1 Zulhijjah 1211 H. (1795 M). Dilantik menjadi sultan pada tanggal 8 Safar 1235 H. (26 September 1819 M). Wafat pada tahun 1854 dan setelah wafat diberi gelar Ma Wa'a Alu, karena beliau berbudi luhur dan bersikap sopan santun.

Pada masa pemerintahan Sultan Ismail, Kesultanan Bima baru saja terlepas dari kemiskinan dan kelaparan akibat meletusnya Gunung Tambora (1815), adanya serangan bajak laut dan musim kemarau panjang. Sultan Ismail bersama Raja Bicara Muhammad Yacub Kapenta Wadu berusaha keras untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Antara lain dengan meningkatkan kembali kestabilan ekonomi yang pernah goncang akibat meletusnya Gunung Tambora dengan memperbaiki bidang perdagangan bebas dalam dan luar negeri dengan harga yang memadai. Selain memajukan perdagangan, sultan bersama Ruma Bicara melaksanakan pembangunan dalam bidang pertanian dan peternakan. Akibat letusan Gunung Tambora juga

berdampak bagi perikanan laut, sehingga area tambak dan empang diperbaiki dan diperluas. Bidang pertahanan dan keamanan juga ditingkatkan, terutama dalam menghadapi tentara Belanda, baik angkatan laut dan angkatan daratnya. Untuk menjaga keamanan laut, diubahakan pula peningkatan kemampuan dan panyempurnaan armada laut baik dari segi personilnya maupun struktur organisasinya.

Didalam kesatuan angkatan laut Bima terdapat pula pelaut-pelaut dari Makassar dan dari Ternate, Tidore yang menggabungkan diri dengan sukarela. Dengan demikian Angkatan Laut Bima merupakan gabungan dari lasykar Bima bersama pelaut-pelaut Makassar, Ternate dan Tidore yang dipimpin oleh seorang perwira yang disebut *Bumi Pabise*.

Sultan Ismail juga berusaha meningkatkan kesadaran cinta tanah air dan agama dikalangan masyarakat, sehingga muncul patriotisme yang tinggi Jiwa patriotisme itu dihidupsuburkan melalui kesenian yang bernafaskan Islam, seperti Kanja, Sere, Soka, Bela Leha, Kande, Patu/Dali, Mpisi dan Kalero Donggo. Berkat kerja keras Sultan Ismail yang didampingi Ruma Bicara, akhirnya bencana akibat meletusnya Gunung Tambora dapat ditanggulangi, sehingga kesultanan Bima menjadi lebih maju dan disegani oleh Belanda.[7] Namun demikian pihak Belanda tetap ingin menguasai Kesultanan Bima dengan berbagai cara. Pada tahun 1820 Belanda mengirim utusan yang beragama Islam keturunan Arab, Kkhojah Ibrahim menemui Sultan Ismail. Utusan itu berhasil mempengaruhi Sultan sehingga menyatakan kesediaannya untuk membantu kelancaran monopoli Belanda. Keberhasilan utusan itu kemudian memberikan peluang kepada Belanda untuk mengikat Bima dalam perdagangan karena beberapa saat setelah itu Belanda berhasil memaksa Sultan Ismail untuk menandatangani suatu perjanjian yang sangat merugikan kesultanan Bima.

Isi perjanjian tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Angkatan Laut Bima tidak boleh mengganggu dan menyerang kapal-kapal Belanda yang berlabuh maupun yang berlayar di perairannya.

2. Angkatan Laut Bima harus membantu Belanda untuk memerangi bajak laut.
3. kesultanan Bima harus menyerahkan tanah dekat pelabuhan Lawa Due untuk mendirikan benteng dimana Belanda mempunyai hak teritorial
4. Kesultanan Bima harus memberikan bahan-bahan perdagangan berupa beras, ternak, kulit ular, kulit buaya sebagai upeti kepada Belanda. Bahan-bahan itu selama enam bulan dikumpulkan dan diserahkan terlebih dahulu di lapangan Sera Suba, kemudian diangkat oleh kapal-kapal Belanda.
5. Pengangkatan Raja / Sultan Bima terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Gubernur militer Belanda di Makassar.

Di sampaing itu sultan dituntut agar memilih satu di antara dua alternatif. *Pertama* bila rancangan isi perjanjian itu tidak dapat diterima maka Kesultanan Bima akan ditundukkan dengan kekuatan militer seperti halnya Kerajaan Gowa dan Bone. *Kedua* bila diterima maka Belanda bersedia mengakui kedaulatan atas rakyat dan tanah Kesultana Bima.[81]

Isi perjanjian itu selain sangat merugikan kesultanan Bima, sangat bertentangan dengan semangat patriotisme yang diperlihatkan oleh para sultan Bima sebelumnya. Taktik Belanda ini amat memojokkan sultan, sebab pada hakekatnya isinya sama saja dengan merampas kedaulatan secara terselubung. Tapi pada akhirnya sultan Ismail pun secara terpaksa menerimanya, karena jika ditolak akan terjadi peperangan yang melibatkan seluruh rakyat. Pada saat kristis seperti ini, Kesultanan Bima kehilangan seorang tokoh yang cerdas dan berpengalaman, yaitu dengan meninggalnya Ruma Bicara Abdul Nabi pada 6 Jumadil Awal 1255 H (1829) dalam usia 97 tahun. Jabatan Ruma Bicara kemudian digantikan oleh puteranya bernama Muhammad Ya'kub.

Sejak itu hubungan Bima dengan Belanda semakin tegang, Sultan Ismail bersama Wakil Ruma Bicara Muhammad Ya'kub tidak loyal lagi terhadap isi perjanjian dengan Belanda. Penyerahan upeti yang diharapkan oleh Belanda tidak berjalan lancar dan kesultanan Bima

tetap menjalankan politik perdagangan bebas. Tindakan Sultan Ismail dan Ruma Bicara Mohammad Ya'kub ini sangat meresahkan dan merugikan Belanda. Namun Belanda pada saat itu tidak berani mengambil tindakan. kerena sedang, mengkonsentrasikan kekuatannya dalam menghadapi Perang Diponogoro, Perang Paderi, Perang Bone dan lain-lain.

Rupanya isi perjanjian dengan Belanda itu dalam prakteknya sulit dilaksanakan karena berbagai alasan:

1. Pengumpulan bahan-bahan upeti mengakibatkan kegelisahan rakyat, karena bahan-bahan tersebut diserahkan secara cuma-cuma, tidak diperkenankan untuk diperdagangkan secara bebas.
2. Barang-barang tersebut harus berkualitas baik, agar laris dipasarkan dengan harga tinggi.
3. Kewajiban Kasultanan Bima untuk membantu Belanda memerangi bajak laut sulit dilaksanakan karena bajak laut tersebut adalah pelaut-pelaut Makasar yang merupakan seperjuangan dalam melawan Belanda.

Meskipun demikian, sesuai dengan ketentuan hadat yang telah berlaku sejak terbentuknya Kasultanan Bima, sultan masih tetap leluasa memerintah rakyatnya. Belanda hanya mengawasi pelabuhan dengan menempatkan Bentengnya di Lawa Due sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati,

Masa Pemerintahan Sultan Abdullah (1854--1868)

Sultan Abdullah adalah putera Sultan Ismail, dilahirkan pada tahun 1247 H. (1827 M) dan dilantik menjadi sultan pada tahun 1274 H. (1854 M). Pada masa pemerintahan Sultan Abdullah hubungan Kasultanan Bima dengan Belanda makin bertambah sulit. Belanda tetap selalu berusaha untuk menguasai Kasultanan Bima dengan cara memaksa menandatangi perjanjian, meskipun Sultan Abdullah tidak pernah mentaati isi perjanjian tersebut.

Perlu diketahui bahwa meskipun Sultan Abdullah digambarkan sebagai orang yang bersikap adil, namun dalam pengangkatannya

banyak rakyat yang kurang setuju karena dihasut oleh Belanda. Pada waktu itu kedudukan Belanda di Indonesia semakin kuat, karena perlawanan yang dilakukkan oleh bangsa Indonesia pada umumnya sudah dapat dipatahkan, sehingga kedudukan Belanda yang demikian. itu menyulitkan Kasultanan Bima. Menyadari akan hal itu maka Sultan Abdullah bersama Ruma Bicara menyusun langkah dan strategi untuk menghadapi Belanda. Sultan sadar bahwa dalam posisi seperti itu ia harus meningkatkan kemampuan pasukannya, baik secara materi maupun spirituil. Sultan Abdullah memperkuat angkatan perangnya dengan memodernisasi peralatan dan persenjataan yang diperolehnya dari bangsa Inggris dan Portugis. Para prajurit dituntut berdisiplin. bermoral tinggi dan mulia sesuai dengan ajaran agama Islam. Di samping itu mereka dituntut pula untuk mampu menjadi juru dakwah terutama di daerah taklukan yang perkembangan Islamnya belum maju seperti : Manggarai, Samba, Larantuka dan Sawu.

Perlu dicatat pula bahwa Ruma Bicara Muhammad Ya'cub selaku pendamping Sultan Abdullah mengambil tindakan yang agak berani antara lain :

1. Membubarkan Angkatan Laut Kesultanan Bima, agar tidak diperalat Belanda untuk menghancurkan pejuang Makassar dan Bugis, Ternate, Tidore yang dianggap sebagai bajak laut oleh Belanda.
2. Para pejuang Makassar dan Bugis dilindungi bahkan diberi kebebasan untuk mendiami daerah Manggarai disamping malakukan perlawanan terhadap Belanda, juga harus melakukan dakwah.
3. Gerak-gerik Belanda dibatasi serta diawasi oleh Kesultanan Bima.
4. Upeti sedikit demi sedikit dihilangkan.[10]

Tindakan Ruma Bicara Muhammad Ya'kub sebenarnya merupakan penolakan terhadap kekuasaan Belanda sebab hal itu sangat bertentangan dengan isi perjanjian yang telah disepakati oleh Sultan Ismail, Namun harus diakui bahwa tindakan Mauhammad Ya'kub yang membubarkan angkatan laut akan merugikan Kasultanan Bima dalam melawan Belanda pada masa selanjutnya. Dengan adanya

kebijaksanaan tersebut maka para pejuang Bugis, Makassar, Ternate dan Tidore yang sebelumnya bergabung dengan angkatan laut Bima terpaksa memisahkan diri dan mereka masih terus melakukan perlawanan terhadap Belanda.

Disaat hubungan Bima dengan Belanda semakin tidak sehat, Ruma Bicara Muhammad Ya'kub meninggal dunai pada tahun 1864. Ia dimakamkan di Makam Bata, Bima, dan kemudian diberi gelar *Ruma Ma Kapenta Wadu.* Jabatan Ruma Bicara digantikan oleh Ahmad Daeng Manasa. Empat tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1288 H (1868) Sultan Abdullah pun mangkat. Beliau dimakamkan di halaman masjid Kasultanan Bima (Komplek Makam Kampung Sigi) dan diberi gelar Ma Wa'a Adil. Sultan Abdullah digantikan oleh puteranya, yaitu Sultan Abdul Azis yang pada waktu itu masih berusia 8 tahun sehingga yang menjalankan pemerintahan adalah Ruma Bicara.

Masa Pemerintahan Sultan Abdul Azis (1868--1881)

Telah disinggung di atas bahwa Sultan Abdul Azis adalah putera Sultan Abdullah, dilahirkan pada tahun 1270 H (1868). Beliau mangkat pada tahun 1301 H (1881) dan setelah wafat diberi gelar *Ma Wa'a Sampela.* Pada masa pemerintahan Sultan Abdul Azis hubungan Kasultanan Bima dengan Belanda juga sumakin tegang karena pihak Belanda semakin semena-mena. Belanda menekan posisi kesultanan Bima dengan berbagai perjanjian yang intinya agar kasultanan Bima tunduk dan takluk terhadap pemerintah Belanda. Meskipun perjanjian demi perjanjian sudah dilaksanakan, namun tetap tidak dapat mercdakan suasana. Sultan Abdul Azis dan Ruma Bicara Daeng. Manasa adalah dua tokoh yang memiliki prinsip yang sama untuk melanjutkan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pendahulunya. Namun untuk melunakkan sikap Sultan Abdul Azis dan Ruma Bicara, tanpa disangka-sangka pada tahun 1874 Belanda menghapuskan upeti hasil hutan terutama kayu sapan (kayu kuning).[11] Taktik dan strategi Belanda ternyata kurang berhasil karena Kasultanan Bima tetap bersikap tegas dan keras terhadap Belanda. Kebijaksanaan sultan dan Ruma Bicara Ahmad Daeng Manasa itu ternyata menimbulkan sikap

pro dan kontra sehingga menyebabkan timbulnya dua kelompok yang berbeda prinsip dalam mensikapi perjanjian-perjanjian dengan Belanda. Golangan yang mau menerima beralasan pada kondisi Kasultanan Bima yang lemah pada saat itu, sedangkan golongan yang menolak beranggapan bahwa hal itu sesuai dengan perintah Hukum Islam untuk tidak bekerja sama dengan dou kafi (orang kafir). Disamping itu bertentangan pula dengan sikap dan kebijaksanaan politik yang telah dilakukan oleh para sultan sebelumnya. Di dalam golongan yang menolak adalah Rama Bicara Daeng Manasa. Beliau keluar dari keanggotaan Majelis Hadat dan meninggalkan lingkungan istana namun tetap loyal kepada sultan. Sikap Ahmad Daeng Manasa ternyata mendapat sambutan positif dari sebagian golongan bangsawan, ulama dan rakyat. Kelompok inilah yang pada masa pemerintahan Sultan Ibrahim akan mempelopori rakyat untuk menggangkat senjata melawan Belenda dalam Perang Ngali, Perang Dena.

Setelah Ruma Bicara Ahmad Daeng Manasa mengundurkan diri, maka melalui Majelis Hadat Belanda mengangkat Abdul Azis bin Yunus sebagai penggantinya. Namunn ternyata pengangkatan Ruma Bicara Abdul Azis bin Yunus ini selain tidak mendapat sambutan positif dari Syara Dana Bojo, juga kurang mendapat dukungan dari seluruh anggota Majelis Hadat. Disamping Ruma Bicara Abdul Azis Yunus sebagai penggantinya. Namun ternyata pengangkatan Ruma Ma Wa'a Bilmana sehingga pengangkatannya bertentangan dengan Hukum Adat yang berlaku. Dalam keadaan seperti itu Sultan Abdul Azis mangkat secara tiba-tiba; beliau meninggal dalam usia yang relatif muda dan pada saat situasi dan kondisi Kasultanan Bima semakin sulit menghadapi rongrongan dan tekanan pemerintah Belanda.

Masa Pemerintahan Sultan Ibrahim (1881--1915)

Karena sultan Abdul Azis tidak mempunyai putera, maka ia digantikam oleh adik yaitu Sultan Ibrahim. Sultan Ibrahim dilahirkan pada tanggal 3 Syawal 1282 H (1862 M) dan mangkat pada tahun 1915. Setelah meninggal diberi gelar Ma Wa'a Taho Parenge, karena mempunyai perangai dan budi luhur.

Pada waktu pelantikan Sultan Ibrahim, Belanda secara sengaja mengulur-ulur waktu pelaksanakannya. Meskipun Gubernur Belanda di Makassar belum memberikan persetujuannya, namun Syara Dana Mbojo tetap melantiknya sesuai dengan kententuan yang berlaku. Pada masa pemerintahannya, Sultan Ibrahim berhasil menghapuskan beberapa peraturan yang dibuat oleh Belanda antara lain memerangi bajak laut. Meskipun demikian posisi kasultanan semakin lemah dengan ditandatanganinya beberapa perjanjian politik yang memperbaharui atau mengganti kontrak-kontrak sebelumnya. Pada tahun 1886 Belanda ingin memperkuat kembali tuntunannya seperti yang tertuang dalam perjanjian tahun 1884, yang isinya antara lain agar Sultan Ibrahim menyerahkan daerah taklukannya. Tuntunan Belanda itu ditolak oleh Sultan Ibrahim maupun oleh Ruma Bicara Muhammad Qurais yang baru saja menggantikan Abdul Azis bin Yunus. Menghadapi sikap keras sultan dan Ruma Bicara yang demikian itu. Belanda belum berani mengambil tindakan karena sedang memusatkan perhatiannya menghadapi Perang Aceh.

Pada tahun 1905 Belanda mengirim utusan untuk menyampaikan sepucuk surat kepada sultan yang isinya antara lain agar sultan Bima mau memperbaharui perjanjian-perjanjian yang dibuat pada masa sebelumnya. Meskipun surat itu tidak diterima oleh sultan dan Ruma Bicara, Belanda tidak mau mundur dan memaksakan kebendaknya. Pada tahun 1905 Belanda memaksa sultan untuk menyerahkan daerah Manggarai dan setahun kemudian (1906) Belanda memaksa lagi sultan menandatangi Kontrak Politik Panjang (Lange Corftract). Untuk penandatangan kontrok tersebut, Belanda mengundang Sultan Ibrahim datang ke Batavia. Pada tahun 1908 Gubernur Jendral Belanda di Batavia mengirim lagi utusan untuk menemui sultan dan meminta agar sultan mau menandatangi kontrak yang isinya sangat merugikan kesultanan Bima.

Isi pokok perjanjian itu antara lain :

1. Sultan Bima mengakui bahwa kerajaan Bima merupakan bagian dari Hindia Belanda. Dan bendera Belanda harus dikibarkan.
2. Sultan Bima berjanji senantiasa tidak melakukan kerjasama dengan bangsa kulit putih lain.

3. Apabila Gubernur Jenderal Hindia Belanda menghadapi perang, maka Sultan Bima agar mau mengirim bala bantuan.
4. Sultan Bima tidak akan menyerahkan wilayah kesultanan Bima kepada bangsa lain kecuali Belanda.

Perjanjian tersebut disahkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia pada tanggal 6 Februari 1908 yang kemudian dikenal dengan *contract met Bima.*[12]

Berita perjanjian itu sempat didengar oleh rakyat, sehingga suasana dan tantangan rakyat semakin mendekati titik lawan. Belanda dengan leluasa mencampuri urusan rumah tangga kerajaan. Belanda dengan cara yang sangat licik meminjam tangan Sultan agar semua keinginannya dijalankan. Kedudukan sultan hanya sebagai simbul karena harus bertanggung jawab kepada pemerintah Belanda. Perangkat hadat diciutkan sehingga kedudukan Sultan dan Jenelli "sama" dalam struktur pemerintahan kolonial.

Meskipun dalam perjanjian tersebut ada pasal-pasal yang memberi kelonggaran dalam hal aturan perayaan-perayaan hari-hari besar Islam seperti Idul Fitri, Idul Adha dan peringatan Maulid Nabi s.a.w., namun hal itu hanya sebagai taktik Belanda untuk memperkulat posisi kekuasaannya dengan cara mengambil hati rakyat. Setelah perjanjian disyahkan maka pemerintah Hindia Belanda menempatkan kontrolir sampai pada saat perang kemerdekaan. Ini berarti bahwa kekuasaan Belanda atas kesultanan Bima bersifat tidak langsung (indirect rule).[13]

5.2 Reaksi Terhadap Dominasi Kekuasaan Kolonial

Reaksi terhadap dominasi kekuasaan kolonial sebenarnya sudah terasa sejak tahun 1908 dan 1907, hal itu terutama dirasakan oleh rakyat kesultanan Bima sebagai akibat perjanjian tahun 1905, dimana Belanda mendapat hak untuk memungut berbagai macam cukai mulai dari cukai jalan, pelayaran sampai cukai import dan export yang diperoleh melalui pelabuhan-pelabuhan di kesultana Bima. Selanjutnya yang lebih memberatkan lagi dengan dikeluarkannya suatu peraturan pada akhir Desember 1906 untuk mengadakan apa yang oleh orang Makasar disebut *Simakata/lassong*, atau *Sima assapparang*

atuoang oleh orang-orang Bugis, yaitu pajak kehidupan yang semula hanya berlaku di Sulawesi. Namun sejak 1 Januari 1907 mulai dikenakan di seluruh wilayah *Celebes en Onderhoorigheden*, yang berarti termasuk juga Bima, Sumbawa, Dompu dan Sanggar. Berdasarkan pajak ini maka akan dipungut 1/20 dari hasil panen padi : setiap rumah harus membayar 2,50 dan setiap keluarga membayar satu pikul beras. Sehubungan dengan ini maka telah ditetapkan target bahwa untuk tahun 1907 harus dapat terkumpul uang sejumlah f.3.000 dan Manggarai sejumlah f.150.[4]

Sejak bulan Mei 1907 dibeberapa kampung di Bima timbul perasaan tidak puas, terutama di Raba dan Ngali (daerah Belo). Perasaan serupa kemudian menjalar juga ke Rasanggaro, Dena (daerah Bolo) dan Kala (Donggo). Di kampung Raba, ketika akan diadakan registrasi penduduk, paman Sultan Ibrahim yaitu Raja Amin menghalangi pelaksanaannya. Lalu pada bulan Agustus 1907 giliran kampung Ngali, sebuah kampung di sebelah tenggara Teluk Bima. Di sini juga rakyat tegas-tegas menolak untuk mengadakan registrasi. Alasan penolakan tersebut karena adanya kekhawatiran bahwa masksud registrasi penduduk itu untuk mencatat nama laki-laki yang akan dijadikan kuli atau budak yang akan dikirim keluar daerah. Dengan demikikan masalah registrasi telah menjadi salah satu kasus *belli* (untung-rugi) yang menyulut api perlawanan.

Jadi apabila ditinjau secara umum penyulut atau penyebab perlawanan terhadap Belanda adalah karena ketidakpuasan rakyat terhadap tindakan pemerintah kolonial Belanda yang memberlakukan Bima sedemikian rupa sehingga rakyatnya menderita. Peristiwa itu diawali dengan munculnya kelompok ulama yaitu Makalosa Weki. Dengan perjanjian politik tahun 1907, kedaulatan Bima telah dirampas oleh pemerintah Hindia Belanda yang kemudian ditindak lanjuti surat gubernur militer Swart yang dikirim kepada Sultan Ibrahim tanggal 23 Maret 1908. Isi surat itu adalah laporan dari kontroler A.A. Banse yang menyatakan kondisi Kesultanan Bima semakin memburuk, karena ada beberapa saudara Sultan (Raja Amin) dan Jeneli Monta saudara Raja Amin menggerakkan perlawanan rakyat. Gubernur Swart kemudian mengirim Letnan Kolonel Van der Zwaan untuk menyelidiki hal tersebut, tetapi rakyat Ngali dan Galarang (kepala kampung)

menolaknya. Dalam situasi seperti itu, posisi Sultan sangat terpojok, dari pihak Belanda sultan telah ditekan sedangkan dari golongan ulama Ma Kalosa Weki juga mendesak agar sultan segera melawan Belanda. Sultan secara terbuka mengemukakan kepada rakyat, bahwa sebenarnya Kesultanan Bima sudah menjadi bagian dari Hindia Belanda. Tetapi rakyat tetap ingin menentangnya.

Dalam situasi yang demikian itu munculah perlawanan rakyat Ngali, Kala dan Dema yang semata-mata untuk mempertahankan agama, adat-istiadat, kedaulatan dan kemerdekaan yang dimiliki selama ini.

Siasat dan kelicikan pemerintah Hindia Belanda tidak pernah henti-hentinya digunakan. Begitu juga dalam perang Ngali, Dena dan Kala sultan dan para pendampingnya ingin diadu dengan rakyatnya sendiri. Yang menonjol dari perlawanan-perlawanan tersebut ialah perang Ngali dimana para pelopornya terdiri dari ulama dan pemimpin agama. Hal yang unik dalam perlawanan rakyat Ngali ialah tempat berkumpul dan bermusyawarah massa rakyat selalu di Mesjid Raya Ngali sehingga selain latar belakang agama secara umum perlawanan itu berlatarbelakang sosial, ekonomi, budaya, politik.

Perang Ngali (1908-1909)

Ngali adalah nama salah satu desa di kecamatan Belo bagian selatan sebelah tenggara teluk Bima. Seiring dengan perkembangan dan persiapan perang di desa Ngali, pemerintah Hindia Belanda menyusun kekuatan pasukan domistik, dengan dalih menegakkan wibawa sultan. Rakyat semakin gusar, dan semua kehendak sultan yang selama ini mereka turuti, dengan terpaksa ditolaknya. Utusan sultan yang datang ke Ngali untuk menyampaikan pesan dari sultan dengan tegas ditolaknya sehingga hal ini dapat dianggap sebagai awal dari pemberontakan rakyat Bima. Apalagi setelah terdengar berita bahwa saudara dekat sultan yaitu Raja Amin dibantu beberapa tokoh seperti H. Abdul Karim, seorang yang berasal dari pulau Kei dan dua orang Aceh ikut mengatur pertahanan di Ngali. Kedua orang Aceh ini datang di Bima sebagai orang buangan dan pekerja paksa.[15]

Dibawah pimpinan Haji Abdullah Karim dan Raja Amin, rakyat Ngali diorganisir untuk bersiap-siap perang melawan Belanda. Pagar

desa diperkuat dan dijaga ketat. Mereka jadikan mesjid Ngali sebagai markas besarnya. Rakyat Ngali dibangkitkan martabatnya dengan mendengungkan perang sabil sebagai motif perjuangan. Setiap hari mereka berkeliling desa sambil membaca sholawat, tahlil dan takbir dan lagu-lagu agama. Hampir seluruh warga ikut berpartisipasi demi kehormatan warga masyarakat dan agama yang mereka sucikan.

Dipihak Belanda tak kalah sengitnya, sebab dengan ditolaknya utusan sultan sempat membangkitkan kemarahan gubernur militer Swart, ia kemudian memutuskan untuk mengirimkan tiga brigade marsose dari Makassar dan dua brigade lainnya dari Kendari. Pada tanggal 16 Februari 1908 dengan menumpang kapal KPM "BOTH", Swart bersama rombongan 3 brigade marsose berangkat dari Makassar menuju Bima sedangkan dua brigade lainnya dari Kendari menumpang kapal "DOG". Di Bima semua tentara diasramakan disebuah sekolah di kampung Benteng. Kelima brigade tadi dibawah komando Lettu J.H.C. Vastenou dan Peltu. M. Schouten. Ditambah pula pasukan marinir yang dibawa dengan kapal "Siboga" dipimpin oleh Letnan laut kelas satu Pieren.[16] Sejak tanggal 17 Februari 1908 Swart mengadakan persiapan untuk segera menyerbu Ngali.

Pada tanggal 19 Februari 1908, Swart dan pasukannya menyerbu Ngali dari dua jurusan, utara dan selatan. Tetapi tiap-tiap pintu kampung dijaga oleh rakyat dengan pakaian serba putih bersenjatakan tombak, keris, pedang, dan parang. Sebagian lagi bersenjatakan pistol dan senapan. Bagi rakyat Ngali pakaian putih berarti siap sedia mati syahid demi Allah. Tak sedikitpun mereka gentar menghadapi tentara Belanda yang bersenjata lengkap. Melihat situasi yang demikian pasukan Belanda mencari strategi sebelum melakukan penyerbuan, karena bagi rakyat keadaan dan situasi wilayah Ngali sudah sangat dipahami. tetapi bagaimanapun beraninya rakyat, bukanlah tandingannya dalam pengalaman berperang. Pertempuran dimulai kira-kira jam 12.00 siang di sebelah selatan kampung. Para pejuang Ngali maju menyongsong musuh dengan melepaskan tembakan. Letusan bambu yang terbakar dengan suara letusan senapan membahana menambah gemuruhnya suasana desa Ngali. Akhirnya rakyat Ngali semakin terdesak dan kira-kira pukul 15.45 kampung Ngali jatuh ke tangan Belanda. Dari pihak rakyat Ngali gugur

pemimpin-pemimpin pasukannya yaitu Haji Se, Haji Abdul Karim serta dua orang Aceh, sedangkan dipihak Belanda Lettu Vasternou tewas tertusuk tombak. Mayat-mayat pasukan marsose dikubur di Ngali, kecuali mayat komandan Vasternou yang dibawa ke Makassar untuk dikubur di sana.

Kampung Ngali jatuh tanggal 19 Februari, pasukan Belanda kembali ke ibu kota Bima. Desa Ngali di tinggalkan oleh Belanda dalam keadaan kosong dengan sisa kebakaran. Di sana-sini masih banyak kepulan asap, sisa rakyat Ngali yang tewas dan mengungsi, ada juga yang tertangkap atau ditawan atau dibawa ke Bima, untuk diadili atau dibuang ke Makassar.

Perang Dena (1908)

Setalah pemberontakan Ngali dapat dipadamkan, pada akhir Februari 1988, timbul aksi pemberontakan di desa Dena, kecamatan Belo. Pemberontakan di desa Dena mempunyai sebab dan motif yang sama dengan perang Ngali. Rakyat segan membayar pajak yang terlalu tinggi, menolak registrasi penduduk dan tak mau tunduk pada pemerintah Belanda. Tindakan ini dianggap suatu pemberontakan terhadap sultan karena Belanda memakai perintah dengan kuasa sultan. Maka Swart pun berunding dengan sultan untuk segera menyerang Dena. Tetapi rakyat Dena sudah siap untuk menghadapi serangan Belanda, dengan dalih perang sabil.

Tanggal 25 Februari 1908 Swart mengirim lima brigade marsose dan tentara marinir dengan kapal "Siboga" ke Rasanggaro. Hari itu juga Rasanggaro dapat dipatahkan. Desa Dena terjadi perlawanan rakyat, yang dipimpin oleh Haji Abdurrahim Abu Sara, Haji Usman Ruma La Beda dan Haji Abdul Azis Abu La Sarah, rakyat Dena maju perang.[17] Pihak Belanda menyerang dari arah tenggara melalui Gunung Lebo, sedangkan rakyat Dena sudah menghadang disebelah selatan ± 1 km dari datangnya tentara Belanda. Pertempuran berlangsung sengit, tapi akhirnya rakyat Dena semakin terdesak, sehingga pertempuran beralih ke tengah-tengah Sungai Campa. Rakyat Dena berlindung pada tebing-tebing dan batu yang ada di sungai. Ketika salah seorang pimpinan Dena, yaitu Lode Oma Ibu tertembak, secara tiba-tiba datanglah banjir sehingga banyak kurban yang hanyut

diantaranya seorang rakyat Dena, Duru Anak Hama tewas terhanyut. Akhirnya kedua pasukan semakin menghindar dari banjir dan pihak Belanda mengalihkan perangnya ke Kuria Huu. Meskipun rakyat Dena sudah mundur sampai ke Tolo Sera Belanda terus mendesaknya, hingga berhasil masuk ke kampung dan langsung masuk ke rumah-rumah penduduk. Rumah-rumah dibakarnya, Haji Usman dan kawan-kawannya tertawan, sedang rakyat Dena yang lolos lari ke Oi Wulu ± 5 km sebelah barat desa Dena. Rumah Haji Abdurrahim yang dijadikan pusat pertahanan diserbu, Haji Abdurrahim ditembak mati beserta 28 orang lainnya.

Desa Dena akhirnya jatuh ke tangan Belanda, sisa-sisa pemimpinnya yang hidup ditawan dan dibawa ke Sori Dena disebuah tempat bernama Wadu Bura. Dan pada hari itu juga perang Dena dianggap selesai oleh Gubernur Swart.[18]

Perang Kala (1909)

Kala adalah nama sebuah desa di kecamatan Donggo, dibawah kesultanan Bima. Seperti halnya di desa Ngali dan Dena, perlawanan rakyat Kala juga disebabkan rakyat Kala tidak mau tunduk terhadap kekuasaan pemerintah Belanda. Apalagi utusan sultan yang datang berkali-kali dianggap sebagai sekutu Belanda. Perlawanan rakyat Donggo ini dipimpin oleh Nteli Ama Ntihi dan Ncohu Samiu, keduanya berasal dari desa Kala, kecamatan Donggo, sedang markas perlawanan mereka dipusatkan di Mpirilua. Dibandingkan dengan perang Ngali dan perang Dena, sistem strategi perang rakyat Kala agak unik, yakni dengan membuat serambi atau *sancari* (bahasa Bima) di atas bukit Doro Kaboe. Di atas serambi itu disusun batu-batu besar. Pada saat pasukan Belanda mengejar rakyat Kala ke atas Gunung, rakyat sudah siap menggelindingkan batu-batu besar itu ke bawah. Hal itu sempat membuat pasukan Belanda gusar, apalagi wilayahnya sangat rumit, dengan kontur tanah yang terdiri dari gunung-gunung dan hutan yang masih terlalu asing bagi pasukan Belanda.

Akhirnya Belanda meminta bantuan Sultan Ibrahim agar supaya mengirim rakyatnya, sehingga dalam perang Kala ini sultanlah yang akhirnya memimpin pasukan untuk menumpas perlawanan rakyat Kala

Dua orang pemimpin Donggo yaitu Dongge dan Hoti tewas ditembak oleh sultan. Rakyat yang berhasil menyelamatkan diri dibawah pimpinan Ntehi Ama Ntihi dan Neau mengungsi ke Mpirilua, disini mereka membuat benteng pertahana. Namun setelah beberapa pemimpin Desa Kala akhirnya dapat ditembak. Belanda mengajak sultan agar rakyat mau diajak berdamai. Tetapi dalam kenyataannya semua itu hanya tipu muslihat belaka, karena para pemimpin Ntehi Ama Ntihi dan kawan-kawannya dibawa ke Bima dan setelah itu tidak terdengar kabar di mana keberadaan mereka. Perang Kala dianggap selesai, tahun 1910.

Dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ketiga perlawanan tersebut (Ngali, Dena, Kala) gagal karena perlawanan rakyat masih bersifat lokal dan persenjataan yang mereka miliki tidak sebanding dengan yang dimiliki tentara musuh. Perlawanan-perlawanan itu tidak direstui sultan karena sengaja diikat perjanjian yang memaksanya untuk mematuhinya. Disampaing itu peklawanan rakyat tersebut tumbuh secara sporadis sehingga Belanda mudah mematahkannya.

Apabila ditinjau sebagai gerakan-gerakan sosial, maka gerakan-gerakan ini tidak disusun dalam suatu wadah yang rapi, tidak mempunyai hubungan satu dengan yang lain dan tidak adanya ideologi yang jelas. Tetapi perlu dicatat bahwa perlawanan rakyat Bima ini merupakan gerakan perlawanan yang digerakkan oleh semangat fisahlillah atau perang sabil, bukan hanya karena peran kharisma dari para pemimpinnya.

Apabila dikaji ternyata perang Ngali dan Dena dimotivasikan oleh agama Islam, karena sistim pemerintahan Kesultanan Bima yang ditegakkan atas dasar adat dan hukum Islam sudah sangat mendarah daging dikalangan rakyat. Sebaliknya perang Kala sifatnya nasionalis, mereka belum mengenal apa itu nasionalisme, tetapi dalam jiwa dan semangat mereka sudah ada benih dan semangat cinta warga kampung halamannya (desanya), serta Kesultanan Bima yang tidak begitu saja rela tanahnya dikuasai oleh penjajah Belanda. Ketika Sultan Ibrahim sebagai pemimpin rakyat dipaksa untuk menerima segala aturan dan perjanjian Belanda, maka rakyat sekaligus menentang sultan

dan Belanda secara bersamaan. Hal ini dapat ditaksirkan bahwa patriotisme dan nasionalisme sudah tumbuh di hati sanubari rakyat Bima. Motivasi agama dan nasionalisme itu berpadu dalam perlawanan rakyat Bima terhadap kekuasaan pemeritah Hindia Belanda. Semangat dan pengalaman menghadapi kekuasaan Belanda itu dipakai sebagai modal bagi rakyat Bima, dalam menentang Belanda, dimasa-masa selanjutnya.

Setelah berakhirnya peperangan demi peperangan, sikap rakyat makin tidak bersimpati lagi terhadap wibawa sultan, karena pihak Belanda justru semakin memperkuat pengawasannya pada sultan dan para bangsawan serta ulama. Hal itu terbukti dengan diperbaharuinya perjanjian dan kontrak oleh Belanda yang harus dilaksanakan di Kesultanan Bima.

Akibat Perang

Perang rakyat telah berlalu, akibatnya Kesultanan Bima dibawah hukum dan aturan pemerintah Hindia Belanda, sekaligus menjadi bagian wilayah Hindia Belanda. Akhirnya pemerintah Hindia Belanda mengambil langkah-langkah politik untuk memperkuat pengawasan atas Kerajaan Bima. Struktur pemerintahan dalam tata hukum diubah yaitu :

* Majelis Tureli diganti dengan Dewan Pemerintah Kerajaan dibawah naungan dewan pemerintah Hindia Belanda. Kedudukan Sultan sejajar dengan kontrolir sebagai pelaksana pemerintahan Hindia Belanda di Bima.
* Majelis hadat dipersempit hanya mengurusi badan peradilan kerajaan yang berpedoman hukum Hindia Belanda.
* Majelis Mahkamah Syar'iyyah (hukum Islam) ditiadakan, diganti hukum Hindia Belanda.

Sultan yang sebelum perang sangat dihormati, semakin berkurang kewibawaannya. Karena satiap kebijaksanaan sultan harus dilaporkan dulu kepada kontrolir Belanda. Wilayah Kesultanan lima dibagi menjadi lima kedistrikkan :

1. Kedistrikan RasanaE: diperintah oleh Sultan Ibrahim

2. Kedistrikan Donggo: diperintah oleh Sultan Huda Salahudin
3. Kedistrikan Sape: diperintah oleh Raja Bicara
4. Kedistrikan Belo; diperintah oleh Raja Sekuru
5. Kedistrikan Bolo: diperintah oleh Rato Parado.

Untuk mencegah timbulnya pemberontakan maka sejak perang selesai, anak raja dan keluarganya seperti Daeng Manasa, Raja Amin dilarang tinggal di luar istana. Sumber penghasilan kesultanan juga dibatasi. Kesultanan dalam mengadakan pungutan dibatasi yaitu dari mengumpulkan sarang burung, mengumpulkan kayu kering, tukang-tukang yang mendapat sawah dikerjakan oleh anaknya masing-masing, pajak Woha dana yaitu hasil padi diambil 10% untuk kepala desa. Penghasilan pelabuhan menjadi hak gubernemen.[19] Tahun 1915 Sultan Ibrahim mangkat dan dimakamkan di halaman masjid kampung Sigi.

Masa Pemerintahan Sultan Salahuddin (1915--1951)

Setelah Sultan Ibrahim mangkat pada tanggal 16 Desember 1915, ia digantikan oleh putranya Muhammad Salahudin yang sebelumnya menjabat sebagai Tureli Donggo. Sultan Salahudin dilahirkan pada tanggal 15 Zulhijah tahun 1306 H (1888 M) dan dilantik menjadi sultan pada tahun 1917. Mangkat di Jakarta pada tanggal 7 Syawal tahun 1370 R (11 Juli 1951) dalam usia 64 tahun. Setelah wafat digelari Ma Kakidi Agama, karena beliau menjunjung tinggi dan agama dan memiliki pengetahuan luas dalam bidang agama. Sejak usia 9 tahun beliau memperoleh pendidikan agama dari ulama-ulama terkenal antara lain H. Hasan Batawi dan Syeh Abdul Wahab, imam Masjidil Haram, Mekah.

Dalam usia 11 tahun, Majelis Hadat Bima mengangkat Muhammad Salahuddin selaku Jena Teke (putra mahkota) Kesultanan Bima. Guberbur jenderal Hindia Belanda memberikan persetujuannya. Pemerintahannya pada prinsipnya tetap berpegang pada pola pemerintahan Kerajaan Bima yang dilakukan pendahulunya. Pola dan mekanisme pemerintahan diikuti dengan baik walaupun kerajaan Bima tidak lagi berstatus *zelf bestuur* tetapi sudah berstatus sebagai wilayah Hindia Belanda.

Karena Sultan Salahuddin sangat mencinta agama dan memiliki pengetahuan yang luas dalam bidang agama maka pada masa pemerintahannya pendidikan agama berkembang dengan pesatnya. Dalam hal ini cukup besar peranan Ruma Bicara Abdul Hamid sebagai pedamping sultan. Dengan bekal agama yang kuat sultan menjalankan kebijaksanaan pemerintah didampingi oleh Ruma Bicara Abdul Hamid yang cakap, berani dan berwibawa. Sara Hukum yang tidak berperan lagi dalam bidang pemerintahan, dimanfaatkan menjadi wadah untuk mengurus pendidikan agama. Pendidikan informal yang bersifat tradisional yang ditangani oleh Lebe dan Cepe Lebe makin ditingkatkan. Masjid, Langgar dan Surau bukan saja sebagai tempat ibadah, tapi dimanfaatkan pula sebagai tempat pengajian, baik anak-anak maupun bagi orang dewasa. Para pemuda yang rajin belajar agama dan taat beribadah di kirim ke tanah suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan memperdalam ilmu agama. Biaya ditanggung oleh Kasultanan dan selama bermukim di Mekkah mereka ditampung di Rumah Wakaf yang didirikan sejak pemerintahan Sultan Ibrahim.

Sultan Salahudin bersama Ruma Bicara Abdul Hamid berusaha meningkatkan jumlah rumah ibadah. Disamping Masjid Kasultanan yang terletak di dekat istana Bima pada tahun 1935 dibangun Masjid Raya di Raba, yang sebagian besar biaya pembangunannya berasal dari tanah wakaf Ruma Bicara Abdul Hamid. Dan sejak itu pula Khotbah Jumat yang sebelumnya memakai bahasa Arab diganti dalam bahasa Daerah atau bahasa Indonesia agar mudah dipahami oleh para jemaah. Waktu pun terus berjalan hingga semangat kebangsaan sebagai akibat munculnya pergerakan nasional membawa suasana kehangatan politik di daerah Bima. Pengaruh pergerakan nasional juga membawa dampak bagi pergerakan di Bima baik dalam bidang ekonomi, sosial dan politik.

Setelah perlawanan rakyat dapat ditumpas maka dengan leluasa Belanda mempergunakan sistem belansing tanpa ada hambatan apapun. Kerja paksa atau kerja rodi diterapkan dengan menggunakan istilah ("herendienst" atau "hamente"). Dalam kondisi yang sangat prihatin, rakyat harus membayar pajak belasting.

Dibidang sosial, terutama pendidikan, rakyat sama sekali dikungkung dalam kebodohan dan kemunduran. Yang dapat membaca dan menulis huruf latin masih dapat dihitung dengan jari sedangkan rakyat berkomunikasi tertulis hanya dengan huruf Arab-Melayu. Kehidupan masyarakat yang memprihatinkan itu dikungkung pula oleh adat istiadat yang statis. Hanya kaum bangsawan yang mendapat pendidikan dan mempunyai kesempatan menjadi pegawai pemerintah, karena hal ini memang dikondisikan oleh kaum penjajah. Namun dalam masa pergerakan di Indonesia, di Bima muncullah sekolah-sekolah yang kemudian dapat memberi warna tersendiri bagi suasa kehidupan rakyat Bima saat itu.

Di bidang pilitik juga terlihat dengan berdirinya berbagai organisasi dan partai politik, seperti Sarekat Islam pada tahun 1920, Muhammadiyah, tahun 1937, Perpi tahun 1938, Parindra tahun 1939, Nahdatul Ulama dan lain-lain. Kesemuanya itu melahirkan benih-benih dan semangat kebangsaan yang kemudian mengisi suasana pilitik masa pergerakkan di Bima.

Perang Sori Utu

Semangat kebangsaan meledak di awal tahun 1942 ketika tersiar kabar bahwa pemerintah Hindia Belanda di Pulau Jawa telah menyerah pada pemerintah Jepang dalam menghadapi perang pasifik, tanggal 8 Maret 1942. Timbul kesadaran di hati rakyat bahwa Belanda dapat dikalahkan oleh bangsa Asia (Jepang). Tekanan dan penderitaan yang terlalu lama mangakibatkan kemiskinan bagi rakyat Bima apalagi campur tangan pemerintah Belanda dalam kehidupan sehari-hari sangat mengecewakan Sultan Bima sendiri. Dalam situasi yang demikian suatu insiden kecil yang terjadi pada tanggal 30 April 1942 cukup untuk mencetuskan api pemberontakan.

Ketika ada dua orang penerbang Belanda dari Kendari (Sulawesi) tiba di pelabuhan Bima dalam perjalanannya menuju ke Australia. Di Bima mereka memaksa perahu dari Madura untuk membawanya ke Australia, namun karena menolak, perahu Madura itu ditembak. Tindakan yang sewenang-wenang itu menimbulkan amarah di kalangan pemimpin-pemimpin rakyat yang beberapa hari sebelumnya telah bergabung dalam suatu komite aksi yang bermaksud merebut

kekuasaan pemerintahan dari tangan Belanda. Komite aksi ini dibentuk atas inisiatif pemuda-pemuda, Bima yang tergabung dalam kepanduan Hisbul-Wathan Muhammadiyah (HW), Pemuda Anshor dan serdadu KNIL yang berpihak kepada mereka. Tentara KNIL dipimpin oleh Aritonang dengan jumlah anggotanya sekitar 14 orang, antara lain: Sutawijaya, Simatupang, Amir dan lain-lain. Sedangkan pimpinan non militer berada di tangan Huhamad Wasimir dan kawan-kawan. Menurut rencana dalam perebutan kekuasaan itu mereka akan menangkap semua pejabat Belanda yang berada di Bima, pada hari yang telah ditetapkan yaitu Minggu tanggal 6 Mei 1942, pukul 07.00, dengan menghindari pertumpahan darah.[20)]

Pembagian tugas dibagi menjadi tiga yaitu: pasukan inti akan mengepung asrama polisi di Raba dan menahan semua pejabat Belanda. Sedangkan bagian lain akan menggunakan alat-alat komunikasi yang penting seperti telepon di Raba dan radio di kamar Bola. Tidak luput pula dibuat pos-pos penjagaan untuk menghadang arang-orang Belanda jika ada yang meloloskan diri. Pos peniagaan tersebut antara lain di buat di Kumbe.

Dalam usaha perebutan kekuasaan itu akhirnya dapat ditangkap beberapa pejabat Belanda antara lain Mr. Machman (seorang kontrolir); Karseboom (Agent KPM); Bavelaar (Agent BPM); Kemper (Inspektur Polisi); dan masih banyak lagi yang lain.

Dalam pertempuran ini kedua orang penerbang Belanda tersebut tewas, sedangkan dipihak rakyat Bima gugur seorang pejuang, Idris Hakim dan satu orang lagi terluka yaitu Amin Daeng Emo. Pejabat-pejabat Belanda yang belum tertangkap dapat meloloskan diri dan pergi ke Lombok. Keberhasilan usaha perebutan kekuasaan itu juga merupakan keberhasilan Kesultanan Bima melepaskan diri dari belenggu penjajah Belanda. Untuk sementara waktu sultan memegang kembali pimpinan secara penuh berkedudukan di kota Bima sejak tanggal 5 April 1942.

Ternyata perjuangan rakyat belum usai sampai disitu, karena bala tentara Jepang sudah menguasai Indonesia, dan keadaan ini sukar dipertahankan. Tahun 1942 Jepang sudah menguasai Makassar dan

tinggal selangkah lagi sampai di Bima. Akhirnya Bima seperti daerah-daerah lain di Indonesia terpaksa menyesuaikan diri dengan situasi yang sedang berjalan.

Catatan

1. Menurut D.F. Van Braan-Morris, *Tijd.* Dell XXX, S Hage M. Nijhoff. 1890, p 213 dalam bukunya *Kumpulan Seminar Sejarah* Nasional IV, yang ditulis Helius Sjamsuddin, *Perubahan Politik dan Sosial di Pulau Sumbawa : Kesultanan Bima dan Kesultanan Sumbawa* (1815--1950), IDSN, Jakarta, 1985.
2. Abdullah Achmad, *Kumpulan Naskah Sejarah Bima.*
3. Helius Sjamsuddin, *"Perubahan Politik dan Sosial di Pulau Sumbawa: Kesultanan Bima dan Kesultanan Sumbawa* (1815--1950)", Kumpulan Makalah seminar Sejarah Nasional ke IV, IDSN, Jakarta, 1985.
4. *Ibid* , hlm. 623
5. Menurut Braam Morris, dalam buku : *Seminar Sejarah Nasional III*, Helius Sjamuddin, *Perang Ngali dan Perang Sapugara di Pulau Sumbawa Tahun 1908*, IDSN, Jakarta, 1989
6. Menurut Zollinger, *"verslag van eene reis naar Bima en Soembawa en eenige plavatsen op Celebes, Seleir en Floris'. VBG.* 1850, hlm. 216--217.
7. Abdulluh Achmad, *op. cit.* hal
8. Lalu Wacana dkk, *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme di Nusa Tenggara Barat*, IDSN, Jakarta 1983/1984, hlm. 87.

9. Abdullah Achmad, *op cit.* halm.
10. Lalu Wacana dkk, *op. cit* hlm. 88.
11. *Ibid.* hlm. 89.
12. *Ibid.* hlm. 90.
13. Abdullah Achmad, *op. cit,* hal.
14. Menurut Verb, 11 Juni 1909. No. 44, dalam buku *Seminar Sejarah Nasional III,* Helius Sjamsuddin, *Perang Ngali dan Perang Sapagura di Pulau Sumbawa Tahun 1906,* IDSN, Jakarta, 1982.
15. Periksa : *Indisch Militair Tijdschrift* (IMT), hlm. 7 cf. *Kolonial Verslag,* 1908, hlm. 61. dalam Helius Sjamsuddin : *Seminar Sejarah ke III,* IDSN, 1982.
16. *Ibid,* hlm. 9.
17. Mohammad Umar, *Perang Ngali* (1908--1909) *Sebagai Manifestasi Rakyat Bima Untuk Menentang Penindasan Belanda,* skripsi sarjana Pendidikan Jurusan Sejarah, FKIS-IKIP Malang, 1977. hlm. 22.
18. *IMT.* hlm. 16, menurut *Helius Sjamsuddin* dalam bukunya *Seminar Sejarah Nasional III,* IDSN, Jakarta, 1982.
19. Lalu Wacana dkk, *op. cit.* hlm. 103.
20. *Ibid.* hlm. 106.

SIMPULAN

Langkanya sumber sejarah dan aerkeologi khususnya dalam periode sebelum Islam masuk ke Bima menyebabkan sulitnya suatu penggambaran mengenai kehidupan politik kerajaan apalagi aspek-aspek kehidupan masyarakat lainnya. Perhatian orang Belanda dalam abad-abad kemudian yang memberikan perhatian terhadap kehidupan masyarakat Bima, meskipun belum menyeluruh, sudah merupakan bahan yang dapat menguak segi-segi tertentu. Pada dasarnya kehidupan masyarakat sebelum masuknya Islam di Bima bercorak kehinduan.

Agama Islam, dalam perkembangan kemudian telah memberikan pengaruh yang kuat terutama terhadap kehidupan politik Kerajaan Bima, setidaknya dapat dilihat dari penyebutan nama sultan untuk pemimpin tertinggi di sana. Begitu pula aspek-aspek kehidupan sosial-budaya Islam telah memberikan dampak yang besar.

Sebagai struktur kekuasaan yang harus dipertahankan, Kesultanan Bima telah memperlihatkan manuver politik di tengah konstelasi kekuatan-kekuatan baik di antara kerajaan-kerajaan tetangganya--Dompu, Sanggara, Pekat dan Sumbawa, dan kerajaan Gowa yang nota-bene sebagai kekuatan yang lebih besar dan kemudian VOC yang juga mempunyai kepentingan di kawasam itu. Dalam perkembangan kemudian kekuatan VOC dan kolonial Belanda yang berhasil untuk menempatkan keberadaan Bima di bawah kekusaan orang asing itu.

Dalam beberapa kontra-kontra antara Bima dan VOC serta pemerintah kolonial Belanda menunjukkan posisi yang demikian itu. Sudah tentu tidak semua apa yang di atas kertas perjanjian dipatuhi begitu saja. Penafsiran yang berbeda serta keinginan untuk tetap hidup merdeka dan orang Bima telah memperlihatkan adanya perlawanan rakyat.

Daftar Pustaka

1. Abdullah, L.Massir, Q., Bo (*Suatu Himpunan Catatan Kuno Duerah Bima*). Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Pengembangan Permuseuman Nusa Tenggara Barat, 1981/1982.
2. Abdullah, Taufik, "*Tesis Weber dan Islam di Indonesia*", dalam: Taufik Abdullah (editor), *Agama, Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi*. Buku Obor, LP3ES, 1979:
3. Atjeh, Abubakar, *Sekitar Masuknya Islam ke Indonesia*. CV.Ramadhani, Semarang, 1971.
4. Bouman, M.A., "Toeharlanti: De Bimaneesche Sultansverhefing" *Kolonial Tijdschrift*, 14, 1925: 710--717.
5. Burger, D.H., *Sedjarah Eokonomis Sosiologis Indonesia*. PN. Pradnya Paramita, d/h Wolter, Jakarta. 1960.
6. Cense, A.A., "*Enige Aantteekeningen over Makasars, Boeginese Gesechiedschrijving*", *BKI*., 107, 1951: 42--60.
7. ----------, "*Maleische Invloeden, in het Oostelijk deel van Indonesia Archipel*", *BKI*, 134, 1978: 415--432.
8. Chambert-Loir, Henri, "Sumber Melayu Tentang Sejarah Bima", *Citra Masyarakat Indonesia*, Archipel-Sinar Harapan, 1983: 41--55.
9. ----------, *Naskah dan Dokumen Nusantara III, Syair Kerajaan Bima*. EFEO, Jakarta-Bandung 1982

10. ----------, "Review of Abdullah 1981/1982", *Archipel*, 28, 1984: 229--230.

11. ----------, "Dato ri Bandang de l'islamisation de la region de Celebes - Sud", *Archipel* 29, 1985: 137--163.

12. ----------, (editor), *Cerita Asal Bangsa Jin Dan Segala Dewa-dewa*. Penerbit Angkasa dan Ecole Francaise D' Extreme-Orient, Bandung, 1985.

13. Coolhaas, W.Th., "*Bidrage tot de kennis van het Manggaraische Volk (West flores)*", *TNAG*, 59, 1942: 148--177; 328--360.

14. Cortesao, Armando, *The Suma Oriental of Tome Pires: An Account of the East from Read Sea to Japan, written in Malacca and India in 1511--1644*. Translated from Portuguese MS in the Bibliothique de la chambre des Deputtes, Paris and Edited by Armando Cortesao, London: The Hakluyt Society, 1944.

15. Couvreur, A., "*Aantlekeningen Nopen de Samenstelling van het Zelfbestuur van Bima*", *TBB*, 52, 1917: 1--18.

16. Damste, H.T., "*Islam en Sirihpoean te Bima (Soembawa) Atjehsche Invloeden* ?, *BKI*. 100, 1941: 55--70.

17. Faille, P.de Roo de la,"*Studie over Lomboksch Adatrecht, Bali en Lombok*", Adatrecht Bundels XV,s-Gravenhage Martinus Nijhoff, 1918: 135--140.

18. Goris, R., *Prasasti Bali I dan II*. Lembaga Bahasa dan Budaya Fakultas Sastra dan Filsafat, Universitas Indonesia, NV. Masa Baru, Bandung, 1953.

19. Graaf, H.J. de, "*Lombok in de 17e Eeuw*", Djawa XXI, 1941:

20. Hardjowidjono, Dharmono, Benarkah orang-orang Portugis melancarkan perang agama terhadap umat Islam selama kehadiran mereka di Indonesia?. Makalah Seminar Sejarah Nasional II, 26--29 Agustus 1970 di Yogyakarta.

21. Haris, Tawalinuddin, *Naskah Studi Kelayakan Komplek Makam Dan traha Dan Tolobali Bima, Nusa tenggara Barat*. Proyek Pemugaran Dan Pemeliharaan Peninggalan Sejarah Dan Purbakala Nusa Tenggara Barat, 1983/1984.

22. Jansen, A.J.F., "*Berigten. Hindoe-beelden van Soembawa*", *TBG. X.* 1961:

23. Jasper, J.E., "*Het Eiland Soemhawa en zijn Bevolking*", *TBB*, 34,1908: 60--147.

24. Kuperus, G.,"*De Madjapahitsche Onderhoorigheid Seran*", *TNAG*, 59,1942: 771--774.

25. Lekkerkerker, C., "*Enkele Nieuwe Gegevens Over Soembawa*", *TNA*G, 1933: 73--81.

26.. Ligvoet, A., "Aanteekeningen Betreffende den Economischen-toestand en de Ethnographie van het Rijk van Soembawa". *TBG*, 23, 1876: 555--592.

27. ----------, "*Trancriptie van het Daghoek der Vorsten van Gowa en Tallo, met Vertaling en Aanteekeningen*", *BKI*, 28, 1880 : 1--125.

28. Mahyuddin., Aliudin (alih aksara), *Surat-surat dan Catatan Harian Kerajaan Bima*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah, Jakarta, 1983.

29. Meilink-Roelofsz, M.A.P., *Asian Trade and European Influence in The Indonesian Archipelago Between 1500 and About 1630.* s-Gravenhage, Martinus-Nijhoff, 1962.

30. Mills, J.V., "Chinese Navigators in Insulinde About A.D.1500", *Archipel* 18, 1979 : 69-93.

31. Morris, D.F. van Braam, "Nota van Toelichting Behoerende lij het Contract gesloten met het landschap Bima op den 20 sten October, aan de Regeering ingediend door den Gouverneur van Celebes en Onderhooorigheden", *TBG XXXV*, 1890 : 176--233.

32. Naerssen, F.H.Van, "*Hindoejavaansche overblijfselen op Soembawa*", *TNAG*, 55, 1938: 90-100.

33. Noorduyn, J., "*Makasar and The Islamization of Bima*", *BKI*, 142, 1987 : 317--342.

34. ----------, "Bima en Sombawa, Bijdragen tot de Geschiedernis van de Sultanaten Bima en Sumbawa door A.Ligtvoet en G.P. Rouffaer", *VKI*, 129, Foris Publications Dordrecht Holland/ Providense-USA, 1987.

33. Mulyadi, Sri Wulan Rudjiati (editor), *Bandar Bima*. Departemen-Pendidikan dan Kebudayaan, Ditjen Kebudayaan, Direktorat. Jarahnitra, Bagian Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara, 1992/1993.

36. Patunru, Abdurrazak Daeng, *Sedjarah Gowa*. Diterbitkan oleh Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Tenggara. (tanpa Tahun).

37. Pigeaud, Th., *Java in The Fourteenthe Century Vol. I : Javanese Texs in Transcription*, Koninklijk Instituut voor Taal, La and en Volkenkunde, The Hague Martinus Nijhof, 1960.

38. ----------, *Literature of Java vol. I : Synopsis of Javanese Literature 900-1900*. Koninklijk Instituut voor Tall, Land en Volkenkunde, Leiden, The Hague Martinus Nijhoff, 1967.

39. Reid, A., "Introduction : Slavery and Bondage in Southeast Asian History", dalam Anthony Reid (editor) *Slavery, Bondage and Dependency in Southeast Asia*, University of Queensland Press, St. Lucia-London-New York, 1983 ; 1--43.

40. Reinwardt, C.G.C., *Reis naar het Oostelijk gedeelte van den Indischen Archipel in het jaar 1821*. Amsterdam, Frederik Muller, 1858.

41. Rouffaer, G.P., "*Oudjavaansche Inscriptie van Soembawa*", *NBG*, 48, 1910 : 110--113.

42. ----------, "*De Landkaart van Soembawa*", *TNAG*, 31 1914 : 779--781.

43. ----------, "*Bijdragen tot de geshiedenis van Celebes*", *TNI* 16 (II), 1854 : 149--186 ; 221--253.

44. Roux, C.C.F.N. Le, "*De Madjapahitsche Onderhoorigheden Hutan Kadali en Gurun en de Oude naam voor het eiland Flores*", *TNAG* LIX, 1942 : 915--927.

45. Schrieke, B.J.O., *Indonesia Sociological Studies*, Part I, W. van Hoeve Publishers Ltd. The Hague, 1966.

46. Seegeler, G.J., "Adatrechetgegevens van West Soembawa", *Adatrechtbundel* 39, 1937 : 516--528.

47. Sidemen, Ida Bagus, "Dang Hyang Nirartha dan Kawangsan di Bali", dalam *Seminar Sejarah Nasional V Subtema Penulisan Sejarah*, depdikbud, Direktorat jarahnitra, Proyek IDSN, Jakarta, 1990 : 88--110.

48. Soekatno, Endang Sh., "Watu Paa, Sebuah Pemujaan di Tepi Pantai", *Saraswati, Esai-Esai Arkeologi, Kalpataru Majalah Arkeologi*, no.9, 1990 : 206--213.

49. Soekmono, R., "Archaelogy and Indonesian Historiography", dalam *An Introduction to Indonesian Historiography*. Edited by Soedjatmoko, Cornel University Press, Ithaca New York, (TT) ; 36--46.

50. Stutterheim, W.F., Oudheden van Bali I (Het Oude Rijk van Pejeng). Teks Liefrinck van der Tuuk, Dingaraja, Bali, 1930.

51. Syamsudin, Helius, "The Coming of Islam and The Role of The Malays as Middelmen on Bima", Papers of *The Dutch-Indonesian Historical Conference held at Lgevuursche*, The Netherlands, 23--27 Juni 1980 : 292--300.

52. Tjandrasasmita, Uka (editor), *Sejarah Nasional Indonesia III*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1984.

53. Zollinger, H., "A Visit to The Mountainers, Do Dongo in The Country of Bima, *JIAEA*, vol. II, no.XI, Nov., 1948 : 687--694.

54. ----------, *Verslag van een reis naar Bima en Soembawa en naar eenige plaatsen op Celebes, Saleier en Flores geduren de de Maanden Mei tot December 1847", VBG*, XXIII, 1850 : 121--175.

55. ----------, "*Bima en Soembawa*", *JIAEA*, 1856 : 244--245.

Lampiran 1

DAFTAR SULTAN-SULTAN BIMA

1.	1620--1640	Abdul Kahir (nama sesudah wafat) Mantau-Wadu
2.	1640--1682	Ambela Abdul Khair Sirajuddin (nama sesudah wafat) Mantau Umajati
3.	1682--1687	Nuruddin Abu Bakar Ali-Syah (nama sesudah wafat) Mawa'a Paju, nama sebelumnya Mapparabung Daeng Mattalli'
4.	1687--1696	Jamaluddin Ali-Syah (nama sesudab wafat) Mawa'a -Romo
5.	1096--1731	Hasanuddin Muhammad Ali-Syah (nama sesudah wafat) Mabata bo'u nama sebelumnya Mapatalli'Sya'ad-Syah
6.	1731--1748	Ala-uddin Muhammad Syah (nama sesudah wafat) Manuru Daha, nama sebelumnya Abdullah Sulaiman Ali-Syah.
7.	1748--1751	Kamalat Syah, nama sebelumnya Rante Patola Sitti Rabiah.
8.	1751--1713	Abdulkadim Muahmmad Syah Zillu'llahi-Fi-il Alam (nama sesudah wafat) Mawa'a Taho, nama sebelumnya Sri Nawa.
9.	1773--1817	Abdul Hamid Muhammad Syah Zillu'llahi-Fi-il Alam (nama sesudah wafat) Mantau Asi Saninu.
10.	1917--1854	Ismail Muhammad Syah (nama sesudah wafat) Mantau Dana Sigi
11.	1854--1868	Abdullah (nama sesudah wafat) Mawa'a-Adil.
12.	1868--1881	Abdul Azis (nama sesudah wafat) Mawa'a Sampela.
13.	1881--1915	Ibrahim
14.	1915--1958	(?) Muhammad Salahuddin

Lampiran 2

HET CONTRACT MET BIMA EN SUMBAWA VAN 1765 ARTICULEN

Te zamen getrocken en opgesteld bij CORNELIS SINKELAAR Gouverneur en Directeur van weegens den Staat der Nedertlandsche Oost Indische Compagnie be-eedigt door

ABDUL CADIAM MAHOMMETH SALILLOEL LAHOE PELE ALAM

kooning van Bima, Aka-eo-dienie (anders:) Datoe Jerewe, koning van Sumbawa, Ahmat ahaloedinie-djoehain koning van Dompo Abdul Sa-id joean Camalasa, koning van Tambora, Moehammadja-hoatang, koning van Sangar, en Abdul Rachman, koning van Papekat; om na den inhoud dersel(v) voor eerst, ende tot nader ordre van Haar Hoog edelheedens, Den Hoog edelen Groot Agtbraaren Heere

PETRUS ALBERTUS VAN DER PARRA

Gouverneur Generaal, en de D'Edele Heeren Raden van Nederlandsch India, stip ende heyliglijk te zullen reguleeren, sijnde deese articulen nu de novo opgesteld, om reedenen dat men ontdeck heeft sommige poincten in de voorheen gemaakte verbonden, zeer gebreckelijk en verkeert in de Malijdse spraake vertaald zijn, dat veeltijds aanlijding de Residenten, en zulx voor te koomen, en uyt de weg ruymen, dierhalven dan ook in deese met de uytterste nauwkeurigheid alles is nagegaan, omdat het voor altoos soude kunne dienen tot conservatie der rust, vreede, goede vriend en boondgenootaschap me DE. (De Edele) Compe.

1

Beloovende zij Koningen to zamen en ieder in 't bijzonder de Contracten bij haare voorderen en predecesseuren op diverse tijden met de Comp. gemaakt of met haare dienaaren aangegaan heyliglijk te zullen nakomen en gehoorsawnen, in al hun deelen voor soo verre deselve nog in gebruyk soude kunnen zijn te sullen opvolgen.

2

Datse de voortz Contracten houden als g'insereerd (1), ingevalle in deeze het een ofte andere mogt zijn uytgelaatea, ende daarom na den teneur derselve belooven en sweeren, hoe er twschen haar en DE. Comp., soo verre hunne rijken zig nu uystrecken ofte na dezeen mogte komen uyt te strecken, sal gehouden werden een goede vaste vreede, vriend en bondgenootschap ten eeuwigen dagen toe, en dat in alle sinceriteit, getrouw en opregtigheid.

3

Ende opdat dit Contract te bestendiger mag bljiven, soo vergunnen en geven zij over aan de, Comp.: de frequentatie van alle haare landen, met uytsluyting van alle Europeesche natien ofte iemand van haarentweegen, sonder onderscheyd niemand wie het ook zijn mogen uytgesondent, zullende zij Contracten nogte niemand van de haare, deselve vreemde natie ter negotie ofte andersints, vermoogen te accepteeren ofte toelaten sonder toesteming ofte conzent van DE. Comp. dan wel degeene die 's Comps weegen als dan zicht tot BIMA ofte wel daar omtrend koome te bevinden en bij mancquemend van den Resident aldaar, die er de Comp. na hun believen en goedvinden sal gezegde doen posthouden gehouden zijn, voor het admitteeren van de gezegde vreeme negotianten bij zulken geval den Gouverneur en Raad tot MACCASSER, daarvan vooraf kenmisse te geeven, sonder wins voor weeten zij ook van geenenatic, ja ook van geene, brieven of bezendingen, onder welke schijn het ook soude moogen zijn.

4

Sal van nu en voortaan alle frequentatie en correspendentie tussen de in den hoofden dezes gemelde vorsten en de MACCASSAREN zijn en blijven afgeneesden, en dat daarom de vaart dier natie met hunne vaartuygen in de Landen der voorsz. vorsten sal werden gespeend, ende door den Gouverneur aan niemand eenige pascen veerlend dan aan de sulken van wien men verseekert is dat hunne belangen aldaar zijn leggende, en dat zij met geen quade insigten darwaards strecken, die dan ook met s'Comp. psce bij den Gouverneur in eygener persoon ondertekend zullen moeten voorstien zijn, of anders als roovers en lorrendrayens(2) moogen en moeten getracteerd werden.

5

Werd de Comp. allen met uytsluyting van alle emdere voorsz. Europeeze natie, overgegeven den vrijen handel an negotie over het gantsche land en gebied van hooggemi. koningen sonder dat ook eenige andere Indiaanse natie, 't zij Mooren, Javaanen, Malijers, of Atchinders, Sianuners etc. geene uytgezondert daar ook eenige waaren ofte koopmanschappen zullen vermoogen aan te brengen, ja zelven met hunne vaartuygen aankoomen zonder pascedudle (3) van weegens de Comp. die' zij dan ook aanstonds, voor en aleer zij sig bij iemand aageeven, bij den resident it ztillen hebben te brengen, dewelke het zal toegelaaten moeten werden de sodanige die aan deeze ordre nict koomen te voldoen, in beslag te neemen, en met vaartuygenlading in goede toesigt herwaards te zenden ter dispositie dezer reggering waar omtrend de welgemelden vorsten verpligt zullen zijn hem de behulpzamen hand te bieden.

6

Insegelijk sullen geene andere van alle voorsz. soo Europeense als Indiaanse natien, uyt het gebied en jurisdictie van hooggem. koningen mogen vervoeren de allerminste koopmanschappen, 't zij dat dezzelve aldaar in't land vallen of van buyten toegestaan worden te moogen aanbrengen, 't zij door de onderdaanen van hooggem. koningen of andere nabij woonende vreemdelingen, alzoo datzelve de Compe alleen is toegestaanen, in specie het sappanhout, schildpadshoorn en wax, 't welk de Comp. aldaar'sjaarlijx tegens de gestelde prijs ofte wel na hunne waarde sal laaten afhaalen en botalen, ten waare dat zij koningen hun apparte vaartuygen met een voorrad van schildpadshoo en wax genlegen waren na Macasser te zenden, om er so veel vroeger of tusschentijdige betaling daarvoor te hebben, 't welk haarl. bij sulken geval meede g'accordeerd en toegestaan werd, mits dat zij dan ook geyliglij gehouden zullen zijn hunne waaren bij de Comp. en iemand anders ter marckt te brengen, en daarvoor soo wel om hun land als hier tot Macasser moeten ontfangen soo eenige koopmangchappen of Nederlandse silver specien, die thans alhier en aldaar in haar land gangbaar zijn of namaalse gangbaar mogte gemaakt worden, na goedvinden van de Compagnie.

7

indien 't eeniger tijd eenige Nederlandse ofte andere Christenen't zijn dat het zijn dienaars ofte onderdaanen van de Companje ofte ook zels geene onderdanen, soo het Christenen zijn, hun tot de hoogemelde koningen quamen begeeven, emtnen soo zullen de sodanige geensint aangenomen, maar datelijk in goederer zekerheid aan handen van de Comp. moeten overgeleveert werden, mitsgaders ook alsulke die bereeds nog ergens onder de jurisdictie van hooggemelde koningen mogte schuylen, insgelix en sal ook de Comp. geene onderdanen van de koningen tot het Christenen gelooven trecken, teegens wil en dank haare hoogheeden.

8

Soo eenige schip ofte schepen van de Comp. bij ongeluk ofte andere toevallen bij of omtrent de rijken der hooggemelde vorsten ofle op haare stranden te bljiven quamen, soo zullen de koningen gehouden zijn, na vermoogen de Comp. bij te staan met vaartuygen en valk, om de menschen en goederen te bergen, en tragten voor te koomen, alle verminderingen van dien, daarom sal ook de Compagnie het volk dat haar te hulp komt eerlijk beloonen.

9

Hooggemlde koningen en zullen nu of na deezen van de Compe over het in en uytvoeren van goederen, aankomen van scheepen ofte andersints, niet vermoogen te vorderen eenige thollen ofte geregtigheeden (4) onder wat titul het ook weesen mogte, alzoo de Comp. en deseelfs onderdaanen dat alles vrijgegeeven word.

10

Het sal d'E Comp. vrijstaan door het geheele land, daar het haar geliefd, en op sodanige plaats als zij daartoe komen uyt te kiessen, eenige logie oop te regten, waartoe daan ook haar hoogheeden sullen doen bestellen de materiaalen na s'lands wijse: dog begeerd de Comp. haar logie van steen en met een pannen dack te maaken, daartoe zullen zij selve de materialen moeten besorgen, of ten waare gedient wilde zijn van de bergsteencn die daar vald, en waarvan de Comp. de brengens dan behoorlijk sal loonen.

11.

Sullen hooggem koningen gehouden weezen al het grof canon, dat onder het vermoogen van haar mogte bevonden werden, op eerste aamaningen, aan handen van de Comp. over to leeveren sonder daarvan eenig stuk te moogen of verdonkeren.

12

Ende opdat dit verbond te onverbreekelijker zij, soo sullen hooggem. koningen sijn vijanden van 's Comp. viajnden, en vrieden van 's Comp. virenden, wijders ook gehouden weezen aan deeze laats gemelde soo veel hulpe te bewijsen, daar het vereyscht werd, als in haar vermoogen staat, sullende de Comp. ook in teegendeel so verre de geleegenheid wil toelaaten, haar van gelijken voor alle overlast die hun door andere mogte werden aangedaan, tragten te beschutten, sonder dat de Comp. aan deese adjude preciselijk gebonden bljift, en vooral niet, wanneer zij eenig geschillen diep in of buyten's lands met dese of geene mogte hebben, ten waare de natuur der zaaken daartoe gesteld waare en de Comp. het selve noodig oordeelden (er als boven gezegd) gellegen quam, in welken geval degeene die g'assisteerd werd gehouden zijn sal de Comp. de te maakene costen zullen moeten vergoeden, 't zij in geld, sappanhout ofte klocke slaven.

13

Geen forten ofte sterktens sullen de hooggemelde koningen in eenige van haare landen of jurisdictien moogen maaken, als met kennisse, voorweeten en toestaan van de Comp., of den Resident, die van weegen de Comp. aldaar (des noods) mogten geplaets werden, en als 't gebeurd dat de Comp. tot verseekering van hun hooghedeen ergens noodig oordeelen, haar een vastigheid te laaten maaken, soo zullen haar hoogheeden op't eerste aanzeggen, die weeder moeten nederwerpen.

14

Verklaaren voorsz. Hoogheeden haar zullen hunne onderdaanen en landen in't gehecel over te geeven oder de bescherming van de Comp., die zijj altoos willen en sullen erkennen voor haaren schut en schertmheer, gelijk ook de Comp. onder restrictie als bij het twaalfde

articul deezes reeds is ter needer gesteld, aanneemd bij geleegenheid des tijds, wanneer er g'oordeeld word, dat zij 's Comp. hulpen ten uytterste benodigen, en in geen staat zijn, om haar zelver langer te defendeeren, haar lieden de behulpzaam hand te bieden, dog het welke in geenderhande wijze sal stand grijpen, wanneer er benoven werd, dat zij als lafhartigen hun eygen interest en rijken verwaaroosen, en het op de hulp van de Comp. tragten te laaten afloopen.

15

Betuygende haar hoogheden te zamen, en ieder in 't bijzonder te renuncieeren en af te staan van alle superioriteit, en heerschappije die den een over den anderen voor dato mogten hebben gepretendeerd of zig aangematigt, beloovende zij malkanderen nu ofte nooyt naar deezen daarom meer lastig te zullen vallen, ofte eenige molesten en vijandelijkheeden aan te doen, veel min te gedoogen dat zulx door haar onderdaanen werd ondernoomen, maar verklaaren in tegendeel malkanderen voor broeders, vrije Heeren en Koningen te erkennen, ten euwigen daaue toe, ende opdat er na deezen geene disuputen meer mogtena vallen over de rang (5), soo is dierweegene al meede overeengekomen en verstaan, dat wanneer den eenen koning den anderen in zijn jursidictic, hof ofte Rijk komt te besoeken (dat alsdan dnzelven aankomende koning die het beroeok geeft ofte doet, de rang sal moeten cedeeren voor den besoek ontvanger, gelijk een buyten koning door een nabuurg koning zijn land passeerende, 't welk den een den ander niet bevoegt sal zijn ingaan of keeren te beletten, bij ontmoetinge ook gehouden sal weesen te doen, ten waare den besoek ontfanger uyt eygen motiven en hoflijkheid daarvan Wilde afstaan, en den besoeker den rang geven.

16

Soo betuygen Haar generaaliter aan 't goedvinden van den HoogEdelen Groot Agtb. Heere PETRUS ALBERTUS van Der PARRA, Gouverneur Generaal, ende Edele Heeren Raaden van India tot Batavia, te stellen en over te laaten, om de bovenstaande artieulen geene uytgesondert extendeeren, besnoeyen ofte wel eenige andere verandering daarin te maaken, na het hun Hoog Edetlheedens sulx ten besten van het Land in't algemeen ofte wel de daarop leggende

koningrijken en 't bijsonder, en den staat van de Comp. zullen goedvinden te behooren.

17

Beloven haar hoogheden den een den anderen, over en weeder gelijkerhand te Zullen bijstaon, hulptroepen toevoegen, on helpen beschermen tegens alle geweld en overlast, die man een van haar alleen van buyten, 't zij door zeeschuymers, of andere Indiaanse roofvogels soude wille aandoen, zulx haar Hoogheden sweeren den anderen tot er dood getrouw te zullen blijven, en het bloed van den eenen zijn onderdaanen tot beveyliging van den anderen op te zullen zetten.

18

Betuygen opgemelde koningen bij toeval dat tusschen haar door het een ofte andere misverstand eenig geschil quame te onderstaan, malkanderen niet strack te zullen beoorlogen, veel min eenig ongemak anndoen, maar nter contrarie dat zij hunne geschillen voor en al eer iets te beginnen d'Comp. alhier aan het Casteel sullen komen voordraagen, om hunne zaaken openleggende bij den gouverneur en Raad, bemiddeling en regt voor den beleegdigde te versoeken, om alsoo alles wat tot nadeel van hun gemaakte broederschap zoude kunnen strekken to weeren, beloovende daarenboven, dat in gevallen een der twistende parthijen na de voorschreeve bemiddeling niet luysteren, ende regtsinnige reeden geen gehoor wilde geven, dat in soo een cas resteerende koningen de beleedigde na vereysch van zaaken in zijn regtvaardige zaaken sullen te hulp koomen.

19

Voor het overige beloofd, den als nu de novo in dese volle vergadering als wttig koning van Sumbaawa aangestelden AKAOEDIENE (alias) DATOE JEREWE, voor zig zelfs en zijn rijxgrooten, sso wel de gemaakte schwt aan de Comp. voor het gezonden secours in de jongste oorlog daar te landen, als de ongelden die nog staan te vallen in de ophanden zijnde expeditie na derwaards ter verdrijving der Baliers, en den uzurpateur van het rijk, den prins van Taliwang te zullen voldoen, opleggen en betaalen 't (zij) in geld, sappanhout of to slaven, en dat zoo spoedig moogelijk zij, conform het vermelde bij het twaalfde articul.

20

Wijders belooft den koning van Dompo. om de rust weder in zijn rijk te brengen, te zullen herstellen desselfs broeder Abdul Cadier in desselfs oude waardigheid als Turelie Hoe (6) en te willen restitueeren alle hetgeene hij voor de tusschen haar gereezene onlusten, in eygendom bezeeten heeft, verklaarende alle het voorheen gepasseerde niet te zullen herdenken maar voortaan in opregte vriendschap met hem te zullen leeven.

21

Ende te laatsten zoo zijn de bovenstaande articuten, opdat alle dezelve des te religieuzer mogten werden onderhouden bij alle de koningen in den hoofden deezes gemeld, in presentie van haar bijhebbende grooten ofte koningskinderen, onder het drinken van kritsenwater op den hoofden deezes gemeld, in presentie van haar bijhebbende grooten ofte koningskinderen, onder het drinkrn van kritsenwater op den Alkoran beswooren, ende voor haar ende haare nakomelingen, in 't bijweweesen van den Heer Gouverneur en Raad onderteekend (onderstond:) Maccasser in 't Casteel Rotterdam den 9 february 1765: (was geteekend:) Cs SINKELAAR; Es BEIJNON, Jn B. DELA-HOUTEMAISESN, Ms PETERS, Fk Wm Hk VAN BLIJDENBERG, Jn Hk Voll, Aij RAVENSBERG, Jn Cn CRUIJPENNING, en J. BLEEKE (in margine:) 's Comps. segul gedrukt in roode lacque, daaronder stond gesz., Ter ordonantic van den heer Gouverneur CORNELIS SINKELAAR en den Raad, dato voorsz (geteekend:) Js BLEEKE Secretaris.

Noten

(1) Vinsereerd = inbegrepen
(2) larrennraaiers = bedriegers, smokkelaars
(3) pascedulle = pas, paspoort
(4) gerechtigheden = rechten, cijnzen
(5) rang = voorrang
(6) Tureli Hu'u, titel van een der landsgrooten in het rijk Dompu.

Lampiran 3

HET TRACTAAT MET BIMA VAN 1857

TRACTAAT, gesloten tusschen het Nederlandsch-Indisch Gouverneent en den Sulthan en de rijksgrooten van Bima.

Nadernaal het contract tusschen den Staat der Nederlandsch Oost-Idische Compagnie en den Koning van Bima, op den 9den February 1765 gesloten, een aantal bepalingen bevat, welke niet meer kunnen worden nagekomen, zoo is op haden, Maandag den negenden November des jaars achttien honderd zeven en vitjig, ten Gouvernementshuize te Macassar door mij DIRK FRANCOIS SCHAAP, Gouverneur van Celebes en onderhoorigheden, als daartoe behoorlijk bij kabincts missive van Zijne Excellentie den Gouvemeur-Generaal van Nederlandsch Indie van den 15den December 1856, no. 189, g d, met den Sulthan ABDOELLAh en de rijksgrooten van Bima deswege onderhanded, en als een govolg daarvan, onder nadere goedkeuring van Zijne Excellentie den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch Indie, overeenkomen als gevolgt:

Art. 1

De Sulthan en rijksgrooten van Bima verklaren voor zich en hunne nakomefingen, dat Bima en onderhooriglieden een gedeelte uitmaakt van Noderlandsch Indio en govolgelijk goplaast is onder de opperheenchappij van Nederland.

Art. 2

Zij verbinden zich, steeds met hot Nederlandsch-Indisch Gouvemetnent te houden vrede, vriend-en bondgenootschap, te zijn Nijanden van de vijanden van Nederland, en vrianden van de vrionden van Nederland, mitagader, des gevorderd met menschen, wapenen en vaartuigen hulp te verleenen tegen de vijanden van Nederland en naa de vrienden van Nederland, zooveel in hun vermogen is.

Art. 3

Zij verbinden zick de op Bima aanwezige versterking van het NederlandschIndisch Gouvemetnent met de zich daarin bevindelide

gebouwen, volgens oud gebruik, met Dompo en Sanggar (1), in behoorhjken staat te onderhouden, herstelien of vemieuwan.

Art. 4

Zij verbinden zich, naar hun vermogen mede te werken in het daarsteflen, op kosten vin het Nederiandsch-Indisch Goavernement van afle zoodanige veisterkingen, gebouwen en magazijn als welke het Nederlandsch-Indisch Gouvemement in het vervolg van tijd mogt noodig achten op te rigten, en om tot dit einde steeds den benoodigden grond beschikbaar te stellen.

Art. 5

Zij verbinden zich, geene versterkingen op te werpen zonder voorkennis van het Nederlandsch-Indisch Gouvernement en om zelfs die versterkingen welke met die voorkennis mogten opgeworpen zijn op de emte aanzegging te slechten.

Art. 6

Zij verbmden zich, den in hun gebied geplaatsten Nederlands-Indishen ambtenaar te erkennen als den. vertegenwoordiger van het Nederlandsch-Indisch Gouvernemen4 en geen gezag uit te oefenen over de Europeanen en daarmede gelijkgestelde personen zonder zijne voorkennis.

Art. 6

Zij verkennen, dat de Hollandsche kampong en daarbij behoorende wijken van vreemde Oosterfingen gesteld zijn onder zijn onmiddelijk gezag, en verder erkenen ten zij, dat al derzelver inwoners ondenvorpen zijn aan den regter, die daartoe door het Nederlandsch-Indisch Gouvemement Gouvemement aangewezen wordt.

Regtsvorderingen tegen Europeanan en daarmede gelijkgestelde personen worden bestist door den aidaar geplaatgen Nederlandschen ambtenaar, dan wel door den bevocgden regter te Macassar.

Art. 7

Zij verbinden zich, then anibtenaar en degenen, die aan hem oonderheschikt mogten zijn, steeds te voorzien van eene betioorlijke woning, ten hunne koste te onderhouden.

Art. 8

Zij verbinden zich, hun land nimmer aan eenige andere natie als de Nederlander over te geven noch met eene andere natie verbonden aan te gaan zonder toestemming van het Nederlandsch-Indisch Gouvemement.

Art. 9

Zij verbinden zich, geene brieven, geschenken, zendelingen of afgezanten te bestemmen naar andere natien als de Nederlanders, noch die van andere natien aan te nemen, zonder voorkennis van het Nederlandsch-Indisch Gouvemement.

Art 10

Wederkeerig verklaart het Nederlandsch-Indisch Gouvemement, den Sulthin en de rijksgrooten van Bima, voor zooveel zulks mogeqjk mogt bevonden worden doch ten himnen koste, te zwlen beschutten tcgen alle overlast, welke hun door anderen onregmatig mogt worden aatigedian, zoo ah, overeenkomen werd bij att 12 van het tractaat van 9 February 1765, mitsdagers hulp te zuffen verleenea waruieer zij die hulp in den uitersten nood mogten verzoeken en zij niet meer in staat mogten zijn, zich zelven langer te verdedigen; met dien vertansde mogt bevonden worde, dat zij zonder moed hunne eigene belangen verwaarloozen en slechts vertrouwen op die beschutting en hulp van het Nederlandsch-Indisch Gouvemement.

Art. 11

De Sulthan en de rijksgrooten van Dima verbinden zich hot welzijn des voiks to bevorden, met regtvaardigheid te regeren,den landbouw, de nijverheid, den handel de scheepvaart te beschertnen; geene verordeningen to maken door welke die zouden belmmerd worden, en niet wihekeurig te beschikking over de persons en. goederen van hunne onderdanen.

Art 12

Vergunning om to graven onder den grond en om uit dit graven voordeclen te trekken, verl eenen zij echter slechts aan hunne eigene inheemsche onderdanen.

Zij verbinden zick dusdanige vergunning niet te verleenen aan Europeanen en daarinede gelijkstelde penonen en ook niet aan de Oosterlingen, dan met voorweten van het Nederlandsch-Indisch Gouvememt.

Het Nederlandsch-Indisch Gouvemement verbindt zich daarentegen om dusdanige wigelegenheden te regeten in overeenstemming met den Sulthan en de rijksgrooten van Bima, in hun meeste belang, zonder zich eenige wisest voor te behouden, maar zooveel mogelijk volgens de algemeene verodening, zoo als die thans door Zijne Majestiet den Koning vastgesteld is bij bealuit van 24 October 1950 no. 45, of wel nader zal warden gewijzigd.

Van die wijziging wordt anverwijld kennis gegeven aan den Sulthan en de tiiksgrooteii van Bima. Van dit booluit van Zijne Majesteit den Koning, zoo als hetzelve, beschereven staat in hot Staatsblad van Nederlandsch Indie over 185!, no, 6, is eene Maleische vertaling aan dit tracutat gehecht.

Art. 13

De Sultliatt en rijkrgrootcn van Bima verbind zich daarenboven, geene gronden te verhuren tan Europeanen en daarmede gelijkstelde personen of aan vreemde Oosterlingen, dan met voorweten van het Nederlandsch-Indisch Gouvemement, opdat die huur geregeld worde in overeenstenuning met het Nederlandsch-Indisch Gouventement, zonder eenig voorbehoud van winst voor het. Nederlandsch-Inchsch Gouvemement zelf, in het meeste belang van den Sulthan en de tijksgrooten van Bima, maar zoveel mogelijk volgens de algemeene verordéning, zoo als die vestgesteld is door Zijne Majesteit den Koning bij besluit van 3 Julij 1856 no. 93, of nader zal worden gewijzigd.

Van dusdanige wijziging wordt onverwijld kennis gegeven aan den Suldm en de rijksgrooten van Bima.

Van dit besluit van Zijne Majerteit den Koning, zoo als hetzelve beschreven staat in het Staatsblad van Nederlandsch-Indie over 1856, no. 64, is eene Maleishe vertaling aan dit tractaat gehecht.

Art. 14

De Sulthan en rijksgrooten van Bima verbinden zich de Nederlandsch-Indich zilveren munstpecien, zoo als die door het Nederlandsch-Indisch Gouvemement worden vastgesteld, steeds in het rijk van Bima als gangbaar en wettig betaalmiddel toe te laten.

Art. 15

Het Nederlandsch-Indisch Gouvernement verzekert daarentegen aan de vorsten en ingezetenen van Bima de bevoeghoid tot hot voeren van de Nederlandsch vlag, mits zich voor hunne schepen en vaartwgen voorziende van Nederlandsch-Indisch zeebrieven en jaarpagwn, overeenkomstig de degwege bestaande verordening.

Art. 16

De Sidthan en tijksgrooten van Bima verbinden zich, den zeeroof met alle magt tegen te gaan.

Art. 17

Zij verbindem zich, aan alle schepen of vaarturigen, welke op de kusten van hun rijk in nood mogten verleenen bijstand, de shipbreukelingen te verzorgen en zich geene van hunne goederen toe te eigenen, noch te geddogen dat hunne ondergeschikten zich die die toe eigenen.

Art. 18

Zij vffbitiden zich, schepen of en of goederen, welke uit zee aan de stranden van hun rijk mogten aandrijven of aangebragt worden, en welker eigenaren onbekend zijn, te bergen, dan wel ten behoeve van de belanghebbenden in het openbaar te verkoopen, indien die niet mogten kunnen bewaard worden.

Art. 19

Zij verbinden zich, van het stranden of aanbrengen uit zee van schepen, vaartuigen of goederen onverwijid kennis te geven aan den gouvemeur van Celebes en onderhoorigheden door tusschenkomst van den vertegenwoordiger van het Nederlandsch Indisch Gouvemement op Bima.

Art. 20

Zij kunnen vorderen hulp-en bergloon; hetzefvr. wordt begroot, naar mate van de rnoeite, door den Sulthan van Bima: de Suldm geeft van deze begrooting onvetwijld kennis aan den gouvemour van Celebes en onderhoorigheden door tusschenkonist van den vertegenwoordiger van het Nedelrandsch-Indisch Gouvemement op Bima.

De belanghebbendea die zich met deze begrooting bezwaard mogten achten, ktinnen de besessing inroepen van den Gouverneur General door tusschenkomst van den vertegenwoorger van het Nederlandsch-Indich Gotivernement op Bima en den gouvemeur van Celebes en onderhootigheden.

Art. 21

De Sulthan en rijksgrooten van Bima verbinden zich, in hun rijk niet te dulden menschenroof en den handel in menschen, noch in-en uitvoer van slaven

Art. 22

Zich verbiden zich, niet toe te laten, dat European en daarmede gelijkstelde personen of vreemde OOsterlingen zich vestigen binnen het rijk van Bima, dan nadaartoe bekomen te hebben vergunning van het Nederlandsch-Indisch Gouvernement; de inboolingen van andere gedeelten van den Indischen archipel zijn daarvan niet uitgezonderd.

Handelarn worden echter niet afgewezen, maar ondervinden bijstand en bescherming.

Art. 23

Zij verbinden zich, aan allen, die zich met vergunning van het Nederlandsch-Indisch Gouverment binnen hun rijk bevinden, te verllenen bescherming van persoon en goederen.

Art. 24

Zij verbinden zich, in hun rijk niet op de nemen lieden, die zich zonder verlof uit de land- of zeemegt van Nederland mogten hebben verwijder noch ook misdadingers, uit eening ander gedeelte van Nederlansch Indie ontvloegt. Bij opgrave leveren zij die uit aan het Nederlandsch-Indisch Gouvernement.

Art 25

Elk misdadiger wordt gestraft volgens de weeten van het land op het land. waar hij misdreven beeft.

Europeanen en daarmede gelijkstelde personen kunnen echter alleen worden te regt gesteld voor Europeanen door het Nederlandsch-Indisch Gouvernement.

Art 26

De Suldw en rijksgrooten van Bima verbinden zich, geene matielende of verminkende straffen op te doen leggen.

Art 27

In het tractaat, gesloten den 9den February 1765, is overrengekomen dat alle andere natien als de Nederlanders uitgesloten zijn van vaart en den handel op Bima. Die voorwaarde kan nit meer worden nagekomen: het is den Sulthan en rijksgrooten van Bima niet meer verbonden, tot de vaart en den handel toe te laten schepen en en van elke natic, die met het Rijk der Nederlanden bevriend is: daarom verbinden zij zich, in overleg met den gouvemeur van celebes en onderhoorighoden, door tusschenkomst van don vertegenwoordiger van het Nedertandsch-Indisch Gouvemement op Bima, vast te stellen een tatief van haven- en ankerage-gelden en van irlkomende en uitgaande regten voor alle natien gelijkelik werkende.

Art. 28

De Sulthan en tijksgrooten van Bima verbinden zich, jaarlijks aan het Gouvernement van Nc&rlandsch-Indic te loveren vijftig koijangs gapanhout, ter hoofdplaats Bima, en zulks met wijziging van de op den 12den April 1850 gerjoten overeenkomst, welke overigens geacht wordt in haar geheel in dit contract ingeslacht te zijn.

Art. 29

Het Nderlandsch-Indisch Gouvemement verbindt 2ich daartegen te betalen vijftig gulden, zilveren munt, voor eike geleverde koijang gapanhout, na afloop van de geheele levering; mau in de laatste helft van elk jaar kunnen twee derde gedeelten van den prijs, van de

in het volgendejaar te leveren hoeveelheid upanhout in voorschot worden bekomen.

Art. 30

De Sulthan en rijksgrooten van Bima verbinden zick tot opstapeling en berging van het aangekapte sapatihout, in de aan het gtrand gelegen kampong ter hoofdplaats te doen opbouwen een pakhuis, te zamen gesteld uit hout en bamboe.

Art. 31

Zij verbinden zich het sapanhout in de maanden Augustus en September van elk jaar der Christelijke jaartelling door de bevolking te doen aankapen en opvolgend te doen opbergen en bewaren in het daartoe bestemde pakhuis.

Aldaar wordt hetzelve in in onttvang genomen door den vertegenwoordiger van het Nederlandsch Indisch Gouvernement op Bima, en afgeladen in het tot afhaal bestemde schip. Na die aflevering en afscheping wordt onverwijld overgegaan tot betaling van den leveringsprijs en de verevening van het bekomen voorschot.

Dit voorschot mag in geen geval voortloopen om te worden gebragt ten laste van de levering van een volgend jaar.

Art. 32

De Sulthan van Bima verbindt zich, geen heerschappij uit te oefenen over de rijken van Sumbawa, Dompoe en Sanggar (1), maar de Vorsten van die rijken te blijven erkennen als broeders, vrije heeren en koningen, en aan eklanderen te doen toekomen de van ouds gebruikelijke eer bewijze, laaststelijk onder andere amschreve in art. 15 van het tractaat van 9 February 1765.

Art. 33

De Sulthan en rijksgrooten van Bima verbinden zich, de vorsten van Sumbawa, Dompoe en Sanggar (1) met menschen, wapenen en vaartuigen bij te staan tegen elk van buiten komend geweld, en zulks onder wederkeerige verpligting.

Art 34

Zij verbinden zich, geschillen met de vorsten van Sumbawa, Dompoe en Langgar ter bemiddeling te onderwerpen aan de Gouverneur-Generaal van Nederlandsch Indie, door tusschenkomst van den vertegenwoordiger van het Nederlandsch-Indisch Gouvernement en den gouvernement van Celebes en onderhoorigheden.

Zij verbinden zich bijzonderlijk om, ingevaal eene der twistende partijen naar die bemiddeling niet mogt luisteren, als dan behulpzaam te zijn om den verongelijkte regt te doen toekomen.

Art. 35

Het Nederlandsch-Indiesch Gouvernement verklaart dat zoolang de Sulthan en rijksgrooten van Bima deze overeenkomst met trouw nakomen, hetzelve zich niet onmiddelijk met het inwending bestuur inlaten zal, hetwelk integendeel aan den Sulthan van Bima en de rijksgrooten overgelaten wordt.

Art. 36

De Sulthan en rijksgrooten van Bitna verbinden zich daarentegen het inwendig bestuur van bet rijk te regelen en uit te oefenen in overleg met den gouvemeur van Celebes en onderhoorigheden, door tussehenkomst van het Nederlandsch-Indisch Gouvemement op Bima.

Art. 37

Bij overlijden of aftereden van den Sulthan wordt daarvan door te rijksgrooten van Bima onverwijld kennis gegeven aan den gouverneur van Celebes en onderhoorigheden door tusschenkomst van den vertegenwoordiger van het Nederlandsch-Indisch Gouvernement op Bima.

Zij geven tevens kennis wie, volgens de instelling des lands, tot opvelger van den Sulthan gekozen is.

Deze opvelger is gehouden zich, onder eede, tot de getrouwe nakoming van het onderwerpelijk contract te verbinden, alvorens door het Nederlandsch-Indisch Gouvernement te worden bevestigd.

En opdat het ten allen tijde blijke dat genoemde Sulthan en de rijksgrooten van Bima zuiver meenen de opgemelde overeen komst heilig en en met alle oprechtheid gestrand te doen en na leven, zoo hebben zij dit tractaat hiertoe expresselijk vervaardigd, met eenen heiligen eed bevestigd en voorts met het rijkszegel van Bima en hunne handteekeingen bekrachtigd.

Aldus gedaan te Macassar, ten dage voorsehreven.

MOEHAMED DJAKOE (Rijksbestierder)

MOHAMED TAHER

MOHAMED ALIE

MOHAMED SALLE

ABDIJL ADJIET

ABDOEL SEKOER

KOPAL BOEMI

ABDULLA BOEMI

TORELIE SCHOEROE

JANELIE WOHA

BOEMILOEMA BOLO

BOEMI RINDA

BOEMI WAWORADA

BARA LAVE

TJENGGOE

De hierop voorkkomende inlandsche inlandsche handteekeningen zijn gesteld in tegenwoordiger van den adsistent-resisdent en magistraat.

(was get.) GRUDELBACH

De Secretaris van het Gouvernement, (was get.) A.F. VANDER VEN.

De Secretaris voor de inlandsche zaken, (was get.) BAKKERS.

Dit contract in bekrachtigd op den 29sten Januarij 1858

De Gouverneur-Generaal van Nederlansch-Indie, (was get.) CHS.F.PAHUD.

Ter ordonentie van Zijnee Excellentie.
De Algemeene Secretaris, (was get.) VAN DE GRAAF.

VERKLARING

Ik Abdoellah, Sulthan van Bima, beloof plegtiglijk:

1. Het Nederlandsch-Indische Geuvernement als mijnen oppeheer en de door hetzelve over mij gestelde magten als mijne overheid allen verschuldigheden eerbied, gehoorzaamheid en hulp te bewijzen.

2. Het tractaat tusschen mij het Nederlansch-Indisch Gouvernement, onder dagteekening van heden gesloten, getrouwelijk na te komen. En wel in het bijzonder:

3. Het welzijn des volks te bevorderen.

4. Met regtvaardigheid te regeren.

5. Met mijne naburen vrede te handhaven.

6. Den zeeroof te beletten.

7. Den slavenhandel tegen te gaan.

8. Den landbouw en de nijverheid aan te moedigen.

9. Den handel en scheepvaart te beschermen.

10. Aan schipbreukligen hulp te verleenen en gestrande goederen, en niet te dulden, dat onderdanen zulks niet doen.

11. In geene stattkundige aanrakingen te treden met vreemde mogenheden.

12. Geene vremdelingen van Westersche afkomst tot vestiging toe te laten, dan met toestemming van het hoofd van gewestelijk bestuur.

Macassar, den 9den November 1857.

Voor eensluidende afschrifen,
De Gouvernements-Secretaris, (get.) LOUDON
Voor eensluidend afschrift, De fung. Secretaris-Generaal bij het Ministerie van Kolonien, L.W.C. KEUCHENNIUS.

Noot
1. In origineel per abius Langgar.